



**IMPLEMENTASI STANDAR PENGELOLAAN PENDIDIKAN
DALAM PENINGKATAN MUTU SEKOLAH DI SMPN 4
BATANGAS**

SKRIPSI

**Ditulis Sebagai Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana
Jurusan Manajemen Pendidikan Islam**

Oleh:

**NOLA REFIKA
NIM. 14 131 033**

**JURUSAN MANAJEMEN PENDIDIKAN ISLAM
FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
BATANGAS
1439 H/2018 M**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Nola Refika
Nim : 14 131 033
Tempat/ Tanggal Lahir : Batusangkar, 11 November 1995
Fakultas : Tarbiyah dan Ilmu Keguruan
Jurusan : Manajemen Pendidikan Islam

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **"Implementasi Standar Pengelolaan dalam Peningkatan Mutu Sekolah di SMPN 4 Batusangkar"** adalah hasil karya saya sendiri, bukan plagiat. Apabila dikemudian hari terbukti sebagai plagiat, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Batusangkar, 26 Februari 2018

Yang membuat pernyataan



Nola Refika
NIM. 14 131 033

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing Skripsi atas nama NOLA REFIKA, NIM: MPL 14 131 033 dengan judul: "IMPLEMENTASI STANDAR PENGELOLAAN PENDIDIKAN DALAM PENINGKATAN MUTU SEKOLAH DI SMPN 4 BATUSANGKAR" memandang bahwa Skripsi yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan ilmiah dan dapat disetujui untuk dilanjutkan ke sidang *munasasyah*.

Demikianlah persetujuan ini diberikan untuk dapat dipergunakan seperlunya.

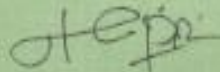
Batusangkar, Februari 2018

Pembimbing I

Pembimbing II



Dr. Muhammad Fazis, M.Pd.
NIP. 19631119 19919103 1 002


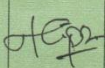
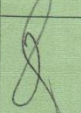



Dr. Himyar Pasrizal, S.E., M.M.
NIP. 19780524 200501 1 004


PENGESAHAN TIM PENGUJI SKRIPSI

Skripsi atas nama NOLA REFIKA, NIM: MPL 14 131 033, Judul "IMPLEMENTASI STANDAR PENGELOLAAN PENDIDIKAN DALAM PENINGKATAN MUTU SEKOLAH DI SMPN 4 BATUSANGKAR" telah *dimunaqasyahkan* pada Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Institut Agama Islam Negeri Batusangkar yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 15 Februari 2018 dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ilmu Manajemen Pendidikan Islam.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk dapat digunakan seperlunya.

No	Nama/ NIP Penguji	Jabatan dalam Tim	Tanda Tangan	Tanggal Persetujuan
1	Drs. Muhammad Fazis. M.Pd. NIP. 19631119 199103 1 002	Ketua Sidang		23-2-2018
2	Dr. Himyar Pasrizal, S.E.,M.M. NIP. 19780524 200501 1 004	Sekretaris Sidang		22-2-2018
3	Drs. Hafulyon. M.M. NIP. 19570301 198303 1 002	Anggota		21-2-2018
4	Dr. David. S.Ag. M.Pd. NIP. 19710323 200312 1 003	Anggota		20-2-2018

Batusangkar, 20 Februari 2018
Mengetahui,
Dekan Fakultas Tarbiyah Dan Ilmu
Keguruan


Dr. Sirajul Munir, M.Pd.
NIP. 19740725 199903 1 003

ABSTRAK

NOLA REFIKA, NIM 14 131 033 judul Skripsi: “Implementasi Standar Pengelolaan Pendidikan dalam Peningkatan Mutu Sekolah di SMPN 4 Batusangkar. Jurusan Manajemen Pendidikan Islam, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar”.

Pokok Permasalahan dalam Skripsi ini adalah membahas tentang Implementasi Standar Pengelolaan Pendidikan dalam Peningkatan Mutu Sekolah di SMPN 4 Batusangkar. Perolehan nilai untuk standar pengelolaan di SMPN 4 Batusangkar sudah berada diatas rating minimal, kategori bagus, namun mutu sekolahnya masih rendah. Maka perlu dilakukan peningkatan mutu sekolah.. Tujuan penelitian ini adalah: (1) Untuk menjelaskan bagaimana perencanaan sekolah di SMPN 4 Batusangkar untuk peningkatan mutu sekolah di SMPN 4 Batusangkar, (2) Untuk menjelaskan bagaimana pelaksanaan program sekolah di SMPN 4 Batusangkar untuk peningkatan mutu sekolah di SMPN 4 Batusangkar, (3) Untuk menjelaskan bagaimana kepemimpinan kepala sekolah di SMPN 4 Batusangkar untuk peningkatan mutu sekolah di SMPN 4 Batusangkar dan (4) Untuk menjelaskan bagaimana pelaksanaan pengawasan sekolah di SMPN 4 Batusangkar untuk peningkatan mutu sekolah di SMPN 4 Batusangkar.

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan analisis kualitatif dan mengambil lokasi di SMPN 4 Batusangkar Kecamatan Lima Kaum Kabupaten Tanah Datar. Subjek dalam penelitian ini adalah warga sekolah SMPN 4 Batusangkar (Kepala Sekolah, Wakil Kepala, Kepala Tata Usaha dan Pegawai Tata usaha). Teknik Pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi serta teknik mengecek keabsahan data, peneliti menggunakan Triangulasi.

Hasil Penelitian Menunjukkan bahwa Implementasi Standar Pengelolaan Pendidikan dalam Peningkatan Mutu Sekolah di SMPN 4 Batusangkar adalah dengan (1) Perencanaan program pendidikan di SMPN 4 Batusangkar sudah dilakukan dengan mengacu kepada standar pengelolaan pendidikan dalam upaya peningkatan mutu. Perencanaan program di SMPN 4 Batusangkar lebih menonjol dari point standar yang lainnya. (2) Pelaksanaan program kerja di SMPN 4 Batusangkar sudah mengacu pada RKS dan peningkatan mutu, Namun masih banyak juga program kerja yang belum teralisasi, seperti kegiatan ekstrakurikuler, perbaikan sarana dan prasarana sekolah, karena kendala pendanaan sekolah yang sangat sedikit. Oleh karena didahulukan program kerja yang lebih penting. (3) Kepala sekolah sudah melaksanakan kegiatan pengawasan dalam peningkatan mutu sekolah. Kegiatan ini dilakukan setiap hari. Namun belum sesuai dengan standar pengelolaan pendidikan. (4) Kepemimpinan kepala sekolah di SMPN 4 Batusangkar sudah dilakukan dengan mengacu

kepada standar pengelolaan pendidikan dalam peningkatan mutu sekolah.

Kata Kunci: Peningkatan Mutu Sekolah, Standar Pengelolaan Pendidikan

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

LEMBAR PESETUJUAN PEMBIMBING

LEMBAR PENGESAHAN TIM PENGUJI

HALAMAN PERSEMBAHAN

BIODATA PENULIS

KATA PENGANTAR i

ABSTRAK..... v

DAFTAR ISI.....vi

DAFTAR TABEL..... vii

DAFTAR GAMBARviii

DAFTAR LAMPIRANix

BAB I PENDAHULUAN1

A. LatarBelakang Penelitian 1

B. Fokus Penelitian 11

C. Rumusan Masalah 11

D. TujuanPenelitian 11

E. ManfaatPenelitian 12

F. Definisi Operasional..... 12

BAB II KAJIAN TEORI14

A. Implementasi Standar Pengelolaan Pendidikan 14

1. PengertianImplementasi 14

2. Pengertian Standar Pengelolaan Pendidikan 14

3. Standar Pengelolaan Sekolah 15

4. Kriteria Pemenuhan Standar Pengelolaan Pendidikan 18

B. Komponen Standar Pengelolaan Pendidikan 21

1. Perencanaan Program Pendidikan 21

2. Pelaksanaan Rencana Program Pendidikan.....	25
3. Pengawasan dan Evaluasi.....	38
4. Kepemimpinan	48
5. Pengembangan Sistem Informasi Manajemen	56
C. Peningkatan Mutu Sekolah	58
1. Pengertian Mutu	58
2. Pengertian Peningkatan Mutu.....	60
3. Peningkatan Mutu Sekolah.....	61
4. Standar Mutu Pendidikan	62
5. Upaya Peningkatan Mutu Sekolah	64
D. Penelitian yang Relevan.....	65
BAB III METODE PENELITIAN	70
A. Jenis Penelitian.....	70
B. Latar dan Waktu Penelitian.....	71
C. Instrumen Penelitian.....	72
D. Sumber Data.....	72
E. Teknik Pengumpulan Data.....	72
F. Teknik Analisis Data.....	74
G. Teknik Menguji Keabsahan Data.....	75
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	77
A. Temuan Penelitian.....	77
1. Deskripsi Data Penelitian.....	77
a. Keadaan Sekolah	77
b. Identitas Sekolah	78
c. Visi dan Misi SMPN 4 Batusangkar	79
d. Motto dan Tujuan Sekolah	79
e. Kode Etik Sekolah.....	80
f. Sarana dan Prasarana Sekolah	82
g. Pendidik dan Tenaga Kependidikan.....	83

h. Data Keadaan Orang Tua Peserta didik.....	83
2. Implementasi Standar Pengelolaan Pendidikan dalam Peningkatan Mutu Sekolah	84
a. Perencanaan Program Sekolah dalam Peningkatan Mutu Sekolah.....	86
b. Pelaksanaan Program Sekolah dalam Peningkatan Mutu Sekolah	94
c. Pengawasan oleh Kepala Sekolah dalam Peningkatan Mutu Sekolah.....	103
d. Kepemimpinan Kepala Sekolah dalam Peningkatan Mutu Sekolah.....	109
B. Pembahasan.....	114
1. Perencanaan Program Sekolah dalam Peningkatan Mutu Sekolah	115
2. Pelaksanaan Program Sekolah dalam Peningkatan Mutu Sekolah	118
3. Pengawasan oleh Kepala Sekolah dalam Peningkatan Mutu Sekolah	121
4. Kepemimpinan Kepala Sekolah dalam Peningkatan Mutu Sekolah	126
BAB V PENUTUP	130
A. Kesimpulan	130
B. Saran.....	131
DAFTAR PUSTAKA	133

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Kualitas Layanan Berdasarkan SNP	9
Tabel 2.1 Kriteria Pemenuhan Standar Pengelolaan.....	18
Tabel 2.2 Indikator Sekolah Bermutu dan Tidak Bermutu	62
Tabel 3.1 Waktu Pelaksanaan Penelitian	71
Tabel 4.1 Identitas Sekolah	78
Tabel 4.2 Rekapitulasi Sarana dan Prasarana Sekolah.....	82
Tabel 4.3 Luas Lahan	82
Tabel 4.4 Luas Bangunan.....	82
Tabel 4.5 Rekapitulasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan	83
Tabel 4.6 Data Keadaan Orang tua Peserta Didik	83
Tabel 4.7 Data Tingkat Pendidikan Orang Tua	84

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Langkah-langkah Pelaksanaan Rencana Program	25
Gambar 2.2 Perspektif Kepemimpinan	50

DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN 1 Pedoman Wawancara	136
LAMPIRAN II Transkrip Wawancara dengan Kepala Sekolah	141
LAMPIRAN III Transkrip Wawancara dengan Kepala Tata Usaha.....	148
LAMPIRAN IV Transkrip Wawancara dengan Wakil Kepala Sekolah	154
LAMPIRAN V Transkrip Wawancara dengan Pegawai Tata Usaha.....	157
LAMPIRAN VI Reduksi Data dengan Kepala Sekolah	160
LAMPIRAN VII Reduksi Data dengan Kepala Tata Usaha.....	166
LAMPIRAN VIII Reduksi Data dengan Wakil Kepala Sekolah.....	171
LAMPIRAN IX Reduksi Data dengan Pegawai Tata Usaha.....	173
LAMPIRAN X Display Data	175
LAMPIRAN XI Hasil Observasi di SMPN 4 Batusangkar	178
LAMPIRAN XII Dokumen Standar Pengelolaan Sekolah	181
LAMPIRAN XIII Dokumen RKS sekolah	182
LAMPIRAN XIV Dokumen RAPBS sekolah	200
LAMPIRAN XIV Dokumen EDS sekolah	204
LAMPIRAN XIV Dokumentasi	218

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Sekolah merupakan organisasi yang kompleks dan unik, organisasi yang kompleks karena didalam sekolah terdapat sumber daya–sumber daya yang saling terkait, sedangkan sebagai organisasi yang unik karena sekolah menjadi tempat proses belajar–mengajar dan pembudayaan kehidupan umat manusia. Sekolah menghadapi tantangan besar dan kompleks yang harus di respon secara positif dalam upaya meningkatkan mutu sekolah dan produktivitas nasional. Hal ini didukung oleh pendapat priansa & Somad (2014:20) menjelaskan pengertian peningkatan mutu sekolah adalah suatu proses yang sistematis yang terus menerus meningkatkan kualitas proses belajar mengajar dan faktor-faktor yang berkaitan dengan itu, dengan tujuan agar menjadi target sekolah dapat dicapai dengan lebih efektif dan efisien.

Pendidikan yang berkualitas dapat menunjuk kepada mutu proses dan mutu produk. Pendidikan disebut bermutu dari segi proses jika proses belajar mengajar berlangsung secara efektif, peserta didik mengalami proses pembelajaran yang bermakna, dan ditunjang oleh sumber daya (manusia, dana, sarana, prasarana) yang wajar. Tentu saja hal ini juga dipengaruhi oleh kualitas masukannya. Logikanya, proses pendidikan yang berkualitas akan menghasilkan produk yang berkualitas pula. Hal ini di perkuat dengan pengertian pendidikan yang tercantum dalam **UU No 20 Tahun 2003** tentang sisdiknas, yaitu usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.

Maka jelaslah Pendidikan merupakan usaha sadar yang terencana untuk menyiapkan peserta didik melalui kegiatan bimbingan, pengajaran dan latihan bagi peranannya dimasa yang akan datang. Dengan pendidikan manusia dapat belajar menghadapi segala problematika yang dihadapi dalam kehidupannya, melalui pendidikan pula manusia dapat mencapai peradaban dan kebudayaan yang tinggi. Begitu pentingnya kebutuhan akan pendidikan, sehingga diperlukan penyelenggaraan pelayanan pendidikan yang sungguh-sungguh.

Untuk mendapatkan lembaga-lembaga pendidikan yang berkualitas diperlukan penertiban. Adapun aspek-aspek yang harus diperhatikan oleh lembaga-lembaga penyelenggara pendidikan demi menunjang penyelenggaraan pendidikan anatara lain:sumber daya manusia (tenaga pendidik) yang professional, kurikulum yang kreatif, sarana dan prasarana yang memadai, manajemen yang berkualitas, serta peran masyarakat juga harus di perhatikan. Program peningkatan kualitas pendidikan harus didukung oleh semua pihak, termasuk para pengelola pendidikan di tingkat pusat, tingkat daerah, tingkat sekolah, dan para guru yang melaksanakan proses pembelajaran di kelas. Kualitas pendidikan kita yang tergolong masih rendah ini diharapkan bisa mendorong semua lembaga pendidikan agar benar-benar ikut berusaha untuk meningkatkan kualitas pendidikan dengan disertai dukungan dari masyarakat.

Manajemen Pendidikan merupakan salah satu bentuk implementasi dari UU Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang memberikan arahan untuk dilakukan pengelolaan pada sistem pendidikan di Indonesia, khususnya untuk pengelolaan satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan menengah menggunakan prinsip standar pelayanan minimal serta didukung dengan manajemen berbasis sekolah. Kebijakan tentang pengelolaan pendidikan tersebut dijelaskan menggunakan produk hukum berupa peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 32 tahun 2013 tentang perubahan atas peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang standar nasional pendidikan. Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria

minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Standar tersebut meliputi standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan, dan standar penilaian pendidikan. Delapan standar nasional kemudian dijelaskan melalui peraturan dan petunjuk yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Agar setiap satuan pendidikan dapat memenuhi kedelapan standar tersebut diperlukan proses evaluasi, akreditasi dan sertifikasi. Tujuannya adalah agar diketahui pencapaian mutu pengelolaan satuan pendidikan sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan.

Kebijakan tentang Standar Nasional Pendidikan tersebut kemudian digunakan sebagai acuan dalam penyusunan pedoman yang lebih operasional, yaitu kebijakan tentang standar pengelolaan pendidikan melalui Permendiknas Nomor 19 Tahun 2007 Tentang Standar Pengelolaan Pendidikan. Standar pengelolaan adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan, kabupaten/kota, provinsi, atau nasional agar tercapai efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pendidikan. Sehingga kemudian diterapkan standar minimal yang harus dimiliki pada pengelolaan satuan pendidikan. Pada hakikatnya kebijakan tersebut merupakan penjabaran sekaligus bentuk operasionalisasi dari peraturan tentang SNP dan UU SPN. Setiap satuan pendidikan diharuskan untuk mengikuti serta memenuhi hal-hal yang terdapat pada Standar Pengelolaan Pendidikan sebagai rujukan dalam mengelola satuan pendidikan masing-masing. Secara umum standar pengelolaan pendidikan memberikan arahan sekaligus bentuk dari manajemen pendidikan atau manajemen berbasis sekolah. Pengelolaan pendidikan di sekolah terdiri dari perencanaan program, pelaksanaan program, evaluasi program dan kepemimpinan kepala sekolah.

Hal ini didukung oleh pendapat Engkoswara dan Komariah (2011: 88) menambahkan makna manajemen pendidikan merupakan suatu penataan bidang garapan pendidikan yang dilakukan melalui aktivitas perencanaan,

pengorganisasian, penyusunan staf, pembinaan, pengkoordinasian, pengkomunikasian, pemotivasian, penganggaran, pengendalian, pengawasam, penilaian, dan pelaporan secara sistematis untuk mencapai tujuan pendidikan secara berkualitas. Selanjutnya Kurniadin & Machali (2012:118) juga menjelaskan , bahwa manajemen pendidikan sebagai seluruh proses kegiatan bersama dalam bidang pendidikan dengan mendayagunakan semua sumber daya yang ada yang dikelola untuk mrncapai tujuan pendidikan. Sumber daya dalam konteks manajemen pendidikan berupa *man* (manusia=gutu, siswa, karyawan), *money* (uang=biaya), *materials* (bahan/ alat-alat pembelajaran), *methods* (teknik/cara), *machines* (mesin/fasilitas), *market* (pasar), dan *minutes* (waktu) yang biasa disebut “7M”.

Mengingat bahwa kondisi satuan pendidikan pada saat ini masih sangat beragam, dan sebagian besar kualitasnya masih berada dibawah SNP, maka perlu dicari strategi untuk mencapai SNP secara bertahap. Upaya ini dilakukan dengan menetapkan Kebijakan berupa Permendiknas Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota yang merupakan tingkat layanan minimal yang harus dipenuhi oleh setiap satuan pendidikan. Oleh karena itu, SPM Pendidikan dapat diartikan sebagai strategi untuk mencapai SNP secara bertahap dan merupakan sasaran antara untuk menuju pemenuhan SNP. Untuk mewujudkan sekolah bermutu yang menerapkan standar nasional pendidikan diperlukan proses evaluasi, akreditasi dan sertifikasi.

Peningkatan mutu sekolah di Indonesia selama ini masih belum menunjukkan hasil yang memuaskan. Rendahnya mutu sekolah ini disebabkan oleh banyak hal, antara lain mutu dan distribusi guru yang masih belum memadai, kurangnya sarana dan prasarana pendidikan, kurikulum yang kurang sesuai, lingkungan belajar di sekolah maupun dalam keluarga dan masyarakat belum mendukung. Mennurut Arifin (2003:210), dasar pendidikan nasional secara tidak langsung mengharuskan kita untuk menyelenggarakan proses pendidikan nasional yang konsisten dan secara integralistik menuju kearah pencapaian tujuan akhir. Terbentuknya manusia Indonesia seutuhnya yang

berkualitas unggul yang berkembang dan tumbuh diatas pola kehidupan yang seimbang antara lahiriah dan batiniyah, antara jasmaniyah dan rohaniyah atau antara kehidupan mental spiritual dan fisik material. Dalam bahasa Islam membentuk insan kamil yang secara homeostatic dapat mengembangkan dirinya dalam pola kehidupan yang *hasanah fiddunya* dan *hasanah fil akhirat*.

Sebagaimana firman Allah SWT dalam Surat Al Isra' Ayat 36

عُولًا عَنْهُ كَانَ أُولَئِكَ كُلُّهُمُ الْفُؤَادُ وَالْبَصِيرَ السَّمْعَ إِنَّ عِلْمَ بِهِ لَكَ لَيْسَ مَا تَقْفُوا وَلَا

﴿٣٦﴾ مَس

36. Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati, semuanya itu akan diminta pertanggungan jawabnya.

Selanjutnya firman Allah SWT dalam surat Almaidah Ayat 2

بَيْنَ وَلَا أَلْفَلَقِيدَ وَلَا أَهْدَى وَلَا أَحْرَامَ الشَّهْرِ وَلَا اللَّهُ شَعْبًا تَحْلُوا أَلَاءَ آمَنُوا الَّذِينَ يَأْتِيهَا
رِمْنَكُمْ وَلَا فَاصْطَادُوا حَلَلْتُمْ وَإِذْ أَوْرِضُونَا رَيْبَهُمْ مِنْ فَضْلًا يَبْتَغُونَ أَحْرَامَ الْبَيْتِ آم
سَى الْبِرِّ عَلَى وَتَعَاوَنُوا اتَّعْتَدُوا وَأَنْ أَحْرَامَ الْمَسْجِدِ عَنِ صَدُّوكُمْ أَنْ قَوْمٍ شَنَّانُ تَج
﴿٢﴾ الْعِقَابِ شَدِيدُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ وَاتَّقُوا أَلْعُدْوَانَ الْإِثْمِ عَلَى تَعَاوَنُوا وَلَا وَالْتَقُوا

2. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang had-ya, dan binatang-binatang qalaa-id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keridhaan dari Tuhannya dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, maka bolehlah berburu. Dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.

Dari kedua ayat diatas dapat diketahui bahwa dalam bertindak sebisa mungkin tidak berniat dengan sengaja melanggar perintah Allah. Sehingga dalam berorganisasi senantiasa bertindak positif, misalnya berbuat jujur, keterbukaan, saling membantu, tidak saling menjatuhkan, menolong atau menemukan solusi jika ada salah satu personal yang mengalami kesulitan, dan tindakan positif lain. Ayat tersebut juga menggambarkan bahwa dalam berorganisasi seseorang harus teliti, hati-hati, punya pengetahuan di bidangnya, mempunyai prinsip yang positif serta kokoh, dan mawas diri. Karena semua yang dia lakukan baik dengan penglihatan, pendengaran, dan bahkan isi hatinya semuanya akan dimintai pertanggung jawaban oleh Allah SWT.

Jika kita lihat pada ayat diatas, tenaga pendidik dan kependidikan harus mempunyai tanggung jawab akan pekerjaannya, melaksanakan pekerjaan dengan jujur dan memiliki pengetahuan akan pekerjaannya. Jika dikaitkan dengan standar pengelolaan pendidikan, dalam pemenuhan standar pengelolaan pendidikan diperlukan tanggung jawab, pengetahuan, jujur dan yang paling penting adalah kerjasama. Dengan kerjasama maka akan tercapai pengelolaan sekolah yang efektif dan merupakan salah satu upaya peningkatan mutu sekolah. Oleh karena itu tenaga pendidik dan kependidikan harus melaksanakan tugasnya semaksimal mungkin. Tujuan dari pendidik dan kependidikan dengan sekolah pun harus sesuai, maka akan terpenuhi standar nasional pendidikan, khususnya standar pengelolaan pendidikan dalam peningkatan mutu sekolah. Sehingga berorganisasi dalam lembaga pendidikan bukanlah hal yang gampang dengan tanggung jawabnya, karena dinamisnya perkembangan lembaga pendidikan menyesuaikan dengan keadaan peserta didik dan kultur masyarakat.

Berdasarkan pada observasi awal yang peneliti lakukan, diketahui bahwa sekolah yang akan menjadi tempat penelitian tersebut yaitu tepatnya di SMPN 4 Batusangkar. Kenyataan dilapangan dari hasil observasi awal dan wawancara yang peneliti lakukan dengan kepala sekolah dan TU di SMPN 4 Batusangkar hari sabtu 11 April 2017 diperoleh informasi dari

hasil pengamatan bahwa keadaan saat peneliti berada di sekolah dimana segi fisik lingkungan sekolahnya bersih, aman, nyaman, rindang serta indah bila dipandang oleh mata. Dari segi sosialnya yang peneliti lihat saat berada di sekolah yaitu komunikasinya, baik antara kepala sekolah dengan TU, guru sesama guru dan guru dengan siswanya terlihat akrab dan menyenangkan. Dimana yang peneliti lihat antara guru dengan guru saat bertemu saling sapa menyapa, saling senyum dan saling bicara serta ketawa gembira. Saat siswa bertemu dengan guru mereka menyapa gurunya satu persatu dan antara sesama siswa mereka terlihat akrab. Dari segi struktur organisasi sudah terlihat adanya penanggung jawab-penanggung jawab yang jelas sesuai dengan kegiatan yang ada di sekolah ini.

Berdasarkan hasil wawancara awal yang peneliti lakukan dengan kepala tata usaha di SMPN 4 Batusangkar diperoleh informasi bahwasannya masih rendahnya mutu sekolah di SMPN 4 Batusangkar, karena masih ada siswa yang putus sekolah, siswa yang tidak lulus, kurangnya sarana dan prasarana sekolah, prestasi siswa pun masih kurang di SMPN 4 Batusangkar. Hal ini disebabkan kurangnya wadah bagi siswa dalam mengembangkan bakat dan minatnya serta kurangnya motivasi terhadap siswa. Hal ini berarti kurangnya pengelolaan sekolah. Sehingga banyak masalah yang dapat membuat rendahnya mutu sekolah di SMPN 4 Batusangkar. Kepala SMPN 4 Batusangkar Kecamatan Limo Kaum Kabupaten Tanah Datar juga telah berkeinginan untuk memenuhi standar nasional pendidikan, salah satunya standar pengelolaan pendidikan yang sangat berhubungan dengan tugas dari kepala sekolah. Salah satunya dengan memenuhi standar pengelolaan untuk meningkatkan mutu sekolah.

Hal ini didukung oleh data RKS sekolah yang didalamnya berisi bahwa penyelenggaraan pendidikan di SMP Negeri 4 Batusangkar telah berjalan dengan baik, dan telah memanfaatkan sumberdaya yang ada. Proses kegiatan belajar mengajar cukup kondusif, didukung kondisi lokasi yang tenang jauh dari pusat keramaian dan kesibukan ekonomi. Namun hasil outputnya belum seperti yang diharapkan. Kegiatan akademik dan non

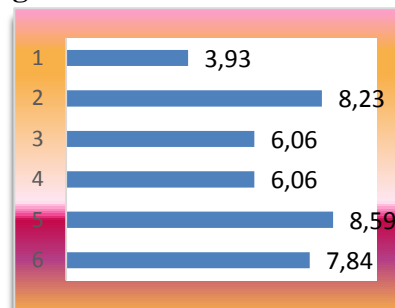
akademik belum mencapai prestasi yang optimal. Oleh karena itu sekolah senantiasa selalu berupaya meningkatkan mutu lulusannya melalui berbagai cara dan strategi, antara lain : 1) Peningkatan mutu proses pembelajaran, 2) Peningkatan mutu standar isi/kurikulum, 3) Peningkatan mutu sistem evaluasi, 3) Peningkatan Implementasi MBS, 4) Peningkatan kompetensi guru melalui pelatihan-pelatihan, workshop, MGMP, seminar dll, 5) Peningkatan fasilitas / sarana prasarana belajar, 6) Efisiensi dan transparansi penggunaan dana. Selanjutnya juga dijelaskan dalam RKS sekolah bahwa Harapan sekolah pada akhir tahun pelajaran 2018/2019 adalah meningkatnya mutu lulusan baik akademik maupun non akademik sesuai standar nasional yang telah ditetapkan pemerintah. Hal tersebut akan bisa terwujud manakala tenaga pendidik maupun non kependidikan mampu meningkatkan kompetensinya dalam rangka pelayanan pendidikan kepada siswa; Manajemen Berbasis Sekolah terselenggara memenuhi azas kemandirian, fleksibilitas, akuntabilitas, partisipatif dan transparansi; Penyelenggaraan proses belajar mengajar partisipatif, aktif, kreatif, efektif dan menyenangkan ; penyediaan sarana dan prasarana pembelajaran memadai (Sumber: data RKS SMPN 4 Batusangkar, 11 April 2017).

Data ini didukung dari hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan Kepala TU di SMPN 4 Batusangkar diperoleh informasi bahwasannya perolehan nilai akreditasi di SMPN 4 Batusangkar adalah “B” kategori baik. Jika di bandingkan dengan perolehan nilai akreditasi di SMP di tanah datar, rata-rata perolehan nilai akreditasinya adalah “A”. Maka ini menandakan masih rendahnya mutu sekolah di SMPN 4 Batusangkar (Erlina Guswara, Wawancara pra-riset, 11 April 2017)

Berikut data mengenai data kualitas layanan dari standar nasional pendidikan di SMPN 4 Batusangkar, sebagai berikut:

Tabel 1.1
Kualitas layanan berdasarkan standar nasional pendidikan
di SMPN 4 Batusangkar

No	STANDAR	Rating
1	STANDAR KOMPETENSI LULUSAN	3,93
2	STANDAR ISI	8,23
3	STANDAR PROSES	6,06
4	STANDAR PENILAIAN	6,06
5	STANDAR PTK	8,59
6	STANDAR PENGELOLAAN	7,84
SNP		6,93



Deskripsi pencapaian seluruh standar

Dari tabel dan grafik diatas dapat disimpulkan bahwa, pencapaian SNP berada pada rating 6,93. Dari 6 standar yang ada, 3 standar sudah berada diatas rating minimal (6,5), yaitu Standar Isi, Standar PTK, dan Standar Pengelolaan. Namun untuk Standar Kompetensi Lulusan baru berada pada rating 3,93, untuk Standar Proses dan Standar Penilaian baru pada rating 6,06.

Dengan demikian SMPN 4 Batusangkar baru berada pada **kategori Menuju SNP 3**, karena SKL masih berada dibawah rating minimal yaitu 4,67 walaupun 3 Standar sudah berada diatas 6,65.

(Sumber: data SMPN 4 Batusangkar: 2015)

Dari tabel diatas dapat dilihat kualitas layanan berdasarkan standar nasional pendidikan, dan dapat dilihat rendahnya standar kompetensi lulusan di SMPN 4 Batusangkar yang memperoleh rating 3,93. Hal ini menandakan banyak siswa yang tidak lulus dan masih rendah mutu lulusan di SMPN 4 Batusangkar. Tabel ini memperkuat keterangan wawancara dari kepala tata usaha di SMPN 4 Batusangkar. Jika dilihat ada dua standar yang telah memenuhi standar yaitu standar isi dan standar pengelolaan. Suatu lembaga pendidikan wajib memenuhi standar nasional pendidikan. Namun jika dilihat dari tugas kepala sekolah sangat berkaitan dengan standar pengelolaan

pendidikan. Karena kepala sekolah harus mengelola lembaga pendidikan sesuai dengan fungsi manajemen yaitu perencanaan, organizing, actuating, dan controlling (POAC). Dilihat dari fakta diatas, sudah seharusnya sekolah dikelola sesuai dengan standar pengelolaan pendidikan seharusnya. Hal tersebut dikarenakan sekolah merupakan salah satu sarana dalam menunjang keberhasilan ranah pendidikan.

Sebagaimana dijelaskan dalam Permendiknas No 19 tahun 2007, dinyatakan bahwa setiap satuan pendidikan wajib memenuhi standar pengelolaan pendidikan yang berlaku secara nasional. Setiap sekolah harus merumuskan visi sekolah sebagai cita-cita bersama warga sekolah /madrasah dan segenap pihak yang berkepentingan pada masa yang akan datang, mampu memberikan inspirasi, motivasi dan kekuatan pada warga sekolah/madrasah dan segenap pihak yang berkepentingan Sekolah/ Madrasah menyusun tujuan sekolah yang menggambarkan tingkat kualitas yang perlu dicapai dalam jangka menengah empat tahun (Sani, Pramuniati dan Muchtiany, 2015:101-102).

Selanjutnya juga didukung oleh pendapat Makbuloh (2011:223), menjelaskan implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan Pasal 86 Ayat (1) diperlukan badan penjaminan mutu dalam bentuk akreditasi pada setiap jenjang dan satuan pendidikan di Indonesia untuk menentukan kelayakan program dan satuan pendidikan tersebut. Badan yang dipercaya untuk menjamin mutu satuan pendidikan yaitu Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah (BAN-S/M). Melalui BAN-S/M tersebut, mutu sekolah dapat ditentukan perangkatnya. Akan tetapi apakah hasil pengukuran akreditasi yang dilakukan oleh BAN-S/M tersebut dapat dipercayai sebagai ukuran standar yang nyata sesuai dengan apa yang terus berjalan di sekolah tersebut. Hal ini mengundang kajian dan penelitian serius untuk memastikan apakah instrumen akreditasi dan implementasinya dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah yang terkoneksi dengan peningkatan mutu sekolah.

Dari latar belakang masalah diatas, dapat diketahui bahwa perolehan nilai untuk standar pengelolaan sudah berada diatas rating minimal, kategori bagus, namun mutu sekolahnya masih rendah dan perlu dilakukan peningkatan mutu sekolah . Oleh sebabitu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul:“**Implementasi Standar Pengelolaan Pendidikan dalam Peningkatan Mutu Sekolah di SMPN 4 Batusangkar**”

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah peneliti paparkan di atas, Maka fokus penelitian dalam penelitian ini yaitu pada pelaksanaan Standar Pengelolaan sebagai salah satu upaya peningkatan mutu sekolah di SMPN 4 Batusangkar.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan fokus penelitian diatas, maka peneliti dapat merumuskan masalah adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana perencanaan sekolah di SMPN 4 Batusangkar untuk peningkatan mutu sekolah di SMPN 4 Batusangkar ?
2. Bagaimana pelaksanaan program sekolah di SMPN 4 Batusangkar untuk peningkatan mutu sekolah di SMPN 4 Batusangkar ?
3. Bagaimana pelaksanaan pengawasan sekolah di SMPN 4 Batusangkar untuk peningkatan mutu sekolah di SMPN 4 Batusangkar ?
4. Bagaimana kepemimpinan kepala sekolah di SMPN 4 Batusangkar untuk peningkatan mutu sekolah n di SMPN 4 Batusangkar ?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, adapun tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menjelaskan bagaimana perencanaan sekolah di SMPN 4 Batusangkar untuk peningkatan mutu sekolah di SMPN 4 Batusangkar

2. Untuk menjelaskan bagaimana pelaksanaan program sekolah di SMPN 4 Batusangkar untuk peningkatan mutu sekolah di SMPN 4 Batusangkar
3. Untuk menjelaskan bagaimana kepemimpinan kepala sekolah di SMPN 4 Batusangkar untuk peningkatan mutu sekolah di SMPN 4 Batusangkar
4. Untuk menjelaskan bagaimana pelaksanaan pengawasan sekolah di SMPN 4 Batusangkar untuk peningkatan mutu sekolah di SMPN 4 Batusangkar.

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini dilaksanakan dapat dilihat dari dua sisi yaitu:

1. Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan konsep mengenai Bagaimana Implementasi standar pengelolaan dalam peningkatan mutu sekolah di SMPN 4 Batusangkar

2. Praktis

- a. Bagi kepala sekolah bisa mengambil manfaat dari hasil penelitian ini, serta memperbaiki rangkaian kegiatan yang di anggap belum optimal dan sistematis dalam memenuhi standar pengelolaan pendidikan oleh kepala sekolah dalam upaya peningkatan mutu sekolah di SMPN 4 Batusangkar
- b. Bagi peneliti, dapat menambah wawasan dalam bidang penelitian sehingga mengetahui bagaimana implementasi standar pengelolaan pendidikan dalam peningkatan mutu sekolah di SMPN 4 Batusangkar.

F. Definisi Operasional

Peneliti memandang perlu untuk menjelaskan istilah-istilah yang digunakan dan bersifat khas yang melekat pada tulisan ini, istilah tersebut antara lain adalah standar pengelolaan pendidikan dan peningkatan mutu sekolah.

1. Standar Pengelolaan Pendidikan

Standar Pengelolaan Pendidikan terdapat dalam (Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005) Tentang Standar Nasional Pendidikan menjelaskan bahwa Standar pengelolaan adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan, kabupaten/kota, provinsi, atau nasional agar tercapai efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pendidikan. Jadi, Implementasi standar pengelolaan yang dimaksud disini adalah pelaksanaan standar pengelolaan pendidikan oleh SMPN 4 Batusangkar yang meliputi perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan dalam peningkatan mutu lulusan siswa di SMPN 4 Batusangkar Kecamatan Lima Kaum Kabupaten Tanah Datar.

2. Peningkatan Mutu Sekolah

Priansa & Somas (2014:20) menjelaskan pengertian peningkatan mutu sekolah adalah suatu proses yang sistematis yang terus menerus meningkatkan kualitas proses belajar mengajar dan faktor-faktor yang berkaitan dengan itu, dengan tujuan agar menjadi target sekolah dapat dicapai dengan lebih efektif dan efisien. Jadi, peningkatan mutu sekolah merupakan kegiatan perbaikan secara terus menerus agar meningkatkan kualitas sekolah.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Implementasi Standar Pengelolaan Pendidikan

1. Pengertian Implementasi

Implementasi dapat diartikan sebagai pelaksanaan dan penerapan. Menurut Usman (2002:70), implementasi adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan atau adanya mekanisme suatu sistem, implementasi bukan sekedar aktivitas, tapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan. Sedangkan Setiawan (2004:9) berpendapat, implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan proses interaksi antara tujuan dan tindakan untuk mencapainya serta memerlukan jaringan pelaksana, birokrasi yang efektif.

Berdasarkan paparan di atas dapat peneliti simpulkan bahwa Implementasi adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci. Implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap sempurna.

2. Pengertian Standar Pengelolaan Pendidikan

Standar pengelolaan adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan, kabupaten/kota, provinsi, atau nasional agar tercapai efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pendidikan (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013). Standar Pengelolaan Pendidikan pada bagian kesatu tentang standar pengelolaan oleh satuan pendidikan dijelaskan bahwa pengelolaan satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah menerapkan manajemen berbasis sekolah yang ditunjukkan dengan kemandirian, kemitraan, partisipasi, keterbukaan, dan akuntabilitas. Kemudian pada setiap satuan pendidikan dipimpin oleh seorang kepala sekolah dan dibantu minimal oleh satu orang wakil kepala sekolah. Pada

aspek pengambilan keputusan dibagi menjadi keputusan akademik dan non akademik. Untuk pengambilan keputusan secara akademik melalui rapat Dewan Pendidik dipimpin oleh Kepala Satuan Pendidikan, sedangkan keputusan non akademik dilakukan oleh komite sekolah dihadiri kepala satuan pendidikan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 memberikan arahan bahwa setiap satuan pendidikan harus memiliki pedoman yang mengatur tentang kurikulum tingkat satuan pendidikan dan silabus, kalender pendidikan yang menunjukkan aktifitas sekolah secara rinci dengan periode semester, bulanan dan mingguan, struktur organisasi satuan pendidikan, pembagian tugas pendidik, pembagian tugas tenaga kependidikan, peraturan akademik, tata tertib satuan pendidikan, kode etik hubungan warga satuan pendidikan, dan biaya operasional satuan pendidikan.

Jadi, dapat peneliti simpulkan bahwa standar pengelolaan pendidikan adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan, kepemimpinan dan sistem informasi berupa kegiatan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan, kabupaten/kota, atau nasional agar tercapai efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pendidikan. Pengelolaan satuan pendidikan menjadi tanggung jawab kepala satuan pendidikan.

3. Standar Pengelolaan Sekolah

Berdasarkan Permendiknas No 19 tahun 2007, dinyatakan bahwa setiap satuan pendidikan wajib memenuhi standar pengelolaan pendidikan yang berlaku secara nasional. Setiap sekolah harus merumuskan visi sekolah sebagai cita-cita bersama warga sekolah /madrasah dan segenap pihak yang berkepentingan pada masa yang akan datang, mampu memberikan inspirasi, motivasi dan kekuatan pada warga sekolah/madrasah dan segenap pihak yang berkepentingan, dirumuskan atas berbagai masukan dari warga sekolah dan pihak-pihak yang

berkepentingan dan selaras dengan visi institusi di atasnya. Visi dan misi sekolah hendaknya diputuskan dalam rapat dewan pendidik yang dipimpin oleh kepala sekolah dengan memerhatikan masukan dari komite, disosialisasikan pada warga sekolah dan segenap pihak yang berkepentingan, serta ditinjau dan dirumuskan kembali secara berkala sesuai dengan perkembangan dan tantangan masyarakat.

Sekolah/ Madrasah menyusun tujuan sekolah yang menggambarkan tingkat kualitas yang perlu dicapai dalam jangka menengah (empat tahun), mengacu pada visi, misi dan tujuan pendidikan nasional, serta relevan dengan kebutuhan masyarakat. Rencana kerja empat tahunan ini dijadikan dasar pengelolaan sekolah yang ditujukan dengan kemandirian, kemitraan, partisipasi, keterbukaan dan akuntabilitas. Rencana kerja tahunan memuat ketentuan yang jelas mengenai; 1) kesiswaan, 2) kurikulum, 3) struktur organisasi, 4) pembagian tugas diantara guru, 5) pemberian tugas di antara tenaga kependidikan, 6) peraturan akademik, 7) tata tertib sekolah, 8) kode etik sekolah/madrasah, 9) biaya operasional sekolah/madrasah (Sani, Pramuniati dan Muchtiany, 2015:101-102).

Permendiknas nomor 19 tahun 2007 juga mengatur tentang struktur organisasi sekolah/madrasah yang mencakup tentang sistem penyelenggaraan dan administrasi sekolah/madrasah. Pedoman yang mengatur tentang struktur organisasi harus memasukan unsur staf administrasi dengan wewenang dan tanggung jawab yang jelas untuk menyelenggarakan administrasi secara optimal, dievaluasi secara berkala untuk melihat efektifitas mekanisme kerja pengelolaan sekolah.

Pelaksanaan kegiatan sekolah yang sudah ditetapkan namun tidak sesuai dengan rencana, perlu mendapat persetujuan melalui rapat dewan pendidik dan komite sekolah/madrasah. Kepala sekolah/madrasah bertanggung jawabkan pelaksanaan pengelolaan bidang akademik pada rapat dewan pendidik dan bidang non akademik dengan komite sekolah/madrasah, dalam bentuk laporan pada akhir tahun ajaran, yang

disampaikan sebelum penyusunan rencana kerja tahunan berikutnya. Sekolah diharuskan memberikan layanan konseling kepada peserta didik, melaksanakan kegiatan ekstra dan kurikuler untuk peserta didik, melakukan pembinaan prestasi unggulan, dan melakukan pelacakan terhadap alumni (Sani, Pramuniati dan Muchtiany, 2015:102-103).

Menurut Makbulloh (2011:276) menjelaskan standar pengelolaan sekolah/madrasah diukur dengan menggunakan 20 item (101-120) pernyataan tertutup dengan memilih lima jawaban a, b, c, d, atau e yang masing-masing diberi skor 4, 3, 2, 1, dan 0. Beberapa indikator sekolah memiliki standar pengelolaan peringkat mutu tertinggi dalam versi BAN-S/M yaitu: pertama, sekolah merumuskan dan menetapkan visi, mudah dipahami dan sering disosialisasikan. Kedua, sekolah merumuskan dan menetapkan misi lembaga yang sesuai dengan visi. Ketiga, sekolah/madrasah telah merumuskan dan menetapkan tujuan lembaga. Keempat, sekolah/madrasah memiliki rencana kerja tahunan dan rencana kerja jangka menengah dan disosialisasikan kepada warga sekolah/madrasah. Kelima, sekolah/madrasah memiliki pedoman yang mengatur berbagai aspek pengelolaan secara tertulis yang mudah dipahami.

Keenam, sekolah memiliki struktur organisasi yang dipajang dinding dan disertai uraian tugas yang jelas. Ketujuh, sekolah melaksanakan kegiatan sebanyak 76%-100% sesuai rencana kerja tahunan. Kedelapan, sekolah memiliki empat atau lima dokumen kegiatan kesiswaan. Kesembilan, sekolah/madrasah melaksanakan kegiatan pengembangan kurikulum dan pembelajaran. Kesepuluh. Sekolah/Madrasah melaksanakan program pengelolaan pendayagunaan pendidik dan tenaga kependidikan.

Kesebelas, sekolah mengelola sarana dan prasarana pembelajaran. Keduabelas, sekolah mengelola pembiayaan pendidikan. Ketigabelas, sekolah melakukan kegiatan yang mengarah pada penciptaan suasana, iklim, dan lingkungan pembelajaran yang kondusif. Keempatbelas,

sekolah melibatkan masyarakat dan membangun kemitraan dengan lembaga lain yang relevan dalam pengelolaan pendidikan.

Kelimabelas, sekolah melaksanakan program pengawasan yang disosialisasikan kepada pendidik dan tenaga kependidikan. Keenambelas, sekolah melaksanakan evaluasi diri. Ketujuhbelas, sekolah melaksanakan evaluasi kinerja pendidik dan tenaga kependidikan. Kedelapanbelas, sekolah mempersiapkan unsur-unsur pelaksanaan akreditasi. Kesembilanbelas, sekolah memiliki struktur kepemimpinan sesuai standar kepemimpinan sesuai standar pendidik dan tenaga kependidikan. Keduapuluh, sekolah memiliki sistem informasi manajemen untuk mendukung administrasi pendidikan.

Berdasarkan paparan di atas dapat disimpulkan bahwa instrumen yang diberikan oleh pemerintah kepada sekolah ini diisi sesuai ketentuan dan keadaan sekolah. Instrumen ini terdiri dari 20 indikator mengenai pengelolaan sekolah di SMPN 4 Batusangkar. Jangan sampai terjadi kecurangan dalam pengisian instrumen ini karena semuanya akan dipertanggungjawabkan baik dunia maupun akhirat.

4. Kriteria Pemenuhan Standar Pengelolaan Pendidikan

Menurut Sani, Pramuniati dan Muchtiany (2015:108-109), Kriteria pemenuhan standar pengelolaan satuan pendidikan dasar di sajikan pada Tabel

Tabel.2.1
Kriteria pemenuhan standar pengelolaan
satuan pendidikan dasar

Indikator	Deskripsi pemenuhan	Bukti fisik
Visi, misi dan tujuan sekolah sesuai dengan EDS	Visi, misi dan tujuan sekolah mengacu pada SKL serta kebutuhan internal dan eksternal sekolah	1. Laporan EDS 2. Profil sekolah 3. Hasil UN dan US
	Visi dan misi sekolah ditinjau dan dirumuskan kembali secara berkala	Laporan kegiatan <i>review/renstra</i>
Visi, misi dan	Sosialisasi visi, misi dan tujuan	1. Notula rapat

tujuan sekolah dipahami oleh semua warga sekolah	sekolah dilakukan kepada semua warga sekolah	<ol style="list-style-type: none"> 2. Renstra 3. RKS 4. Spanduk,<i>leaflet</i> dan brosur
	Sekolah memiliki rumusan visi dan misi yang dipahami oleh semua komponen sekolah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Renstra 2. Notula rapat 3. Daftar hadir
Rencana kerja sekolah sesuai dengan EDS	Penyusunan RKS memerhatikan pertimbangan komite sekolah dan disahkan oleh dinas pendidikan Kabupaten/Kota atau oleh penyelenggara sekolah bagi sekolah swasta	<ol style="list-style-type: none"> 1. Hasil EDS 2. Notula Rapat 3. Daftar hadir kegiatan
	Penyusunan program peningkatan mutu sekolah berdasarkan pada hasil evaluasi diri dan hasil akreditasi serta kelulusan siswa	<ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan EDS 2. Hasil UN/US 3. Hasil akreditasi
Rencana kerja sekolah berorientasi mutu	Rencana kerja sekolah mendukung pengembangan karier guru	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sk penugasan guru 2. Daftar kegiatan peningkatan mutu guru
Perencanaan sekolah terkait dengan peningkatan mutu	Sekolah memiliki dokumen perencanaan yang berkualitas, mencakup peningkatan PBM, tenaga kependidikan, sarana prasarana yang di jalankan secara konsisten	<ol style="list-style-type: none"> 1. RKT 2. RKS
Suasana organisasi mendukung program sekolah	Semua guru dan komponen sekolah ikut terlibat dalam pelaksanaan program sekolah yang dimuat dalam perencanaan	Laporan kegiatan
	Sekolah menjalin kemitraan dengan lembaga lain untuk mendukung implementasi rencana kerja sekolah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Nota kesepahaman (MOU) 2. Laporan kegiatan kerjasama
Pimpinan melakukan supervisi dan evaluasi sesuai	Program supervisi dan evaluasi meliputi; pemantauan, evaluasi dan tindak lanjut	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokumen rencana dan laporan program

standar		<ul style="list-style-type: none"> kepengawasan 2. Rekap kehadiran guru 3. Rekap kehadiran siswa 4. Laporan supervisi akademik 5. Rencana tindak lanjut hasil supervisi akademik
	Kepala sekolah melakukan evaluasi pendayagunaan tenaga kependidikan pada setiap akhir semester	Laporan supervisi akademik
Pelaksanaan program sekolah orientasi mutu	Sekolah melaksanakan program peningkatan mutu sekolah	<ul style="list-style-type: none"> 1. RKT 2. Program Tahunan
Sekolah memiliki Prosedur Operasional Baku (POB)	Sekolah menyusun pedoman-pedoman pengelolaan sekolah	<ul style="list-style-type: none"> 1. Sk kepala sekolah 2. SOTK 3. Sk Penugasan guru 4. Matrik Kompetensi
	Semua pimpinan, pendidik, dan tenaga kependidikan mempunyai uraian tugas wewenang, dan tanggung jawab yang jelas tentang keseluruhan penyelenggaraan dan administrasi sekolah/madrasah.	<ul style="list-style-type: none"> 1. Hasil PKG 2. Notula Rapat 3. Laporan Kegiatan
Pelaksanaan kegiatan sekolah mengikuti tahap-tahap yang tepat	Pelaksanaan kegiatansekolah terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan	<ul style="list-style-type: none"> 1. RKAS 2. Notula Rapat 3. Laporan Kegiatan
Kegiatan sekolah terkait dengan	Sekolah merealisasikan visi dan misi ke dalam pelaksanaan kegiatan pembelajaran,	<ul style="list-style-type: none"> 1. Laporan kegiatan PPDB

pencapaian visi	pengelolaan PTK, dan pelaksanaan kegiatan kesiswaan	2. Daftar nama siswa yang di terima
Suasana sekolah mendukung pembelajaran	Budaya dan lingkungan sekolah kondusif untuk pembelajaran	1. Tata tertib sekolah 2. Rencana program pendidikan karaktet
Pengelolaan sekolah dilaksanakan secara efektif dan efisien	Kepala sekolah melaksanakan pengelolaan sekolah secara efektif dan efisien untuk peningkatan mutu sekolah	1. Laporan Supervisi kelas 2. Laporan monitoring dan evaluasi
Kepala sekolah menjadi teladan	Kepala sekolah dapat dijadikan teladan bagi semua warga sekolah	Wawancara guru dengan siswa
Pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel	Warga sekolah dapat mengakses laporan pengelolaan keuangan sekolah secara transparan dan akuntabel	1. Website sekolah 2. Laporan keuangan

Sumber:(Muchtiany:2015:108-109)

B. Komponen Standar Pengelolaan Pendidikan

1. Perencanaan Program Pendidikan

a. Pengertian Perencanaan Program Pendidikan

Perencanaan memegang peranan penting dalam ruang lingkup pendidikan karena menjadi penentu dan sekaligus memberi arah terhadap tujuan yang ingin dicapai. Dengan perencanaan yang matang, suatu pekerjaan tidak akan berantakan dan tidak terarah. Perencanaan yang matang dan disusun dengan baik akan memberi pengaruh terhadap ketercapaian tujuan.

Menurut Kurniadin dan Machali (2012:145), inti perencanaan adalah sebuah usaha merancang dan memilih pada waktu sekarang untuk sesuatu yang ingin diwujudkan dimasa yang akan datang (*choosing our desired future today*). Perencanaan dalam konteks pendidikan berarti pemilihan atau penentuan program/strategi/langkah

yang dilakukan untuk mewujudkan tujuan pendidikan yang ditetapkan. Perencanaan pendidikan yang dilakukan pada dasarnya adalah wujud tanggung jawab dari berbagai alternatif pilihan yang ada dalam kehidupan. Setiap pilihan yang diambil pasti mempunyai konsekuensi dari apa yang dipilih. Oleh karena itulah, memilih untuk merencanakan sesuatu dan menyadari akan konsekuensi yang akan hadir merupakan bentuk tanggung jawab kemanusiaan. Dengan demikian perencanaan pendidikan pada hakikatnya adalah sebuah usaha memaksimalkan akibat dari sebab keputusan pilihan yang diambil mengenai kebijakan pendidikan sekarang untuk masa depan dan meminimumkan unsur “kebetulan” atau “kecelakaan” dalam pendidikan.

Sedangkan Engkoswara dan Komariah (2011:132) menjelaskan bahwa perencanaan pendidikan adalah proses menetapkan keputusan yang berkaitan dengan tujuan-tujuan yang akan dicapai, sumber-sumber yang akan diberdayakan, dan teknik/metode yang dipilih secara tepat untuk melaksanakan tindakan selama kurun waktu tertentu agar penyelenggaraan sistem pendidikan dapat dilaksanakan secara efektif, efisien, dan bermutu. Lina (2011), menjelaskan bahwa ada empat persoalan pokok yang di bahas dalam perencanaan pendidikan yaitu sebagai berikut; 1) tujuan apakah yang akan dicapai dengan perencanaan, 2) status posisi sistem pendidikan yang ada, bagaimanakah keadaan yang ada sekarang, 3) kemungkinan alternatif kebijakan dan prioritas untuk mencapai tujuan, 4) strategi penentuan cara yang terbaik untuk mencapai tujuan.

Selanjutnya Afifudin (2005) menjelaskan perencanaan termasuk perencanaan pendidikan bukan hanya sebagai pola dasar (blue-print), melainkan juga merupakan petunjuk dalam pengambilan keputusan tentang cara mencapai tujuan itu. Oleh karena itu perencanaan pendidikan tidak berhenti pada saat tersusunnya dan

disetujui rencananya oleh pengambil keputusan, tetapi erat kaitannya dengan implementasinya.

Dari beberapa pendapat ahli diatas dapat disimpulkan bahwa perencanaan pendidikan merupakan suatu proses mempersiapkan seperangkat keputusan untuk kegiatan-kegiatan dimasa depan yang di arahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan. Perencanaan pendidikan merupakan salah satu fungsi manajemen yang sangat penting. Kegiatan perencanaan ini selalu melekat pada kegiatan hidup sehari-hari baik disadari maupun tidak. Sebuah rencana mempengaruhi sukses dan tidaknya suatu pekerjaan. Maka perencanaan pendidikan merupakan perencanaan berkaitan dengan pendidikan yang meliputi memulai, merancang, menjalani dan mencapai pendidikan.

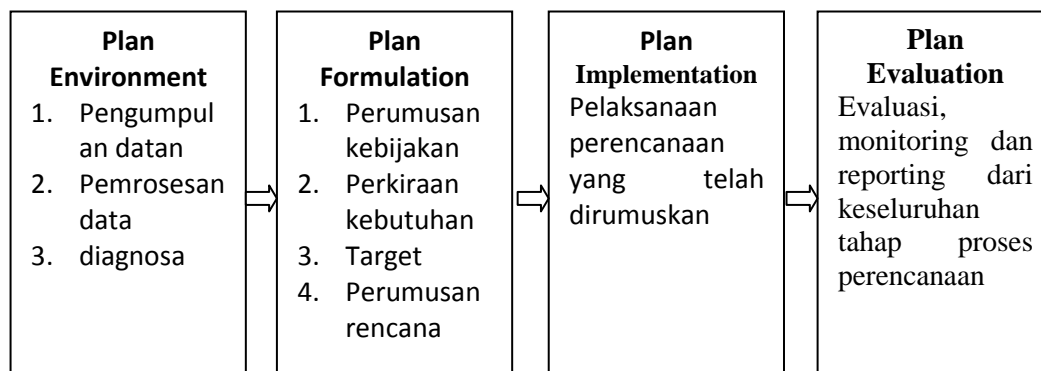
Berdasarkan Permendiknas Nomor 19 Tahun 2007 Tentang Standar Pengelolaan Pendidikan Oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah, perencanaan program ditandai dengan kegiatan berupa perumusan visi, misi, tujuan, serta rencana kerja sekolah. Dalam penyusunan rencana kerja, produk yang dihasilkan adalah dapat berupa rencana jangka menengah yang menggambarkan tujuan yang akan dicapai dalam kurun waktu empat tahun yang terkait dengan mutu lulusan. Kemudian rencana kerja tahunan yang dinyatakan dalam Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah/ Madrasah (RKA-S/M) dilaksanakan berdasarkan rencana jangka menengah. Rencana kerja sekolah setidaknya memuat beberapa aspek, meliputi kesiswaan, kurikulum dan kegiatan pembelajaran, pendidik dan tenaga kependidikan serta pengembangannya, sarana dan parasarana, keuangan dan pembiayaan, budaya dan lingkungan sekolah, peran serta masyarakat dan kemitraan, serta beberapa rencana kerja lain yang mengarah pada peningkatan dan pengembangan mutu.

Jadi, Perencanaan program mencakup visi, misi, tujuan sekolah dan rencana kerja sekolah atau madrasah. Visi sekolah adalah cita-cita bersama warga sekolah dan segenap pihak yang berkepentingan, yang menggambarkan dan memberikan inspirasi, motivasi dan kekuatan untuk kepentingan masa mendatang bagi sekolah. Misi sekolah adalah arah untuk mewujudkan visi yang telah ditetapkan, menjadi dasar program pokok sekolah atau madrasah dengan menekankan pada kualitas layanan pada peserta didik dan mutu lulusan yang diharapkan. Sedangkan tujuan sekolah menggambarkan tingkat kualitas yang perlu dicapai dalam jangka menengah (empat tahunan) yang mengacu pada visi, misi dan tujuan pendidikan nasional serta relevan dengan kebutuhan masyarakat.

b. Proses Perencanaan Pendidikan

Perencanaan merupakan serangkaian proses kegiatan dalam rangka menyiapkan keputusan mengenai apa yang diharapkan terjadi peristiwa, keadaan, suasana, dan lain-lain dan apa yang akan dilakukan. Rangkaian kegiatan tersebut dilaksanakan dengan tujuan agar harapan yang dicita-citakan dapat terwujud dan menjadi kenyataan dalam jangka waktu tertentu (1, 5, 10, 25 tahun, dan seterusnya). Begitu juga dengan perencanaan pendidikan yang merupakan serangkaian proses kegiatan dalam rangka mencapai tujuan pendidikan yang diharapkan pada periode waktu tertentu. Tahapan proses perencanaan dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar 2.1
Tahapan proses perencanaan



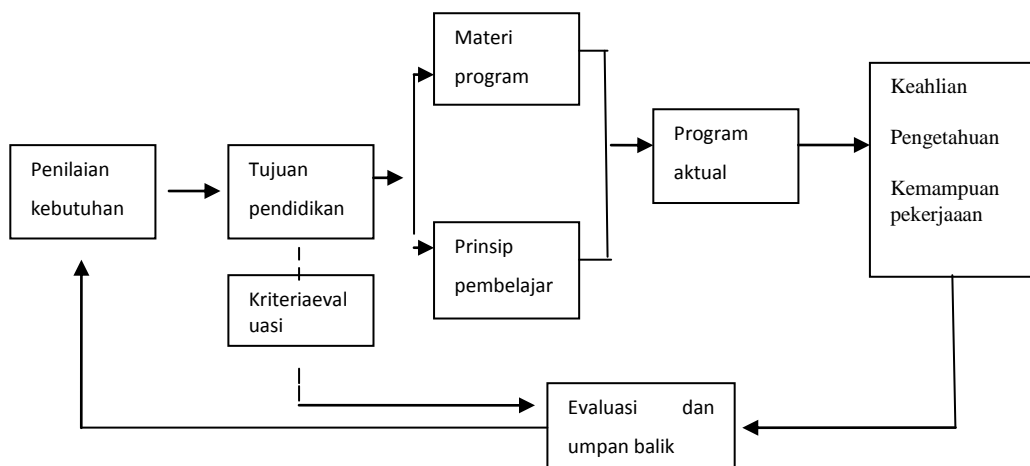
(Sumber: Kurniadin dan Machali, 2012:174)

Perencanaan dalam pendidikan dilaksanakan secara terorganisasi, berkelanjutan dan bersistem. Melalui perencanaan yang bersistem segala kegiatan perencanaan pendidikan akan terwujud dengan baik. Sedangkan tahapan perencanaan yang disusun Tim Peningkatan Mutu SMP Depdiknas (2006) adalah sebagai berikut: 1) Melakukan analisis lingkungan strategi, 2) melakukan analisis situasi untuk mengetahui status situasi pendidikan saat ini, 3) memformulasikan pendidikan yang diharapkan dimasa mendatang, 4) mencari kesenjangan antara butir dua dan tiga, 5) berdasarkan hasil butir 4 disusunlah rencana strategis dan rencana operasional, 6) melaksanakan rencana pengembangan pendidikan kabupaten/kota, 7) melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan rencana dan melakukan evaluasi terhadap hasil rencana pendidikan.

2. Pelaksanaan Rencana Program

Menurut Rivai & Murni (2010:9-10) menjelaskan bahwa pendidikan dapat berjalan sesuai dengan rencana dan mencapai tujuan yang di inginkan maka langkah-langkah yang harus dilakukan adalah

Gambar 2.2
Langkah-langkah Pelaksanaan Rencana Program



(Sumber, Rivai & Murni, 2010:9)

Berdasarkan gambar diatas dapat di jelaskan sebagai berikut:

- a. Penilaian kebutuhan. Penilaian kebutuhan adalah suatu diagnosa untuk menentukan masalah yang di hadapi saat ini dan tantangan di masa mendatang yang harus dapat di penuhi oleh program pendidikan dan pengembangan. Untuk itu ada enam langkah sistematis untuk mengetahui/menilai kebutuhan pendidikan, yaitu:(1), langkah ke-1, mengumpulkan data untuk menentukan lingkup kerja training Need Assesment (TNA), (2) Langkah ke-2, menyusun uraian tugas menjadi sasaran pekerjaan atau kegiatan sasaran yang telah di tentuksn, (3) langkah ke-3, mengukur instrumen untuk mengukur kemampuan kerja, (4) langkah ke-4, melaksanakan pengukuran peringkat kemampuan kerja, (5) langkah ke-5, mengolah data hasil pengukuran dan menafsirkan data hasil penggolongan, dan (6), langkah ke-6, menetapkan penringkat kebutuhan pendidikan. Jadi dengan penilaian kebutuhan ini akan dapat melihat masalah dan tantangan masa depan yang bisa jadi acuan dalam merancang program pendidikan.
- b. Tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan harus dapat memenuhi kebutuhan yang diinginkan oleh lembaga pendidikan serta dapat membentuk tingkah laku yang diharapkan serta kondisi bagaimana hal

tersebut dapat tercapai. Tujuan yang dinyatakan ini kemudian menjadi standar terhadap kinerja individu dan program yang dapat di ukur.

- c. Materi program. Materi program di susun dari estimasi kebutuhan dan tujuan pendidikan. Kebutuhan disini mungkin dalam bentuk pengajaran keahlian khusus menyajikan pengetahuan yang di perlukan, atau berusaha untuk memengaruhi sikap. Apapun materinya program harus dapat memenuhi kebutuhan organisasi dan peserta pendidikan. Jika tujuan pendidikan tidak tercapai maka sumber daya menjadi sia-sia. Peserta didik harus dapat melihat bahwa materi harus dapat menganalisis bahwa materi pendidikan relevan dengan kebutuhan mereka.
- d. Prinsip pembelajaran. Idealnya pendidikan akan lebih efektif jika metode pendidikan disesuaikan dengan jenis peserta didik. Prinsip pembelajaran merupakan suatu pedoman dimana proses belajar akan berjalan lebih efektif. Semakin banyak prinsip ini direfleksikan dalam pendidikan, maka semakin efektif pendidikan tersebut. Prinsip-prinsip ini mengandung unsur partisipasi, penggulungan, relevansi, penggalihan (transfer) dan umpan balik

Jadi, pelaksanaan rencana kerja mengatur berbagai aspek pengelolaan secara tertulis yang mudah dibaca oleh pihak-pihak yang terkait. Dalam merumuskan rencana kerja harus mempertimbangkan visi, misi, dan tujuan sekolah. Kegiatan ini selalu ditinjau dan dirumuskan kembali secara berkala sesuai dengan perkembangan masyarakat.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2007, menjelaskan yang terkait dengan pelaksanaan program pendidikan sebagai berikut:

a. **Pedoman Sekolah/Madrasah**

- 1) Sekolah/Madrasah membuat dan memiliki pedoman yang mengatur berbagai aspek pengelolaan secara tertulis yang mudah dibaca oleh pihak-pihak yang terkait.

- 2) Perumusan pedoman sekolah/madrasah: a) mempertimbangkan visi, misi dan tujuan sekolah/madrasah; b) ditinjau dan dirumuskan kembali secara berkala sesuai dengan perkembangan masyarakat.
- 3) Pedoman pengelolaan sekolah/madrasah meliputi: a) kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP), b) kalender pendidikan/akademik, c) struktur organisasi sekolah/madrasah, d) pembagian tugas di antara guru, e) pembagian tugas di antara tenaga kependidikan, f) peraturan akademik, g) tata tertib sekolah/madrasah, h) kode etik sekolah/madrasah, h) biaya operasional sekolah/madrasah, i) pedoman sekolah/madrasah berfungsi sebagai petunjuk pelaksanaan operasional, f) pedoman pengelolaan KTSP, kalender pendidikan dan pembagian tugas pendidik dan tenaga kependidikan dievaluasi dalam skala tahunan, sementara lainnya dievaluasi sesuai kebutuhan.

b. Struktur Organisasi Sekolah/Madrasah

- 1) Struktur organisasi sekolah/madrasah berisi tentang sistem penyelenggaraan dan administrasi yang diuraikan secara jelas dan transparan.
- 2) Semua pimpinan, pendidik, dan tenaga kependidikan mempunyai uraian tugas, wewenang, dan tanggung jawab yang jelas tentang keseluruhan penyelenggaraan dan administrasi sekolah/madrasah.
- 3) Pedoman yang mengatur tentang struktur organisasi sekolah/madrasah:
 - a) memasukkan unsur staf administrasi dengan wewenang dan tanggungjawab yang jelas untuk menyelenggarakan administrasi secara optimal;
 - b) dievaluasi secara berkala untuk melihat efektifitas mekanisme kerja pengelolaan sekolah;
 - c) diputuskan oleh kepala sekolah/madrasah dengan mempertimbangkan pendapat dari komite sekolah/madrasah.

c. **Pelaksanaan Kegiatan Sekolah/Madrasah**

- 1) Kegiatan sekolah/madrasah:a) dilaksanakan berdasarkan rencana kerja tahunan dan b) dilaksanakan oleh penanggung jawab kegiatan yang didasarkan pada ketersediaan sumber daya yang ada.
- 2) Pelaksanaan kegiatan sekolah/madrasah yang tidak sesuai dengan rencana yang sudah ditetapkan perlu mendapat persetujuan melalui rapat dewan pendidik dan komite sekolah/madrasah.
- 3) Kepala sekolah/madrasah mempertanggungjawabkan pelaksanaan pengelolaan bidang akademik pada rapat dewan pendidik dan bidang nonakademik pada rapat komite sekolah/madrasah dalam bentuk laporan pada akhir tahun ajaran yang disampaikan sebelum penyusunan rencana kerja tahunan berikutnya.

d. **Bidang Kesiswaan**

- 1) Sekolah/Madrasah menyusun dan menetapkan petunjuk pelaksanaan operasional mengenai proses penerimaan peserta didik yang meliputi:Kriteria calon peserta didik:
 - a) SD/MI berusia sekurang-kurangnya 6 (enam) tahun, pengecualian terhadap usia peserta didik yang kurang dari 6 (enam) tahun dilakukan atas dasar rekomendasi tertulis dari pihak yang berkompeten, seperti konselor sekolah/madrasah maupun psikolog;
 - b) SDLB/SMPLB/SMALB berasal dari peserta didik yang memiliki kelainan fisik, emosional, intelektual, mental, sensorik, dan/atau sosial;
 - c) SMP/MTs berasal dari lulusan SD, MI, Paket A atau satuan pendidikan bentuk lainnya yang sederajat;
 - d) SMA/SMK, MA/MAK berasal dari anggota masyarakat yang telah lulus dari SMP/MTs, Paket B atau satuan pendidikan lainnya yang sederajat.

- 2) Penerimaan peserta didik sekolah/madrasah dilakukan:
 - a) Secara obyektif, transparan, dan akuntabel sebagaimana tertuang dalam aturan sekolah/madrasah;
 - b) Tanpa diskriminasi atas dasar pertimbangan gender, agama, etnis, status sosial, kemampuan ekonomi bagi sd/mi, smp/mts penerima subsidi dari pemerintah dan/atau pemerintah daerah;
 - c) Berdasarkan kriteria hasil ujian nasional bagi sma/smk, ma/mak, dan kriteria tambahan bagi smk/mak;
 - d) Sesuai dengan daya tampung sekolah/madrasah.
- 3) Orientasi peserta didik baru yang bersifat akademik dan pengenalan lingkungan tanpa kekerasan dengan pengawasan guru.
 - a) Sekolah/Madrasah:memberikan layanan konseling kepada peserta didik
 - b) melaksanakan kegiatan ekstra dan kokurikuler untuk para peserta didik;
 - c) melakukan pembinaan prestasi unggulan;
 - d) melakukan pelacakan terhadap alumni.

e. **Bidang Kurikulum dan Kegiatan Pembelajaran**

- 1) Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP)
 - a) Sekolah/Madrasah menyusun KTSP.
 - b) Penyusunan KTSP memperhatikan Standar Kompetensi Lulusan, Standar Isi, dan peraturan pelaksanaannya.
 - c) KTSP dikembangkan sesuai dengan kondisi sekolah/madrasah, potensi atau karakteristik daerah, sosial budaya masyarakat setempat, dan peserta didik.
 - d) Kepala Sekolah/Madrasah bertanggungjawab atas tersusunnya KTSP.
 - e) Wakil Kepala SMP/MTs dan wakil kepala SMA/SMK/MA/MAK
 - f) bidang kurikulum bertanggungjawab atas pelaksanaan penyusunan KTSP.

- g) Setiap guru bertanggungjawab menyusun silabus setiap mata pelajaran yang diampunya sesuai dengan Standar Isi, Standar Kompetensi Lulusan, dan Panduan Penyusunan KTSP.
 - h) Dalam penyusunan silabus, guru dapat bekerjasama dengan Kelompok Kerja Guru (KKG), Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP), Lembaga Penjamin Mutu sekolah (LPMP), atau Perguruan Tinggi.
 - i) Penyusunan KTSP tingkat SD dan SMP dikoordinasi, disupervisi, dan difasilitasi oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota sedangkan SDLB, SMPLB, SMALB, SMA dan SMK oleh Dinas Pendidikan Provinsi yang bertanggungjawab di bidang pendidikan. Khusus untuk penyusunan KTSP Pendidikan Agama (PA) tingkat SD dan SMP dikoordinasi, disupervisi, dan difasilitasi oleh Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota, sedangkan untuk SDLB, SMPLB, SMALB, SMA dan SMK oleh Kantor Wilayah Departemen Agama.
 - j) Penyusunan KTSP tingkat MI dan MTs dikoordinasi, disupervisi, dan difasilitasi oleh Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota, sedangkan MA dan MAK oleh Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi.
- f. **Bidang Pendidik dan Tenaga Kependidikan**
- 1) Sekolah/Madrasah menyusun program pendayagunaan pendidik dan tenaga kependidikan.
 - 2) Program pendayagunaan pendidik dan tenaga kependidikan:
 - a) Disusun dengan memperhatikan Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
 - b) Dikembangkan sesuai dengan kondisi sekolah/madrasah, termasuk pembagian tugas, mengatasi bila terjadi kekurangan tenaga, menentukan sistem penghargaan, dan pengembangan

profesi bagi setiap pendidik dan tenaga kependidikan serta menerapkannya secara profesional, adil, dan terbuka.

- c) Pengangkatan pendidik dan tenaga kependidikan tambahan dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang ditetapkan oleh penyelenggara sekolah/madrasah.
- 3) Sekolah/Madrasah perlu mendukung upaya:
- a) Promosi pendidik dan tenaga kependidikan berdasarkan asas kemanfaatan, kepatutan, dan profesionalisme;
 - b) Pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan yang diidentifikasi secara sistematis sesuai dengan aspirasi individu, kebutuhan kurikulum dan sekolah/madrasah;
 - c) Penempatan tenaga kependidikan disesuaikan dengan kebutuhan baik jumlah maupun kualifikasinya dengan menetapkan prioritas;
 - d) Mutasi tenaga kependidikan dari satu posisi ke posisi lain didasarkan pada analisis jabatan dengan diikuti orientasi tugas oleh pimpinan tertinggi sekolah/madrasah yang dilakukan setelah empat tahun, tetapi bisa diperpanjang berdasarkan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, sedangkan untuk tenaga kependidikan tambahan tidak ada mutasi.

g. Bidang Sarana dan Prasarana

- 1) Sekolah/Madrasah menetapkan kebijakan program secara tertulis mengenai pengelolaan sarana dan prasarana.
- 2) Program pengelolaan sarana dan prasarana mengacu pada Standar Sarana dan Prasarana dalam hal:
 - a) Merencanakan, memenuhi dan mendayagunakan sarana dan prasarana pendidikan;
 - b) Mengevaluasi dan melakukan pemeliharaan sarana dan prasarana agar tetap berfungsi mendukung proses pendidikan;
 - c) Melengkapi fasilitas pembelajaran pada setiap tingkat kelas di sekolah/madrasah;

- d) Menyusun skala prioritas pengembangan fasilitas pendidikan sesuai dengan tujuan pendidikan dan kurikulum masing-masing tingkat;
 - e) Pemeliharaan semua fasilitas fisik dan peralatan dengan memperhatikan kesehatan dan keamanan lingkungan.
- 3) Seluruh program pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan disosialisasikan kepada pendidik, tenaga kependidikan dan peserta didik.
- 4) Pengelolaan sarana prasarana sekolah/madrasah:
- a) Direncanakan secara sistematis agar selaras dengan pertumbuhan kegiatan akademik dengan mengacu Standar Sarana dan Prasarana;
 - b) Dituangkan dalam rencana pokok (*master plan*) yang meliputi gedung dan laboratorium serta pengembangannya.
- 5) Pengelolaan perpustakaan sekolah/madrasah perlu:
- a) Menyediakan petunjuk pelaksanaan operasional peminjaman buku dan bahan pustaka lainnya;
 - b) Merencanakan fasilitas peminjaman buku dan bahan pustaka lainnya sesuai dengan kebutuhan peserta didik dan pendidik;
 - c) Membuka pelayanan minimal enam jam sehari pada hari kerja;
 - d) Melengkapi fasilitas peminjaman antar perpustakaan, baik internal maupun eksternal;
 - e) Menyediakan pelayanan peminjaman dengan perpustakaan dari sekolah/madrasah lain baik negeri maupun swasta.
- 6) Pengelolaan laboratorium dikembangkan sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta dilengkapi dengan manual yang jelas sehingga tidak terjadi kekeliruan yang dapat menimbulkan kerusakan.

- 7) Pengelolaan fasilitas fisik untuk kegiatan ekstra-kurikuler disesuaikan dengan perkembangan kegiatan ekstra-kurikuler peserta didik dan mengacu pada Standar Sarana dan Prasarana.

h. Bidang Keuangan dan Pembiayaan

- 1) Sekolah/Madrasah menyusun pedoman pengelolaan biaya investasi dan operasional yang mengacu pada Standar Pembiayaan.
- 2) Pedoman pengelolaan biaya investasi dan operasional Sekolah/Madrasah mengatur:
 - a) Sumber pemasukan, pengeluaran dan jumlah dana yang dikelola;
 - b) Penyusunan dan pencairan anggaran, serta penggalangan dana di luar dana investasi dan operasional;
 - c) Kewenangan dan tanggungjawab kepala sekolah/madrasah dalam membelanjakan anggaran pendidikan sesuai dengan peruntukannya;
 - d) Pembukuan semua penerimaan dan pengeluaran serta penggunaan anggaran, untuk dilaporkan kepada komite sekolah/madrasah, serta institusi di atasnya.
- 3) Pedoman pengelolaan biaya investasi dan operasional sekolah/madrasah diputuskan oleh komite sekolah/madrasah dan ditetapkan oleh kepala sekolah/madrasah serta mendapatkan persetujuan dari institusi di atasnya.
- 4) Pedoman pengelolaan biaya investasi dan operasional sekolah/madrasah disosialisasikan kepada seluruh warga sekolah/madrasah untuk menjamin tercapainya pengelolaan dana secara transparan dan akuntabel.

i. Budaya dan Lingkungan Sekolah/Madrasah

- 1) Sekolah/Madrasah menciptakan suasana, iklim, dan lingkungan pendidikan yang kondusif untuk pembelajaran yang efisien dalam prosedur pelaksanaan.
- 2) Prosedur pelaksanaan penciptaan suasana, iklim, dan lingkungan pendidikan:
 - a) Berisi prosedur tertulis mengenai informasi kegiatan penting minimum yang akan dilaksanakan;
 - b) Memuat judul, tujuan, lingkup, tanggung jawab dan wewenang, serta penjelasannya;
 - c) Diputuskan oleh kepala sekolah/madrasah dalam rapat dewan pendidik.
- 3) Sekolah/Madrasah menetapkan pedoman tata-tertib yang berisi:
 - a) Tata tertib pendidik, tenaga kependidikan, dan peserta didik, termasuk dalam hal menggunakan dan memelihara sarana dan prasarana pendidikan;
 - b) Petunjuk, peringatan, dan larangan dalam berperilaku di sekolah/madrasah, serta pemberian sanksi bagi warga yang melanggar tata tertib.
- 4) Tata tertib sekolah/madrasah ditetapkan oleh kepala sekolah/madrasah melalui rapat dewan pendidik dengan mempertimbangkan masukan komite sekolah/madrasah, dan peserta didik.
- 5) Sekolah/Madrasah menetapkan kode etik warga sekolah/madrasah yang memuat norma tentang:
 - a) Hubungan sesama warga didalam lingkungan sekolah/madrasah dan hubungan antara warga sekolah/madrasah dengan masyarakat;
 - b) Sistem yang dapat memberikan penghargaan bagi yang mematuhi dan sanksi bagi yang melanggar.

- 6) Kode etik sekolah/madrasah ditanamkan kepada seluruh warga sekolah/madrasah untuk menegakkan etika sekolah/madrasah.
- 7) Sekolah/Madrasah perlu memiliki program yang jelas untuk meningkatkan kesadaran beretika bagi semua warga sekolah/madrasah.
- 8) Kode etik sekolah/madrasah yang mengatur peserta didik memuat norma untuk:
 - a) Menjalankan ibadah sesuai dengan agama yang dianutnya;
 - b) Menghormati pendidik dan tenaga kependidikan;
 - c) Mengikuti proses pembelajaran dengan menjunjung tinggi ketentuan
 - d) Pembelajaran dan mematuhi semua peraturan yang berlaku;
 - e) Memelihara kerukunan dan kedamaian untuk mewujudkan harmoni sosial di antara teman;
 - f) Mencintai keluarga, masyarakat, dan menyayangi sesama;
 - g) Mencintai lingkungan, bangsa, dan negara; serta
 - h) Menjaga dan memelihara sarana dan prasarana, kebersihan, ketertiban, keamanan, keindahan, dan kenyamanan sekolah/madrasah.
- 9) Peserta didik dalam menjaga norma pendidikan perlu mendapat bimbingan dengan keteladanan, pembinaan dengan membangun kemauan, serta pengembangan kreativitas dari pendidik dan tenaga kependidikan.
- 10) Kode etik sekolah/madrasah yang mengatur guru dan tenaga kependidikan memasukkan larangan bagi guru dan tenaga kependidikan, secara perseorangan maupun kolektif, untuk:
 - a) Menjual buku pelajaran, seragam/bahan pakaian sekolah/madrasah, dan/atau perangkat sekolah lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung kepada peserta didik;
 - b) Memungut biaya dalam memberikan bimbingan belajar atau les kepada peserta didik;

- c) Memungut biaya dari peserta didik baik secara langsung maupun tidak langsung yang bertentangan dengan peraturan dan undang-undang;
- d) Melakukan sesuatu baik secara langsung maupun tidak langsung yang mencederai integritas hasil Ujian Sekolah/Madrasah dan Ujian Nasional.

11) Kode etik sekolah/madrasah diputuskan oleh rapat dewan pendidik dan ditetapkan oleh kepala sekolah/madrasah.

j. Peranserta Masyarakat dan Kemitraan Sekolah/Madrasah

- 1) Sekolah/Madrasah melibatkan warga dan masyarakat pendukung sekolah/madrasah dalam mengelola pendidikan.
- 2) Warga sekolah/madrasah dilibatkan dalam pengelolaan akademik.
- 3) Masyarakat pendukung sekolah/madrasah dilibatkan dalam pengelolaan non-akademik.
- 4) Keterlibatan peranserta warga sekolah/madrasah dan masyarakat dalam pengelolaan dibatasi pada kegiatan tertentu yang ditetapkan.
- 5) Setiap sekolah/madrasah menjalin kemitraan dengan lembaga lain yang relevan, berkaitan dengan input, proses, output, dan pemanfaatan lulusan
- 6) Kemitraan sekolah/madrasah dilakukan dengan lembaga pemerintah atau non-pemerintah.
- 7) Kemitraan SD/MI/SDLB atau yang setara dilakukan minimal dengan SMP/MTs/SMPLB atau yang setara, serta dengan TK/RA/BA atau yang setara di lingkungannya.
- 8) Kemitraan SMP/MTs/SMPLB, atau yang setara dilakukan minimal dengan SMA/SMK/SMALB, MA/MAK, SD/MI atau yang setara, serta dunia usaha dan dunia industri.
- 9) Kemitraan SMA/SMK, MA/MAK, atau yang setara dilakukan minimal dengan perguruan tinggi, SMP/MTs, atau yang setara, serta dunia usaha dan dunia industri di lingkungannya.

- 10) Sistem kemitraan sekolah/madrasah ditetapkan dengan perjanjian secara tertulis.

3. Pengawasan dan Evaluasi

a. Pengertian Pengawasan

Pengawasan dan evaluasi merupakan dua hal yang sangat penting dalam pengelolaan pendidikan. Dalam pengawasan juga harus dilakukan evaluasi dan begitupula dalam kegiatan evaluasi harus ada juga pengawasan. Hal ini untuk tidak terjadinya kekeliruan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Menurut Rivai & Murni (2010:817), menjelaskan bahwa sebagai tenaga kependidikan, kedudukan pengawas sangat jelas dan tegas di lembaga pendidikan. Yang dimaksud dengan tenaga kependidikan terdiri atas: guru, pengelola satuan pendidikan, pustakawan, laboratorium, teknisi sumber belajar, dan penguji.

Pengawas (Supervisor) adalah salah satu tenaga kependidikan, yang bertugas memberikan pengawasan agar tenaga kependidikan (guru, rektor, dekan, ketua program, direktur kepala sekolah, personel lainnya di sekolah) dapat menjalankan tugasnya dengan baik. Pengawas diberi tugas, tanggung jawab dan wewenang secara penuh untuk melakukan pengawasan dengan memberikan penilaian dan pembinaan dari segi teknis pendidikan dan administrasi pada satuan pendidikan.

Kedudukan pengawas sangat strategis dan akan memengaruhi mutu sekolah secara keseluruhan. Pengawas bersifat fungsional dan bertanggung jawab terhadap terjadinya proses pembelajaran, pendidikan dan bimbingan di lingkungan persekolahan pada berbagai jenjang dan jenis pendidikan. Fungsinya yang cukup strategis itu akan dapat meningkatkan proses pembelajaran dan bimbingan yang dilakukan oleh guru sehingga proses pendidikan akan berlangsung secara efektif, terutama di lingkungan pendidikan.

Tugas terpenting pengawas adalah memberikan berbagai alternatif pemecahan masalah dalam pembelajaran. Bila terjadi sesuatu yang timbul atau muncul kepermukaan yang dapat mengganggu proses belajar mengajar maka kehadiran pengawas bersifat fungsional untuk melakukan perbaikan. Oleh karena itu pemberdayaan pengawas diperlukan untuk meningkatkan fungsinya sebagai motivator, fasilitator dan sekaligus katalisator pengajaran.

Pengawasan diperlukan dalam peningkatan mutu sekolah . Asumsi ini didasarkan atas kenyataan bahwa setiap orang bekerja memerlukan penghargaan, dorongan dan lain sebagainya dari orang lain. Jika saat ini seseorang malas, tetapi karena didorong oleh orang lain ia termotivasi kembali untuk melakukan sesuatu. Tugas pengawas salah satunya adalah memberikan dorongan agar tenaga kependidikan baik guru, kepala sekolah dan personel lainnya di sekolah, termotivasi untuk berkinerja.

Dalam mengukur keberhasilan suatu program diperlukan evaluasi yang komprehensif sehingga diketahui mana program yang banyak masalahnya, dan mana yang tidak. Apa penyebab suatu program kurang tercapai dan apa langkah profesional yang dilakukan mengatasi hal tersebut. Langkah-langkah pro aktif harus dilakukan untuk membina tenaga kependidikan itu menuju arah yang berkinerja tinggi. Dalam hal ini, pengawas pendidikan memiliki kemampuan untuk meningkatkan kinerja tenaga kependidikan, pengawas pendidikan bersifat fungsional dalam memberikan layanan bantuan bagi personel sekolah di lingkungan persekolahan (Rivai & Murni , 2010:818).

Menurut Kurniadin dan Machali (2012:367), pengawasan adalah suatu kegiatan untuk mendapatkan kepastian tentang pelaksanaan program atau pekerjaan/kegiatan yang sedang atau telah dilakukan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan. Kegiatan pengawasan pada dasarnya untuk membandingkan kondisi yang ada

dengan yang seharusnya terjadi. Kegiatan pengawasan konteks manajemen dilakukan oleh seorang manajer dengan tujuan untuk mengendalikan perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), pengarahan (*directing*), dan pengawasan (*controlling*) yang telah diformat dalam suatu program. Dari pengawasan ini, kemudian dilanjutkan dengan kegiatan penilaian dan pemantauan program serta perumusam langkah pencapaian tujuan yang akan dicapai.

Sedangkan Engkoswara dan Komariah (2010:219) menjelaskan pengawasan merupakan proses untuk mengetahui ada tidaknya penyimpangan dalam pelaksanaan rencana agar segera dilakukan upaya perbaikan sehingga dapat memastikan bahwa aktivitas yang dilaksanakan secara riil merupakan aktifitas yang sesuai dengan apa yang direncanakan.

Berdasarkan jabaran diatas dapat disimpulkan bahwa keberadaan pengawas pada lembaga pendidikan memberikan bantuan kepada tenaga kependidikan dalam menyelesaikan masalah-masalah yang berkaitan dengan pendidikan. Serta untuk mengukur keberhasilan program harus dilakukan evaluasi, maka evaluasi ini juga perlu bantuan dari pengawas sekolah. Hal ini agar tidak terjadi kekeliruan dan masalah yang berkepanjangan. Sehingga dapat dilakukan perbaikan untuk masa yang akan datang.

b. Program Pengawasan dan Evaluasi diri

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2007, menjelaskan yang terkait sebagai berikut:

- 1) Program Pengawasan
 - a) Sekolah/Madrasah menyusun program pengawasan secara obyektif, bertanggung jawab dan berkelanjutan.

- b) Penyusunan program pengawasan di sekolah/madrasah didasarkan pada Standar Nasional Pendidikan.
- c) Program pengawasan disosialisasikan ke seluruh pendidik dan tenaga kependidikan.
- d) Pengawasan pengelolaan sekolah/madrasah meliputi pemantauan, supervisi, evaluasi, pelaporan, dan tindak lanjut hasil pengawasan.
- e) Pemantauan pengelolaan sekolah/madrasah dilakukan oleh komite sekolah/madrasah atau bentuk lain dari lembaga perwakilan pihak-pihak yang berkepentingan secara teratur dan berkelanjutan untuk menilai efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas pengelolaan.
- f) Supervisi pengelolaan akademik dilakukan secara teratur dan berkelanjutan oleh kepala sekolah/madrasah dan pengawas sekolah/madrasah.
- g) Guru melaporkan hasil evaluasi dan penilaian sekurang-kurangnya setiap akhir semester yang ditujukan kepada kepala sekolah/madrasah dan orang tua/wali peserta didik.
- h) Tenaga kependidikan melaporkan pelaksanaan teknis dari tugas masing-masing sekurang-kurangnya setiap akhir semester yang ditujukan kepada kepala sekolah/madrasah. kepala sekolah/madrasah, secara terus menerus melakukan pengawasan pelaksanaan tugas tenaga kependidikan.
- i) Kepala sekolah/madrasah melaporkan hasil evaluasi kepada komite sekolah/madrasah dan pihak-pihak lain yang berkepentingan sekurang-kurangnya setiap akhir semester.
- j) Pengawas sekolah melaporkan hasil pengawasan di sekolah kepada bupati/walikota melalui Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota yang bertanggung jawab di bidang pendidikan dan sekolah yang bersangkutan, setelah dikonfirmasi pada sekolah terkait.

- k) Pengawas madrasah melaporkan hasil pengawasan di madrasah kepada Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota dan pada madrasah yang bersangkutan, setelah dikonfirmasi pada madrasah terkait.
 - l) Setiap pihak yang menerima laporan hasil pengawasan menindaklanjuti laporan hasil pengawasan tersebut dalam rangka meningkatkan mutu sekolah/madrasah, termasuk memberikan sanksi atas penyimpangan yang ditemukan.
 - m) Sekolah/Madrasah mendokumentasikan dan menggunakan hasil pemantauan, supervisi, evaluasi, dan pelaporan serta catatan tindak lanjut untuk memperbaiki kinerja sekolah/madrasah, dalam pengelolaan pembelajaran dan pengelolaan secara keseluruhan.
- 2) Evaluasi Diri
- a) Sekolah/Madrasah melakukan evaluasi diri terhadap kinerja sekolah/madrasah.
 - b) Sekolah/Madrasah menetapkan prioritas indikator untuk mengukur, menilai kinerja, dan melakukan perbaikan dalam rangka pelaksanaan Standar Nasional Pendidikan.
 - c) Sekolah/Madrasah melaksanakan:
 - (1) Evaluasi proses pembelajaran secara periodik, sekurang-kurangnya dua kali dalam setahun, pada akhir semester akademik;
 - (2) Evaluasi program kerja tahunan secara periodik sekurang-kurangnya satu kali dalam setahun, pada akhir tahun anggaran sekolah/madrasah.
 - (3) Evaluasi diri sekolah/madrasah dilakukan secara periodik berdasar pada data dan informasi yang sah.
 - d) Evaluasi dan Pengembangan KTSP
 - Proses evaluasi dan pengembangan KTSP dilaksanakan secara

- (1) Komprehensif dan fleksibel dalam mengadaptasi kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang mutakhir;
 - (2) Berkala untuk merespon perubahan kebutuhan peserta didik dan masyarakat, serta perubahan sistem pendidikan, maupun perubahan sosial;
 - (3) Integratif dan monolitik sejalan dengan perubahan tingkat mata pelajaran;
 - (4) Menyeluruh dengan melibatkan berbagai pihak meliputi: dewan pendidik, komite sekolah/madrasah, pemakai lulusan, dan alumni.
- e) Evaluasi Pendayagunaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan
- (1) Evaluasi pendayagunaan pendidik dan tenaga kependidikan direncanakan secara komprehensif pada setiap akhir semester dengan mengacu pada Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan,
 - (2) Evaluasi pendayagunaan pendidik dan tenaga kependidikan meliputi kesesuaian penugasan dengan keahlian, keseimbangan beban kerja, dan kinerja pendidik dan tenaga kependidikan dalam pelaksanaan tugas.
 - (3) Evaluasi kinerja pendidik harus memperhatikan pencapaian prestasi dan perubahan-perubahan peserta didik.
- f) Akreditasi Sekolah/Madrasah
- (1) Sekolah/Madrasah menyiapkan bahan-bahan yang diperlukan untuk mengikuti akreditasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - (2) Sekolah/Madrasah meningkatkan status akreditasi, dengan menggunakan lembaga akreditasi eksternal yang memiliki legitimasi.

- (3) Sekolah/Madrasah harus terus meningkatkan kualitas kelembagaannya secara holistik dengan menindaklanjuti saran-saran hasil akreditasi.

Jadi dapat disimpulkan bahwa Penyusunan program pengawasan di sekolah atau madrasah didasarkan pada Standar Nasional Pendidikan dan program pengawasan disosialisasikan keseluruh pendidik dan tenaga kependidikan. Setiap pihak yang menerima laporan hasil pengawasan menindaklanjuti laporan hasil pengawasan tersebut dalam rangka meningkatkan mutu, termasuk memberikan sanksi atas penyimpangan yang ditemukan, mendokumentasikan dan menggunakan hasil pemantauan, supervisi, evaluasi dan laporan serta catatan tindak lanjut untuk memperbaiki kinerja, dalam pengelolaan pembelajaran dan pengelolaan secara keseluruhan.

c. Jenis Pengawasan

Menurut Engkoswara dan Komariah (2011:223), terdapat empat jenis pengawasan yaitu:

1) Pengawasan Melekat

Pengawasan melekat yaitu pengawasan yang dilakukan oleh atasan langsung yang memiliki kekuasaan (power) dilakukan secara terus menerus secara preventif dan represif agar tugas yang diemban bawahan dapat terlaksana secara efektif dan efisien terhindar dari penyimpangan-penyimpangan.

2) Pengawasan Fungsional

Pengawasan Fungsional yaitu pengawasan yang dilaksanakan oleh pihak tertentu yang memahami substansi kerja objek yang diawasi dan ditunjuk khusus untuk melakukan audit secara independen terhadap objek yang diawasi.

3) Pengawasan Masyarakat

Pengawasan masyarakat merupakan pengawasan yang dilakukan masyarakat kepada negara sebagai bentuk sosial control terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan dalam pemerintahan. Pengawasan masyarakat dapat dilakukan melalui pengawasan langsung masyarakat maupun melalui media massa.

4) Pengawasan legislatif

Pengawasan legislatif yaitu pengawasan yang dilakukan oleh DPR/DPRD sebagai lembaga negara yang bertugas mengawasi tindakan pemerintah. Pengawasan jenis ini disebut juga sebagai pengawasan politik yang dilakukan pihak legislatif kepada pemerintah.

Dalam dunia pendidikan, pengawasan mencakup dua kategori yaitu (1) pengawasan yang dilakukan setiap unit manajemen sebagai langkah procedural suatu manajemen program. Pengawasan jenis ini dilaksanakan sebagai upaya pengendalian yang dilakukan manajer agar ia dapat memonitor efektivitas perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan dan dapat mengambil tindakan korektif sesuai kebutuhan. (2) pengawasan yang dilakukan oleh pengawas sekolah sebagai pengawas fungsional dengan menerapkan konsep supervisi yaitu untuk melaksanakan pembinaan terhadap personil sekolah agar mereka dapat melaksanakan tugasnya secara profesional, dan dapat mengembangkan diri secara optimal. Pengawasan jenis ini dilakukan oleh pengawas sekolah sebagai tenaga fungsional yang berfungsi melakukan bantuan profesional (Engkoswara dan Komariah, 2012:223-224).

d. Pengawas dalam Konteks Mutu Pendidikan

Menurut Riva'i dan Murni (2010:868-871) menjelaskan Pengawas dalam konteks mutu pendidikan dibagi menjadi dua bagian yaitu:

1) Pengawas dan Mutu

Telaah terhadap pengawas merupakan telaah yang terkait dengan pendidikan secara keseluruhan. Pengawasan adalah salah satu elemen pendidikan, kedudukannya bersifat strategis dan mempengaruhi penyelenggaraan pendidikan. Penyelenggaraan pendidikan bermutu akan menghasilkan lulusan yang bermutu.

Mutu pendidikan terkait dengan proses pendidikan yang diselenggarakan secara menyeluruh. Oleh karenanya, seluruh komponen yang bertanggungjawab terhadap pendidikan itu, selayaknya melaksanakan tugas pokoknya sehingga kinerjanya tercapai secara utuh dan menyeluruh. Tanpa adanya kinerja yang menyeluruh, maka pencapaian tujuan pendidikan tidak tercapai dengan efektif.

Mutu sebagai tujuan atau hasil akhir yang akan dicapai pendidikan, tidak hanya melibatkan guru sebagai orang yang melakukan interaksi dengan murid, tetapi juga melibatkan tenaga kependidikan lainnya seperti pengawas. Pengawas adalah mitra guru untuk mencapai proses pembelajaran, pengawas mampu memberikan bantuan kepada guru agar proses dan hasil pendidikan menjadi bermutu.

Mutu pendidikan di tempat tertentu merupakan miniatur dari mutu pendidikan secara nasional. Dikatakan demikian karena proses dan hasilnya mencerminkan apa yang terjadi secara nasional. Namun demikian, dalam proses mencapai pendidikan yang bermutu itu, pengawas menjadi bagian dalam meningkatkan mutu. Mutu pengawas akan mempengaruhi mutu guru, mutu guru akan mempengaruhi mutu proses pembelajaran, proses

pembelajaran yang bermutu akan menghasilkan murid yang bermutu, dan pada akhirnya jika semua itu bersinergi akan mempengaruhi mutu pendidikan secara keseluruhan.

2) Mutu sebagai Tuntutan dan Kebutuhan Masyarakat

Kinerja pengawas pendidikan adalah implikasi dari sistem perekrutan yang sesuai dengan kebutuhan terhadap pengawas. Dikatakan demikian karena proses perekrutan yang sesuai dengan kebutuhan akan menghasilkan kinerja yang baik. Proses perekrutan tidak hanya sampai disitu saja, tetapi juga dilakukan berbagai proses pemberdayaan. Pemberdayaan terhadap efektifitas pelaksanaan tugas pengawas dapat dilakukan dengan berbagai cara, namun yang penting adalah diawali dengan sistem perekrutan yang sesuai dengan prosedur dan kebutuhan.

Mutu pendidikan yang dimaksud disini adalah bahwa mereka telah membina dan membimbing personel sekolah yang memerlukannya, seperti guru, kepala sekolah dan personel. Apa yang mereka lakukan terhadap tenaga kependidikan tersebut, ternyata telah mengubah sikap maupun perilaku tenaga kependidikan itu dalam melaksanakan tugasnya. Salah satu indikator keberhasilan seorang pengawas adalah melihat apakah personel sekolah yang dibimbingnya telah berubah ke arah yang lebih baik.

Namun, satu hal yang harus diingat, bahwa yang dimaksud dengan mutu disini bukanlah wujud yang bersifat konkret, tetapi mutu yang dimaksud disini adalah terjadinya perubahan sikap pengelola pendidikan untuk berkinerja sesuai dengan tuntutan kerja atau tugas pokoknya. Oleh karenanya, mutu itu diartikan adanya perubahan sikap dari tidak utuh melaksanakan kerja menjadi utuh dan menyeluruh merealisasi pencapaian tujuan baik secara kuantitatif maupun secara kualitatif.

4. Kepemimpinan

a. Pengertian Kepemimpinan

Pemimpin berasal dari kata “leader” dan kepemimpinan berasal dari kata “leadership”. Pemimpin merupakan orang yang berorientasi pada hasil, hasil akan diperoleh jika pemimpin mengetahui apa yang diinginkan. Kartono (2008), menjelaskan bahwa pemimpin adalah seorang pribadi yang memiliki superioritas tertentu, sehingga dia memiliki kewibawaan dan kekuasaan untuk menggerakkan orang lain melakukan usaha bersama untuk mencapai tujuan tertentu.

Menurut Tim Dosen Administrasi Pendidikan Universitas Indonesia (2014:125) Kepemimpinan berarti kemampuan dan kesiapan yang dimiliki oleh seseorang untuk dapat mempengaruhi, mendorong, mengajak, menuntun, menggerakkan, mengarahkan, dan kalau perlu memaksa orang atau kelompok akan menerima pengaruh tersebut dan selanjutnya berbuat sesuatu yang dapat membantu tercapainya suatu tujuan tertentu yang telah ditetapkan. Dalam pernyataan lain.

Kemudian Northouse (2003:3) menjelaskan kepemimpinan adalah suatu proses dimana individu mempengaruhi kelompok untuk mencapai tujuan umum (Engkoswara & Komariah, 2011:177). Selanjutnya Dubrin (2001:3), juga menjelaskan kepemimpinan adalah kemampuan untuk menanamkan keyakinan dan memperoleh dukungan dari anggota organisasi untuk mencapai tujuan organisasi (Engkoswara & Komariah, 2011:177). Serta Afifuddin (2015:11) dengan pernyataan lain mengungkapkan bahwa kepemimpinan merupakan suatu masalah yang kompleks dan sulit karena sifat dasar kepemimpinan memang sangat kompleks.

Jadi, kepemimpinan merupakan kemampuan untuk mempengaruhi kelompok dengan berbagai metode yang telah ditetapkan dan memanfaatkan segala sumber daya yang ada menuju pencapaian sasaran secara efektif dan efisien. Kalau diibaratkan

disuatu sekolah kepemimpinan disekolah dipimpin oleh seorang kepala sekolah. Maka oleh karena itu kepemimpinan kepala sekolah yang efektif merupakan kepemimpinan yang mampu memberikan inspirasi dan teladan yang baik bagi guru, staf, dan pegawai lainnya.

b. Teori, Fungsi dan Peran Kepemimpinan

Berikut akan di jabarkan mengenai teori kepemimpinan, fungsi serta peran dari kepemimpinan, sebagai berikut:

1) Teori Kepemimpinan

Kepemimpinan menduduki tempat yang sangat penting dalam supervisi pendidikan. Oleh karena itu juga harus di kaji tentang teori kepemimpinan dalam organisasi. Afifuddin (2015:39) mengatakan bahwa teori-teori pemimpin yang berkembang saat ini adalah:(1) Teori Genetik, seseorang menjadi pemimpin karena sudah ditakdirkan sejak lahir, bukan karena dididik (2) Teori sosial, peran masyarakat sangat penting dalam menciptakan seorang pemimpin (3) Teori Situasional, kepemimpinan bergantung pada situasinya dan melihat kepemimpinan secara psikologis dan sosiologis serta pandangan ekonomi dan politik (4) Teori Ekologis, merupakan penggabungan antara bakat alami dengan pendidikan dan pelatihan yang intensif (5) Teori Sosio-behavioristik, kepemimpinan yang dilahirkan oleh hal-hal berikut:(a) bakat, turunan, dan kecerdasan yang alamiah (b) pengalaman dalam kepemimpinan (c) pembentukan formal dalam organisasi (d) situasi lingkungan (e) pendidikan dan pelatihan (f) kesepakatan sosial dan kontrak politik.

Sedangkan Somad (2014:192), menjelaskan riset serta kajian tentang kepemimpinan telah menghasilkan banyak perspektif (teori) tentang kepemimpinan, dimana perspektif tersebut dapat membantu memahami tentang makna, proses, dan peran kepemimpinan dalam kehidupan organisasi dewasa ini.

Tiga perspektif kepemimpinan menurut Sweeney dan McFarlin (2002) adalah:

a) Berfokus kepada pengikut (follower-centered)

Memusatkan perhatian pada kebutuhan pengikut serta bagaimana respon mereka terhadap pimpinan

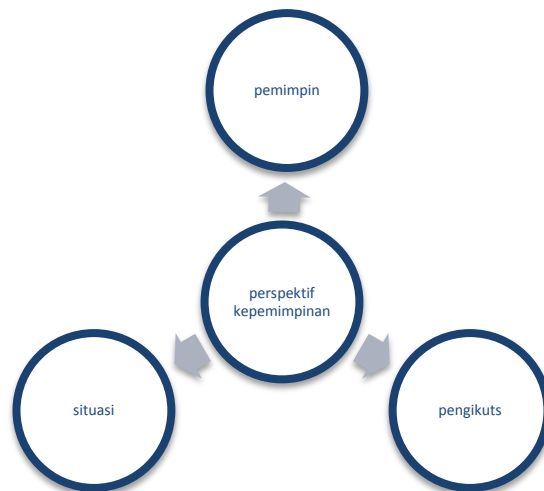
b) Berfokus kepada pemimpin (leader-centered)

Memusatkan perhatian kepada sifat, keterampilan, dan perilaku pemimpin

c) Berfokus kepada situasi (situation-centered)

Memfokuskan perhatian pada variabel situasi serta pengaruhnya pada pemimpin

Gambar 2.2
Perspektif kepemimpinan



(Sumber, Somad, 2014:192)

Jadi teori kepemimpinan sangat banyak ragamnya, namun yang penting disini adalah kemampuan manajer dalam memimpin suatu organisasi dan memanfaatkan teori kepemimpinan tersebut. Seorang pemimpin harus peka terhadap situasi yang sedang di hadapi organisasi tersebut.

2) Peran kepemimpinan

Peran dapat diartikan sebagai kegiatan yang harus dilakukan oleh seorang pemimpin yang akan sangat mempengaruhi kinerja dan bawahannya. Purwanto (1987:65-66) peranan dari pemimpin yaitu, (a) Sebagai pelaksanaan atau executive (b) Sebagai perencana atau planner (c) Sebagai seorang ahli atau expert (d) Mewakili kelompok dalam tindakannya keluar (external group re-presentative (e) Mengawasi hubungan antar anggota kelompok atau controller of internal relationship (f) Bertindak sebagai pemberi ganjaran/ pujian dan hukuman atau purveyor of rewards and punishment (g) Bertindak sebagai wasit dan penengah atau arbitrator and mediator (h) Merupakan lambang kelompok atau symbol of the group (i) Pemegang tanggung jawab para anggota kelompok atau surrogate of individual responsibility (j) Sebagai pencipta atau memiliki cita-cita atau ideologis.

Jika kita teliti ketiga belas peranan kepemimpinan di atas, tepat kiranya apa yang di kemukakan oleh bapak pendidik kita, Ki Hadjar Dewantara, bahwa pemimpin yang baik harus menjalankan peranan seperti berikut:

- a) Ing ngarso asung tuludo
- b) Ing madyo mangun karso
- c) Ing (Tut) wuri andayani

Ketiga macam peranan tersebut sebenarnya telah mencakup semua macam peranan pemimpin seperti di uraikan di muka jika masing-masing diberi arti yang luas. Menyadari adanya peranan-peranan tersebut diatas kiranya sangat berfaedah bagi para kepala sekolah dan pemimpin-pemimpin pendidikan lainnya untuk menjalankan tugasnya dengan lebih berhati-hati dan menuju ke arah yang lebih baik lagi.

3) Fungsi kepemimpinan

Fungsi artinya jabatan (pekerjaan) yang dilakukan atau kegunaan sesuatu hal atau kerja suatu bagian tubuh. Fungsi kepemimpinan berhubungan langsung dengan situasi sosial dalam kehidupan kelompok/organisasi masing-masing menginsyaratkan bahwa setiap pemimpin berada didalam dan bukan diluar situasi itu. Fungsi kepemimpinan memiliki dua dimensi. Pertama, dimensi yang berkenaan dengan tingkat kemampuan menarahkan (direction) dalam tindakan atau aktivitas pemimpin. Kedua, dimensi yang berkenaan dengan tingkat dukungan (support) atau keterlibatan orang-orang yang dipimpin dalam melaksanakan tugas-tugas pokok kelompok atau organisasi (Rivai, 2005:53).

Afifuddin (2015:34) menyatakan bahwa fungsi kepemimpinan memiliki 2 aspek yaitu:(a) fungsi administrasi yaitu mengadakan formulasi kebijaksanaan administrasi dan menyediakan fasilitasnya (b) fungsi sebagai top manajemen, yaitu mengadakan planning, organizing, staffing, directing, commanding, controlling, dan sebagainya.

Sedangkan menurut Kurniadin & Machali (2012:309), menjelaskan bahwa fungsi kepemimpinan dapat dibedakan dalam lima fungsi pokok yaitu (1) fungsi instruksi, (2) fungsi konsultasi, (3) Fungsi Partisipasi, (4) fungsi Delegasi dan (5) fungsi pengendalian. Selanjutnya Engkoswara dan Komariah (2011:180), juga menjelaskan dua fungsi utama kepemimpinan yaitu; (1) yang berkaitan dengan tugas (*task-related*) atau fungsi pemecahan masalah, dan (2) berkaitan dengan pembinaan kelompok atau fungsi sosial (*group maintenance*)

Jadi, dari penjelasan diatas dapat peneliti simpulkan bahwa fungsi kepemimpinan sangat beragam, namun pada intinya fungsi kepemimpinan ini berlandaskan pada fungsi manajemen yaitu, planning, organizing, actuating dan controlling. Semua fungsi

tersebut saling berkaitan dan pada intinya berguna untuk tercapainya tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, kalau dalam suatu sekolah untuk tercapainya visi dan misi sekolah tersebut.

c. Kepemimpinan dalam Kebijakan Pemerintah

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2007, menjelaskan yang terkait sebagai berikut:

- 1) Setiap sekolah/madrasah dipimpin oleh seorang kepala sekolah/madrasah.
- 2) Kriteria untuk menjadi kepala dan wakil kepala sekolah/madrasah berdasarkan ketentuan dalam standar pendidik dan tenaga kependidikan.
- 3) Kepala SMP/MTs/SMPLB dibantu minimal oleh satu orang wakil kepala sekolah/madrasah.
- 4) Kepala SMA/MA dibantu minimal tiga wakil kepala sekolah/madrasah untuk bidang akademik, sarana-prasarana, dan kesiswaan. Sedangkan kepala SMK dibantu empat wakil kepala sekolah untuk bidang akademik, sarana-prasarana, kesiswaan, dan hubungan dunia usaha dan dunia industri. Dalam hal tertentu atau sekolah/madrasah yang masih dalam taraf pengembangan, kepala sekolah/madrasah dapat menugaskan guru untuk melaksanakan fungsi wakil kepala sekolah/madrasah.
- 5) Wakil kepala sekolah/madrasah dipilih oleh dewan pendidik, dan proses pengangkatan serta keputusannya, dilaporkan secara tertulis oleh kepala sekolah/madrasah kepada institusi di atasnya. Dalam hal sekolah/madrasah swasta, institusi dimaksud adalah penyelenggara sekolah/madrasah.
- 6) Kepala dan wakil kepala sekolah/madrasah memiliki kemampuan memimpin yaitu seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang dimiliki, dihayati, dikuasai, dan diwujudkan

dalam melaksanakan tugas keprofesionalan sesuai dengan Standar Pengelolaan Satuan Pendidikan.

- 7) Kepala sekolah/madrasah:
 - a) Menjabarkan visi ke dalam misi target mutu;
 - b) Merumuskan tujuan dan target mutu yang akan dicapai;
 - c) Menganalisis tantangan, peluang, kekuatan, dan kelemahan sekolah/madrasah;
 - d) Membuat rencana kerja strategis dan rencana kerja tahunan untuk pelaksanaan peningkatan mutu;
 - e) Bertanggung jawab dalam membuat keputusan anggaran sekolah/madrasah;
 - f) Melibatkan guru, komite sekolah dalam pengambilan keputusan penting sekolah/madrasah. Dalam hal sekolah/madrasah swasta, pengambilan keputusan tersebut harus melibatkan penyelenggara sekolah/madrasah;
 - g) Berkomunikasi untuk menciptakan dukungan intensif dari orang tua peserta didik dan masyarakat;
 - h) Menjaga dan meningkatkan motivasi kerja pendidik dan tenaga kependidikan dengan menggunakan sistem pemberian penghargaan atas prestasi dan sanksi atas pelanggaran peraturan dan kode etik;
 - i) Menciptakan lingkungan pembelajaran yang efektif bagi peserta didik;
 - j) Bertanggung jawab atas perencanaan partisipatif mengenai pelaksanaan kurikulum;
 - k) Melaksanakan dan merumuskan program supervisi, serta memanfaatkan
 - l) Hasil supervisi untuk meningkatkan kinerja sekolah/madrasah;
 - m) Meningkatkan mutu sekolah ;
 - n) Memberi teladan dan menjaga nama baik lembaga, profesi, dan kedudukan

- o) Sesuai dengan kepercayaan yang diberikan kepadanya;
- p) Memfasilitasi pengembangan, penyebarluasan, dan pelaksanaan visi pembelajaran yang dikomunikasikan dengan baik dan didukung oleh komunitas sekolah/madrasah;
- q) Membantu, membina, dan mempertahankan lingkungan sekolah/madrasah dan program pembelajaran yang kondusif bagi proses belajar peserta didik dan pertumbuhan profesional para guru dan tenaga kependidikan;
- r) menjamin manajemen organisasi dan pengoperasian sumber daya sekolah/madrasah untuk menciptakan lingkungan belajar yang aman, sehat, efisien, dan efektif;
- s) Menjalinkan kerja sama dengan orang tua peserta didik dan masyarakat, dan komite sekolah/madrasah menanggapi kepentingan dan kebutuhan komunitas yang beragam, dan memobilisasi sumber daya masyarakat;
- t) Memberi contoh/teladan/tindakan yang bertanggung jawab.
- u) Kepala sekolah/madrasah dapat mendelegasikan sebagian tugas dan kewenangan kepada wakil kepala sekolah/madrasah sesuai dengan bidangnya.

Jadi dapat disimpulkan bahwa Setiap sekolah atau madrasah dipimpin oleh seorang kepala sekolah atau kepala madrasah. Kepala sekolah atau madrasah dalam satuan pendidikan merupakan pemimpin. Ia mempunyai dua jabatan dan peran penting dalam melaksanakan proses pendidikan. Pertama, kepala sekolah atau madrasah adalah pengelola pendidikan di sekolah. Kedua, kepala sekolah adalah pemimpin formal pendidikan di sekolahnya.

5. Pengembangan Sistem Informasi Manajemen

Perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengawasan khususnya dalam bidang pendidikan merupakan kegiatan manajerial yang

pada hakikatnya merupakan proses pengambilan keputusan. Semua kegiatan tersebut membutuhkan informasi. Informasi yang di butuhkan oleh para manajer, termasuk pengelola pendidikan, di sediakan oleh suatu sistem informasi manajemen- SIM (Management Information System) yaitu “suatu sistem yang menyediakan informasi untuk manajer secara teratur”. Informasi ini di manfaatkan sebagai dasar untuk melakukan pemantauan dan penilaian kegiatan serta hasil yang di capai

Tim Dosen Administrasi Pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia (2009:164), menjelaskan sistem informasi manajemen merupakan keseluruhan jaringan informasi yang ditujukan kepada pembuatan keterangan-keterangan bagi para manajer dan para pengguna lainnya yang berfungsi untuk pengambilan keputusan atau kebutuhan lain dalam cakupan organisasi ataupun perorangan. Informasi itu sendiri merupakan data yang telah di olah, di analisis melalui suatu cara sehingga memiliki arti dan makna (worth). Sedangkan data adalah fakta, atau fenomena yang belum di analisis, seperti jumlah, angka , nama, lambang yang menggambarkan suatu objek, ide, kondisi ataupun situasi.

Apabila data yang masuk telah di proses dan di analisis maka data itu menjadi informasi yang penting, di butuhkan, dan berarti bagi pengambil keputusan, baik yang menyangkut kegiatan organisasi maupun manajerial. Hal-hal yang perlu mendapat perhatian dalam SIM adalah sebagai berikut:1) perlu di identifikasi jenis informasi yang di butuhkan, 2) perlu di tentukan sumber data dan informasi yang dibutuhkan, 3) perlu di tentukan siapa yang membutuhkan informasi dan kapan, 4) perlu di komunikasikan informasi itu secara tepat, terpercaya kepada si pengguna.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2007, menjelaskan yang terkait sebagai berikut:

a. Sekolah/Madrasah:

- 1) Mengelola sistem informasi manajemen yang memadai untuk mendukung administrasi pendidikan yang efektif, efisien dan akuntabel;
 - 2) Menyediakan fasilitas informasi yang efisien, efektif dan mudah diakses;
 - 3) Menugaskan seorang guru atau tenaga kependidikan untuk melayani permintaan informasi maupun pemberian informasi atau pengaduan dari masyarakat berkaitan dengan pengelolaan sekolah/madrasah baik secara lisan maupun tertulis dan semuanya direkam dan didokumentasikan;
- b. Melaporkan data informasi sekolah/madrasah yang telah terdokumentasikan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota. Komunikasi antar warga sekolah/madrasah di lingkungan sekolah/madrasah dilaksanakan secara efisien dan efektif.

Jadi, Sistem informasi dan manajemen secara sederhana dapat diartikan sebagai suatu sistem berbasis komputer yang menyediakan informasi bagi beberapa pemakai dalam rangka mempermudah dan memperlancar kegiatan organisasi. Dengan demikian jelas bahwa SIM yang efektif dapat memperlancar manajemen dalam pencapaian tujuan organisasi. SIM yang efektif yaitu SIM yang dapat berfungsi dalam proses pengambilan keputusan dan pemecahan masalah yang baik. Hal tersebut dapat tercapai dengan disediakannya informasi yang sesuai dengan kebutuhan baik dalam jumlah, kualitas, waktu, maupun biaya. Informasi yang berlebihan dan tidak akurat, dan tidak tepat waktu, selain biayanya mahal, juga tidak berguna

C. Peningkatan Mutu Sekolah

1. Pengertian Mutu

Mutu merupakan sebuah filosofis dan metodologis yang membantu institusi untuk merencanakan perubahan dan mengatur agenda dalam menghadapi tekanan-tekanana eksternal yang berlebihan (Edward Sallis, 2008). Menurut Danim (2007) menyatakan bahwa mutu mengandung makna derajat keunggulan suatu produk atau hasil kerja , baik berupa barang dan jasa. Sedangkan dalam dunia pendidikan barang dan jasa itu bermakna dapat dilihat dan tidak dapat dilihat, tetapi dan dapat dirasakan. Sumayang (2003) menyatakan mutu (quality) adalah tingkat dimana rancangan spesifikasi sebuah produk barang dan jasa sesuai dengan fungsi dan penggunaannya, disamping itu mutu adalah tingkat dimana sebuah produk barang dan jasa sesuai dengan rancangan spesifikasinya (Priansa & Somad).

Berkaitan dengan hal tersebut, mutu pendidikan dapat dilihat dalam dua hal, yakni mengacu pada proses pendidikan dan hasil pendidikan. Proses pendidikan yang bermutu terjadi apabila seluruh komponen pendidikan terlibat dalam proses pendidikan itu sendiri. Faktor-faktor dalam proses pendidikan adalah berbagai input, seperti bahan ajar, metodologi, saran sekolah, dukungan administrasi dan sarana prasarana dan sumber daya lainnya serta penciptaan kondusif (Priansa & Somad, 2014:11-12). Sedangkan B. Suryosubroto (2004) menjelaskan mutu pendidikan dalam konteks hasil pendidikan mengacu pada prestasi yang dicapai oleh sekolah pada setiap kurun waktu tertentu.

Mutu (Harvey dan Green:1993) diartikan sebagai *a relative concept which changed with the context and mean different things to different people*. Hal ini karena pada kenyataannya orang yang sama mungkin akan menerapkan konsep yang berbeda pada saat yang lain. Secara teoritis ada dua pendekatan yang dapat digunakan untuk memahami arti mutu. Pertama, mutu mencerminkan suatu karakteristik yang di miliki. Dalam sudut pandang ini, sesuatu yang bermutu dipandang sebagai

sesuatu yang *excellence/valuable* dan mutu sama sekali tidak mempunyai apa yang di sebut *evaluative sense* (Margeston:1994).

Pada pendekatan kedua yang di sebut pendekatan metafisik (*metaphysical belief*), mutu di pandang sebagai sesuatu yang tidak hanya bisa di analisis secara deskriptif, tetapi juga di analisis secara evaluatif atau sesuatu yang bisa di ukur. Hal ini karena dalam memandang mutu bisa di bedakan secara absolut antara fakta-fakta yang dikaitkan dengan analisis secara evaluatif (Rivai & Murni :2011).

Sedangkan menurut Fattah (2012), menjelaskan mutu adalah kemampuan (*ability*) yang dimiliki oleh suatu produk atau jasa (*services*) yang dapat memenuhi kebutuhan atau harapan, kepuasan (*satisfaction*) pelanggan (*customers*) yang dalam pendidikan di kelompokkan menjadi dua yaitu *internal customer* dan *external customer*. *Internal customer* yaitu siswa atau mahasiswa sebagai pembelajar (*learner*) dan *eksternal customer* yaitu masyarakat. Mutu tidak berdiri sendiri, artinya banyak faktor untuk mencapai dan memelihara mutu.

Dewasa ini semua lembaga pendidikan berorientasi pada mutu. Lembaga pendidikan dikatakan bermutu jika *input*, proses, output dan *outcome* nya dapat memenuhi persyaratan yang dituntut oleh pengguna jasa pendidikan. Bila performannya dapat melebihi persyaratan yang dituntut oleh pengguna (*stakeholder*) maka dikatakan bermutu. Lantaran tuntutan persyaratan yang dikehendaki para pengguna jasa terus berubah dan berkembang kualitasnya, pengertian mutu juga bersifat dinamis, terus berkembang dan terus berada dalam persaingan yang terus menerus (*continuous*).

Jadi dapat disimpulkan mutu merupakan umum “ Mutu” dapat didefinisikan sebagai sebuah proses terstruktur untuk memperbaiki keluaran yang dihasilkan. Selanjutnya mutu dapat juga diartikan sebagai kondisi dinamis yang berhubungan dengan produk, jasa, manusia proses dan lingkungan yang memenuhi dan melebihi harapan.

2. Pengertian Peningkatan Mutu Sekolah

Suatu lembaga pendidikan harus dilakukan upaya perbaikan secara terus menerus untuk mencapai pendidikan yang berkualitas. Maka juga perlu dilakukan peningkatan mutu di sekolah. Zamroni (2007:2) menjelaskan pengertian peningkatan mutu sekolah adalah suatu proses yang sistematis yang terus menerus meningkatkan kualitas proses belajar mengajar dan faktor-faktor yang berkaitan dengan itu, dengan tujuan agar menjadi target sekolah dapat dicapai dengan lebih efektif dan efisien. Hal yang sama juga dijelaskan oleh Prianasa & Somad (2014: 20), menjelaskan peningkatan mutu sekolah merupakan suatu proses yang sistematis dan terus menerus meningkatkan mutu proses belajar mengajar dan faktor yang berkaitan dengan itu, dengan tujuan agar menjadi target sekolah dapat dicapai dengan lebih efektif dan efisien. Mutu pendidikan atau mutu sekolah tertuju pada mutu lulusan yang berasal dari sekolah tersebut. Untuk menghasilkan lulusan yang bermutu maka proses pendidikan harus bermutu juga. Proses pendidikan yang bermutu merupakan bentuk dukungan yang bermutu pula dari berbagai aspek pendidikan. Termasuk didalamnya adanya dukungan personalia, seperti administrator, guru, konselor, dan tata usaha yang bermutu dan profesional, sarana dan prasarana pendidikan, fasilitas, media, serta sumber belajar yang memadai, baik mutu maupun jumlahnya, manajemen yang terpadu serta lingkungan yang mendukung.

Jadi peningkatan mutu berkaitan dengan target yang harus dicapai proses untuk mencapai dan hal yang paling penting di perhatikan yang terkait dalam peningkatan mutu ada dua aspek yang perlu mendapat perhatian, yakni aspek kualitas hasil dan aspek proses dalam lembaga pendidikan. Apabila dikaitkan dengan pendidikan, maka peningkatan mutu sekolah adalah suatu proses yang sistematis dan terus menerus dalam meningkatkan kualitas pendidikan dan factor- factor yang berkaitan dengannya agar dapat mencapai target dengan lebih efektif dan efisien.

3. Peningkatan Mutu Sekolah

Kebijakan pemerintah untuk meningkatkan mutu lembaga pendidikan dilakukan dengan berbagai cara, yaitu berupa meningkatkan mutu proses dan output dari suatu sekolah. Rivai & Murni (2010:714), menjelaskan peningkatan mutu juga dilakukan pada usaha peningkatan mutu proses pendidikan melalui optimalisasi proses belajar mengajar serta pengembangan metodologi pendidikan dilakukan dengan pemantapan prinsip manajemen terpadu. Hal ini meliputi Program Akreditasi Akademik (AA) dan TQM dalam proses pembelajaran. Peningkatan mutu guru dan tenaga penunjang akademik dilakukan melalui peningkatan kesempatan melanjutkan pendidikan, seminar, lokakarya, dan lain sebagainya.

Upaya peningkatan mutu berkelanjutan menitikberatkan pada program-program seperti peningkatan kualifikasi guru, penataan evaluasi dan akreditasi. Dalam hal peningkatan suatu perencanaan dan penganggaran, selain melakukan penyempurnaan seperti standar evaluasi diri, juga meliputi evaluasi hasil pembelajaran, serta melakukan pentingnya evaluasi diri dalam rangka peningkatan mutu kinerja lembaga pendidikan.

Jadi, peningkatan mutu sekolah hendaknya menjadi tujuan dari semua tenaga pendidik dan kependidikan di sekolah. Karena mutu sekolah merupakan suatu bentuk evaluasi terhadap proses pendidikan dengan harapan tinggi untuk dicapai dan mengembangkan bakat para pelanggan pendidikan dalam proses pendidikan. Mutu adalah hal yang sangat penting sebagai bagian dari proses pendidikan. Jika dikaitkan dengan pengelolaan pendidikan, upaya meningkatkan mutu sekolah ini harus menjadi program utama sekolah.

4. Standar Mutu Pendidikan

Pendidikan merupakan jasa yang perlu memiliki standarisasi penilaian terhadap mutu. Standar mutu ialah panduan sifat-sifat barang atau jasa termasuk sistem manajemennya yang relatif dan sesuai dengan kebutuhan pelanggan. Sallis (1993:67) mengemukakan bahwa standar mutu dapat dilihat dari dua sisi yaitu:

- a. Standar produk atau jasa yang ditunjukkan dengan:(1) sesuai dengan spesifikasi yang ditetapkan atau *conformance to specification*; (2) sesuai dengan penggunaan atau tujuan, atau *fitness for purpose our use*; (3) produk tanpa cacat atau *Zero deffect*; (4) sekali benar dan seterusnya atau *right first time, every time*.
- b. Standar untuk pelanggan yang ditunjukkan dengan:(1) kepuasan pelanggan atau *customer satisfication*. Bila produk dan jasa dapat melebihi harapan pelanggan atau *Exceeding customer expectation*; (2) setia kepada pelanggan atau *delighting the customer*.

Koswara (1999) merangkum indikator-indikator sekolah bermutu dan tidak bermutu yang diadaptasi dari pandangan beberapa ahli yaitu seperti tampak pada Tabel dibawah ini

Tabel 2.3
Indikator sekolah bermutu dan tidak bermutu

Sekolah bermutu	Sekolah tidak bermutu
Masukan yang tepat	Masukan yang banyak
Semangat kerja yang tinggi	Pelaksanaan kerja santai
Gairah motivasi belajar yang tinggi	Aktivitas belajar santai
Penggunaan biaya, waktu, fasilitas, tenaga yang proporsional	Boros memakai sumber-sumber
Kepercayaan berbagai pihak	Kurang peduli terhadap lingkungan
Tamatan yang bermutu	Lulusan hasil katrol
Keluaran yang relevan dengan kebutuhan masyarakat	Keluaran tidak produktif

(Sumber:Engkoswara & Komariah, 201:310)

Baker (2005) memaparkan standar sekolah baik yang bermutu yaitu:

- a. Administrator dan jajarannya serta guru-guru adalah para profesional yang handal.
- b. Tersedianya kurikulum yang luas bagi seluruh siswa.
- c. Memiliki filosofi yang selalu dikomunikasikan bahwa seluruh anak dapat belajar dengan harapan yang tinggi.
- d. Iklim yang baik untuk belajar, aman, bersih, mempedulikan, dan terorganisasi baik.
- e. Suatu sistem penilaian berkelanjutan yang didukung supervisi
- f. Keterlibatan masyarakat yang tinggi
- g. Membantu para guru mengembangkan strategi, teknik instruksional dan mendorong kerjasama kelompok.
- h. Menyusun jadwal secara terprogram untuk memberikan pelatihan dalam jabatan dan seminar untuk seluruh staf.
- i. Pengorganisasian SDM untuk melayani seluruh siswa.
- j. Komunikasi dengan orang tua dan menyediakan waktu cukup untuk dialog.
- k. Menetapkan dan mengartikulasikan tujuan secara jelas.
- l. Pelihara staf yang memiliki keseimbangan keterampilan dan kemampuan dan ketahu kekuatan dan kapasitas khusus dari staf.
- m. Bekerja untuk memelihara moril tinggi yang berkontribusi terhadap stabilitas organisasi dan membatasi tingkat *turn-over* (perputaran guru).
- n. Bekerja keras untuk memelihara ukuran kelas sesuai dengan mata pelajaran dan tingkatan kelas siswa sesuai aturan yang ada.
- o. Kembangkan dengan staf dan orang tua kebijakan sekolah dalam disiplin, penilaian, kehadiran, pengujian, promosi, dan ingatan.
- p. Kerjasama guru dan orang tua untuk menyediakan dukungan pelayanan dalam pemecahan permasalahan siswa.
- q. Memelihara hubungan baik dengan pemerintah daerah (Engkoswara & Komariah, 2011:309-311).

Engkoswara & Komariah (2011:311), juga menjelaskan standar mutu pendidikan dapat dirujuk dari standar nasional pendidikan yang telah menetapkan kriteria minimal tentang sistem pendidikan di Indonesia. Salah satunya adalah standar pengelolaan adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pelaporan, dan pengawasan kegiatan agar tercapai efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pendidikan.

5. Upaya Peningkatan Mutu Sekolah

Upaya peningkatan mutu Sekolah, khususnya mutu pengelolaan pendidikan merupakan hal yang sangat penting. Menurut Sukmadinata (2002:11) untuk melaksanakan program mutu ada beberapa dasar yang kuat yaitu:

- a. Komitmen pada perubahan; pengelola yang ingin menerapkan program mutu, harus memiliki komitmen atau tekad untuk berubah, sebab peningkatan mutu pada intinya adalah melakukan perubahan ke arah yang lebih baik, lebih berbobot. Perubahan pada dasarnya menimbulkan rasa takut, komitmen dapat menghilangkan rasa takut.
- b. Pemahaman yang jelas tentang kondisi yang ada; banyak kegagalan yang dialami dalam melaksanakan perubahan karena melakukan sesuatu sebelum sesuatu itu jelas.
- c. Mempunyai visi yang jelas tentang masa depan; perubahan yang dilakukan hendaknya didasarkan pada visi tentang perkembangan, tantangan kebutuhan, masalah, peluang yang akan dihadapi dimasa yang akan datang. Visi dapat menjadi pedoman yang membimbing tim dalam perjalanan pelaksanaan program mutu
- d. Mempunyai rencana yang jelas; rencana adalah pegangan dalam proses pelaksanaan program mutu yang dipengaruhi oleh faktor-faktor internal maupun eksternal yang akan selalu berubah. Rencana harus selalu di *up-date* sesuai perubahan-perubahan tersebut. tak ada program mutu yang berhenti dan tidak ada dua program yang identik,

karena program mutu selalu didasarkan dan disesuaikan dengan kondisi lingkungan. Program mutu merefleksikan lingkungan pendidikan dimana ia berada (Engkoswara & Komariah, 2011:316).

D. Penelitian yang Relevan

Adapun penelitian yang relevan dengan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Skripsi dari Budi Setiyo Prabowo, Program Studi Manajemen Pendidikan, Jurusan Administrasi Pendidikan, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Yogyakarta. Dengan judul “Pelaksanaan Standar Pengelolaan Pendidikan Di SMP Negeri 3 Godean”

Hasil penelitian menunjukkan sebagai berikut. (1) Perencanaan program di SMP Negeri 3 Godean sudah sesuai dengan Standar Pengelolaan Pendidikan Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah karena telah meliputi perumusan dan penetapan visi, misi, tujuan sekolah, penyusunan rencana kerja sekolah jangka empat tahunan dan satu tahunan, serta aspek perencanaan dan pedoman sekolah. (2) Pelaksanaan program di SMP Negeri 3 Godean merupakan aspek yang lebih dominan dibandingkan dengan komponen standar pengelolaan pendidikan lainnya. (3) Pengawasan dan evaluasi pendidikan di SMP Negeri 3 Godean telah dilaksanakan sesuai dengan kaidah standar pengelolaan pendidikan. (4) Kepemimpinan sekolah di SMP Negeri 3 Godean sudah sesuai dengan standar pengelolaan pendidikan karena struktur kepemimpinan terdiri dari kepala sekolah dibantu dengan wakil

Kepala sekolah dan koordinator urusan serta sudah menyadari peranan dan fungsi masing-masing untuk mendukung optimalisasi pengelolaan menuju sekolah yang bermutu. (5) Pengembangan sistem informasi manajemen sudah cukup baik, akan tetapi masih perlu ditingkatkan pada aspek penggunaan fasilitas untuk mendukung administrasi dan pengelolaan sekolah.

Persamaan dalam penelitian karya ilmiah ini adalah sama-sama mengkaji mengenai pelaksanaan standar nasional pendidikan di SMP. Sedangkan perbedaannya pada penelitian ini hanya mengkaji mengenai pelaksanaan standar pengelolaan pendidikan, sedangkan pada penelitian peneliti juga mengkaji mengenai simplenetas standar pengelolaan pendidikan namun dikaitkan dengan upaya peningkatan mutu sekolah di SMP. Selain itu tempat penelitiannya juga berbeda yakni peneliti melakukan penelitian di SMPN 4 Batusangkar Kecamatan Lima Kaum Kabupaten Tanah Datar.

2. Skripsi dari Jafriansen Damanik (friansen@yahoo.com) STKIP Purnama Jakarta. Dengan judul penelitian “Upaya Dan Strategi Pemenuhan Standar Nasional Pendidikan”

Hasil penelitian menunjukkan Strategi yang perlu diterapkan sekolah untuk memenuhi standar nasional pendidikan terutama dengan memanfaatkan semua potensi, menyusun rencana dan program kerja sesuai kebutuhan, mendorong semua komponen sekolah meningkatkan kinerjanya, membentuk tim penjaminan mutu, membenahi perangkat pembelajaran, menegakkan tata tertib sekolah, memperluas kerjasama dengan dunia usaha dan industri, komite sekolah, pengawas, dan pemerintah, memfasilitasi guru dan tenaga kependidikan meningkatkan kompetensi, mengevaluasi setiap kegiatan yang sudah dilaksanakan, dan mendokumentasikan seluruh bukti kegiatan sekolah.

Persamaannya dalam penelitian karya ilmiah ini adalah sama-sama ada membahas mengenai pelaksanaan standar nasional pendidikan. Sedangkan perbedaannya pada penelitian skripsi dari Jafriansen Damanik ini mengkaji keseluruhan yaitu 8 standar nasional pendidikan. Sedangkan pada penelitian ini hanya memfokuskan pada implementasi standar pengelolaan pendidikan dalam peningkatan mutu sekolah. Selain itu tempat penelitian juga berbeda, peneliti melakukan penelitian di SMPN 4 Batusangkar

3. Thesis dari Mulyadi, NIM:MPI.11.064. Dengan judul “Implementasi Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah di Pondok Pesantren Tarbiyah Islamiyah Pariangan”.

Hasil penelitian ini yaitu: Pertama, tahapan-tahapan yang dilakukan oleh PP TI Pariangan dalam Implementasi MPMBS adalah: Sosialisasi MPMBS, penyusunan data dan profil pondok pesantren, melakukan evaluasi diri, mengidentifikasi kebutuhan pokok pesantren, merumuskan visi, misi dan tujuan Pondok Pesantren, menyusun program kerja jangka panjang dan jangka pendek, membuat strategi perencanaan dan pengembangan jangka panjang, dan melakukan monitoring dan evaluasi. Kedua, kendala-kendala yang menghambat MPMBS adalah: guru-guru tidak mau terlibat, kecilnya tempat penyusunan output data dan staf yang memiliki kemampuan yang lemah.

Persamaan dalam penelitian karya ilmiah ini adalah sama-sama mengkaji mengenai peningkatan mutu sekolah. Sedangkan perbedaannya pada penelitian ini hanya mengkaji tentang bagian peningkatan mutu, sedangkan peneliti mengkaji implementasi standar pengelolaan dalam peningkatan mutu sekolah. Selain itu tempat penelitian juga berbeda, yakni peneliti melakukan penelitian di SMPN 4 Batusangkar

4. Disertasi dari Riyuzen Praja Tuala, NPM:1303020039. Dengan Judul Manajemen Peningkatan Mutu Sekolah/Madrasah (Studi Kasus di SMA Al-Kautsar Bandar Lampung dan Madrasah Aliyah Negeri I (MAN MODEL) Bandar Lampung).

Hasil penelitian ini yaitu: Manajemen Mutu di SMA Al-Kautsar dan MAN 1 Bandar Lampung memiliki berbagai kesamaan terkait dengan standar isi, standar proses dan standar Tendik; untuk Standar Isi dalam perencanaannya dimulai dari pembentukan Tim Pengembang Kurikulum, perumusan kerangka dasar kurikulum berdasarkan landasan filosofis, yuridis dan teoritis, penyusunan struktur kurikulum dan standar kompetensi berdasarkan Kurikulum Nasional. Seluruh perencanaan standar isi tersebut diimplementasikan dalam bentuk perumusan visi, misi,

tujuan dan program sekolah. Evaluasi standar isi dilakukan terkait dengan rencana dan implementasi visi, misi, tujuan dan program sekolah. Manajemen mutu standar proses dimulai dari penyusunan silabus, RPP, bahan ajar dan alat evaluasi yang dilakukan oleh guru. Pelaksanaan standar proses dilakukan oleh guru dalam rangka mengimplementasikan standar isi dan seluruh rencana pembelajaran. Evaluasi proses dilakukan oleh guru meliputi evaluasi perencanaan proses yang sudah dibuat, evaluasi proses pembelajaran dan evaluasi hasil belajar. Manajemen mutu pada standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan dilakukan untuk memenuhi kuantitas dan kualitas tenaga pendidik melalui rekrutmen dan seleksi. Untuk MAN 1 Bandar Lampung rekrutmen dan seleksi adalah kewenangan Kementerian Agama sedangkan SMA Al- Kautsar dilakukan oleh pihak yayasan. Pelaksanaan program peningkatan mutu tenaga pendidik di MAN 1 Bandar Lampung mengacu pada kebijakan Kementerian Agama dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Sedangkan SMA Al-Kautsar lebih fokus pada otonomi sekolah dan yayasan. Untuk mengakomodir kuantitas dan kualitas guru, SMA Al-Kautsar dan MAN 1 Bandar Lampung melakukan evaluasi pada tenaga pendidik sehingga diperoleh data jumlah guru yang memenuhi standar minimal, guru yang lulus uji kompetensi, guru bersertifikat, dan guru yang menguasai IT.

Persamaan dalam penelitian karya ilmiah ini adalah sama-sama mengkaji mengenai peningkatan mutu sekolah dan menggunakan metode kualitatif. Perbedaannya dalam penelitian ini mengkaji peningkatan mutu sekolah dan dikaitkan dengan standar isi, proses, tenaga pendidik dan kependidikan. Sedangkan peneliti mengkaji hanya pada implementasi standar pengelolaan pendidikan dalam peningkatan mutu sekolah. selain itu tempat penelitian juga berbeda yakni peneliti melakukan penelitian di SMPN 4 Batusangkar.

5. Skripsi dari Rizka Umami, NIM. 11100182200072. Dengan Judul “Strategi kepala sekolah dalam Peningkatan Mutu Pendidikan di SDS Anand Islamic School Pegadungan Kalideres Jakarta Barat.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepala sekolah telah melaksanakan kepemimpinannya dengan baik sesuai dengan peran dan fungsinya sebagai kepala sekolah. Strategi kepala sekolah dalam peningkatan mutu pendidikan di SDS Ananda Islamic School berdasarkan manajemen mutu terpadu. Adapun strategi yang dimaksud yaitu (1) membuka usaha Rumah Sunat, hasil dari usaha tersebut didonasikan untuk menunjang sarana dan prasarana yang dibutuhkan sekolah, (2) mendatangkan guru dari luar negeri dengan maksud peserta didik mampu bersaing pada dunia Internasional.

Persamaan dalam penelitian karya ilmiah ini adalah sama-sama mengkaji mengenai peningkatan mutu dan ada mengkaji mengenai kepemimpinan kepala sekolah. Perbedaannya pada penelitian ini mengkaji peningkatan mutu dalam skop besar yaitu mutu pendidikan dan mengkaji mengenai strategi peningkatan mutu pendidikan. Sedangkan peneliti mengkaji mengenai implementasi standar pengelolaan dalam peningkatan mutu sekolah dan tempat penelitiannya juga berbeda.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian dengan menggunakan metode kualitatif. Metode penelitian kualitatif dipilih karena peneliti bermaksud untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena tertentu secara mendalam dan terperinci. Creswell menyatakan bahwa penelitian kualitatif adalah proses eksplorasi dan memahami makna perilaku individu dan kelompok. Proses penelitian mencakup membuat pertanyaan penelitian dan prosedur yang masih bersifat sementara, mengumpulkan data seting partisipan, analisis data secara induktif, membangun data yang parsial ke dalam tema, dan selanjutnya memberikan interpretasi terhadap makna suatu data. Kegiatan akhir adalah membuat laporan ke dalam struktur yang fleksibel (Sugiyono, 2014: 347)..Penelitian ini diajukan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena pada Sekolah Negeri 4 Batusangkar, khususnya terkait dengan Standar Pengelolaan sekolah dalam peningkatan mutu sekolah tersebut. Sehingga, pada kegiatan mengumpulkan, mengungkapkan, berbagai masalah dan tujuan yang akan dicapai maka, penelitian ini dilakukan dengan pendekatan studi deskriptif analitik.

Penelitian deskriptif menurut Zuriyah (2009:47) adalah “penelitian yang diarahkan untuk memberikan gejala-gejala, fakta-fakta, atau kejadian-kejadian secara sistematis dan akurat, mengenai sifat-sifat populasi atau daerah tertentu.” Jadi, dalam suatu penelitian deskriptif dilakukan untuk mengungkapkan gejala, fakta maupun kejadian yang tepat berdasarkan subjek penelitian dan kondisi di lapangan tersebut. Oleh sebab itu, metode kualitatif dengan pendekatan studi deskriptif analitik yang digunakan dalam penelitian ini yaitu untuk menjelaskan bagaimana kondisi implementasi standar pengelolaan pendidikan dalam peningkatan mutu di SMPN 4 Batusangkar

C. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian yaitu suatu alat atau media yang digunakan untuk mengumpulkan data. Sesuai dengan pendapat yang dikemukakan oleh Sugiyono (2012:102) bahwa “instrumen penelitian adalah suatu alat yang digunakan untuk mengukur fenomena alam maupun sosial yang diamati”. Pada penelitian kualitatif ini, peneliti berperan sebagai instrumen utama, untuk tahap selanjutnya apabila fokus permasalahan dalam penelitian sudah ditemukan dan jelas. Maka, peneliti akan mengembangkan instrumen penelitian secara sederhana yang bertujuan untuk dapat melengkapi data yang selanjutnya untuk dapat dibandingkan dengan data yang lainnya yang telah ditemukan. Selain peneliti sebagai instrumen utama, peneliti juga menggunakan instrumen pendukung seperti handy came, recorder, alat rekaman dan lain-lain.

D. Sumber Data

Pada penelitian ini sampel sumber data di pilih secara purposive sampling. Menurut Sugiyono (2007: 300), menjelaskan purposive sampling adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu, misalnya orang tersebut yang di anggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan , atau mungkin ia sebagai penguasa sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi objek situasi sosial yang akna di teliti. Maka Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu berasal dari informan, aktivitas-aktivitas, dan data tambahan lainnya seperti dokumen.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan tiga cara yaitu wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Adapun pembahasannya adalah sebagai berikut:

1. Wawancara

Wawancara digunakan oleh peneliti dalam teknik pengumpulan data untuk menemukan permasalahan-permasalahan yang terjadi dan ingin mengetahuinya secara lebih mendalam yaitu dengan bertukar informasi atau berdialog dengan kepala sekolah dan kepala tata usaha sekolah mengenai Implementasi standar pengelolaan dalam peningkatan mutu sekolah. Sesuai dengan Esterberg (dalam Sugiyono, 2014:72) mengemukakan bahwa "...wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu."

2. Observasi

Jenis observasi yang dilakukan oleh peneliti adalah observasi nonpartisipan dimana peneliti sebagai observer tidak ikut berpartisipasi dalam kegiatan subjek yang diteliti dan hanya bertindak sebagai pengamat. Berdasarkan observasi tersebut peneliti dapat melihat bagaimana aktivitas implementasi standar pengelolaan pendidikan dan upaya dalam peningkatan mutu sekolah. Sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh Satori & Komariah (2011:90) bahwa observasi adalah "teknik pengumpulan data dengan melakukan pengamatan langsung terhadap subjek (partner penelitian) dimana sehari-hari mereka berada dan biasa melakukan aktivitasnya."

3. Dokumentasi

Dokumen-dokumen tertulis merupakan sumber pendukung lainnya selain sumber manusia melalui observasi dan wawancara. "Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang." (Sugiyono, 2014:82). Dokumentasi pada penelitian ini diantaranya seperti foto-foto kegiatan dalam pengelolaan sekolah, serta dokumen berbentuk tulisan seperti data pengelolaan sekolah, pegawai dan lain sebagainya.

F. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data merupakan salah satu kegiatan dalam upaya mengolah data. Kegiatan tersebut dimulai dari mengelompokkan atau mengklasifikasi data, yang kemudian memilah agar dapat dikelola dengan baik, dan seterusnya untuk dapat menemukan informasi apa yang penting sehingga untuk dapat diuraikan dan dikemukakan kepada orang lain.

Langkah-langkah teknik analisis data Miles and Huberman dalam Sugiyono (2007):

1. Reduksi Data

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan. Reduksi data dapat dibantu dengan peralatan elektronik seperti komputer mini, dengan memberikan kode pada aspek-aspek tertentu. Dalam mereduksi data, setiap peneliti akan dipandu oleh tujuan yang akan dicapai.

2. Penyajian Data

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah melakukan penyajian data. Melalui penyajian data tersebut, amak data terorganisasikan, tersusun dalam pola hubungan, sehingga akan semakin mudah dipahami. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart dan sejenisnya (Sugiyono, 2014: 408).

3. Penarikan kesimpulan dan verifikasi

Langkah ketiga dalam analisis kualitatif menurut Miles and Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak

ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali kelapangan mengumpulkan data yang kredibel (Sugiyono, 2014: 412).

Dengan demikian kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi juga tidak, karena seperti yang telah dikemukakan bahwa masalah dan rumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah penelitian berada di lapangan.

G. Teknik Menguji Keabsahan Data

Moleong (2007:324) berpendapat bahwa dalam penelitian kualitatif diperlukan suatu teknik pemeriksaan keabsahan data. Untuk memperoleh keabsahan data temuan perlu diteliti kredibilitasnya dengan menggunakan teknik sebagai berikut:

1. *Persistent observation* (ketekunan pengamatan)

Merupakan mengadakan observasi secara terus-menerus terhadap objek penelitian guna memahami gejala lebih mendalam terhadap berbagai aktivitas yang sedang berlangsung dilokasi penelitian.

2. Triangulasi

Merupakan teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data untuk keperluan pengecekan atau pembandingan terhadap data. Triangulasi dilakukan dengan cara mengecek hasil wawancara dengan hasil observasi dan dokumentasi serta mengecek kembali data yang diterima dari informan satu dengan informan yang lainnya.

3. Menggunakan bahan referensi

Dalam hal ini, laporan peneliti dilengkapi dengan foto-foto. Selain itu juga dilengkapi dengan dokumen autentik yang berhubungan dengan fokus penelitian sehingga menjadi lebih dapat dipercaya.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Temuan Penelitian

1. Deskripsi Data Penelitian

a. Keadaan Sekolah

SMP Negeri 4 Batusangkar terletak di Kenagarian Parambahan Kecamatan Lima Kaum. Dibangun diatas tanah $\pm 7.329 \text{ M}^2$, berhawa sejuk karena sekolah ini terletak di lereng Gunung Merapi dikelilingi oleh lingkungan yang cukup asri. Sekolah ini difungsikan pada tahun pelajaran 1995 / 1996 dengan nama SMP 4 Lima Kaum berdasarkan SK pendirian Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 0315 / 0 / 1995 tanggal 26 Oktober 1995.

SMP Negeri 4 Batusangkar terletak diatas tanah seluas 7.329 M², dengan permukaan tanah bertangga dan miring serta sebagian tanah kurang stabil, Jarak sekolah dari kota Kabupaten 10 KM, jarak dari SMP lainnya paling dekat 5 KM dan rata-rata jarak tempat tinggal siswa dengan sekolah 1 KM.. SMP Negeri 4 Batusangkar kalau ditinjau dari segi keberadaannya sangat menguntungkan bagi orang tua siswa yang ingin melanjutkan pendidikan anaknya setelah tamat Sekolah Dasar terutama untuk masyarakat Kenagarian Parambahan dan Labuh.

Adapun SD pendukung dari SMPN 4 Batusangkar ini adalah :

- 1) SDN 15 Tiga Ninik Parambahan
- 2) SDN 25 Silabuk
- 3) SDN 16 Ampalu Kecil Labuh
- 4) SDN 02 Koto Labuh
- 5) SDN 27 Dusun Tuo
- 6) SDN 07 Supanjang
- 7) SDN 29 Cubadak

b. Identitas sekolah

Tabel 4.1
Identitas Sekolah

NO	IDENTITAS SEKOLAH	
1.	Nama Sekolah	SMP Negeri 4 Batusangkar
2.	Nomor Statistik	20108070546
3.	Propinsi	Sumatera Barat
4.	Otonomi Daerah	Pusat
5.	Kecamatan	Lima Kaum
6.	Desa / Kelurahan / Nagari	Kubu
7.	Jalan dan Nomor	ManganingParambahan
8.	Kode Pos	Berok
9.	Telepon	27215
10.	Daerah	-
11.	Status Sekolah	Pedesaan
12.	Surat Keputusan / SK	Negeri
13.	Penerbit SK ditanda	Nomor:0315 / 0 / 1995
14.	tangani oleh	Mendikbud RI
15.	Tahun Berdiri	1994
16.	Tahun Penegerian	1995
17.	Kegiatan Belajar	Pagi
18.	Mengajar	Milik Sendiri
19.	Bangunan Sekolah	Milik Sendiri
20.	Lokasi Sekolah	5 Km
21.	Jarak Ke Pusat	15 Km
22.	Kecamatan	Desa
	Jarak ke Pusat Otda	SMP 4 Lima Kaum 1995
	Terletak Pada Lintasan	SLTP 2 Lima Kaum 1998
	Perjalanan Perubahan	SLTP 4 Lima Kaum 1998
	Sekolah	SLTP 4 Batusangkar 2002
		SMPN 4 Batusangkar 2004
		SMPN 4 Batusangkar
		sampai sekarang
23.	Kepala Sekolah Yang Pernah Menjabat	1. Syafniar 1995 s/d Des 2003 2. Syafrijar S.Pd Des 2003 s/d Febr 2006 3. Sirajul Fuad S.Pd Febr 2006 s/d April 2010 4. Drs. Bakhtaruddin April 2010 s/d 2017

24	Organisasi Penyelenggara	5. Bestaliko S.Pd 2017 s/d sekarang Pemerintah
----	--------------------------	---

(Sumber Data, SMPN 4 Batusangkar:2017)

c. Visi dan Misi SMPN 4 Batusangkar

Visi

Terdidik berbudaya berdasarkan iman dan taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa

Misi

- 1) Melaksanakan pembelajaran dan bimbingan secara optimal, efektif efisien dan menyenangkan
- 2) Meningkatkan prestasi kerja dan prestasi belajar
- 3) Memantapkan pembinaan penghayatan terhadap agama, adat dan budaya bangsa sehingga menjadi sumber kearifan dalam bertindak
- 4) Mendorong dan membantu setiap siswa untuk mengenali prestasi dirinya sehingga dapat berkembang secara optimal
- 5) Menerapkan budaya hidup sehat di lingkungan sekolah
- 6) Menerapkan manajemen partisipasif dengan melibatkan seluruh warga sekolah
- 7) Mengoptimalkan penggalangan dana pembiayaan pendidikan
- 8) Melaksanakan pengembangan standar penilaian

d. Motto dan tujuan Sekolah

- 1) Moto

S A R

Sejuk, Aman, Ramah Lingkungan

Siap Berjuang Raih Prestasi

2) Tujuan

- a) Peningkatan hasil UN
- b) Profesi masuk sekolah faforit mencapai 50 % dari lulusan
- c) Memiliki prestasi bidang seni, terutama kesenian tradisional
- d) Memiliki Tim MIPA yang berprestasi pada tingkat kabupaten
- e) Memiliki English Club
- f) Memiliki keterampilan komputer
- g) Memiliki taman ASRI
- h) Memiliki Tim Volly andal
- i) Memiliki kelompok gemar pustaka
- j) Memiliki Tim Kesenian Randai.
- k) Mengaktifkan seluruh komponen sekolah
- l) Sekolah dapat memberdayakan segenap potensi yang ada.
- m) Semua guru dapat melakukan penilaian sesuai dengan model-model pembelajaran

e. Kode Etik Sekolah

Kode Etik SMPN 4 Batusangkar

- 1) Setiap warga sekolah menjamin kebebasan beragama dan menumbuhkan penghayatan terhadap ajaran agama yang di anut dan memiliki budi pekerti luhur.
- 2) Setiap warga sekolah memiliki kewajiban melaksanakan Pancasila dan Undang-undang Dasar Tahun 1945
- 3) Setiap warga sekolah memiliki kewajiban untuk melaksanakan visi dan misi yang ada di SMPN 4 Batusangkar
- 4) Setiap warga sekolah memiliki kewajiban untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dimilikinya.
- 5) Setiap warga sekolah memberikan kesempatan dan memberikan fasilitas dalam menciptakan pembelajaran yang efektif dan efesien untuk menggali potensi yang ada di SMPN 4 Batusangkar.

- 6) Sekolah memberikan pelayanan kepada peserta didik dalam pembelajaran atau dalam menggali potensi yang di miliki oleh peserta didik.
- 7) Warga sekolah memiliki kewajiban untuk membangun komunikasi yang baik untuk mewujudkan visi dan misi SMPN 4 Batusangkar
- 8) Setiap warga sekolah memilii kewajiban untuk mengembangkan sikap berbudaya santun
- 9) Warga sekolah memiliki kewajiban untuk mengembangkan potensi yang dimiliki dalam penelitian ilmiah dan berkomunikasi ilmiah.
- 10) Warga sekolah memiliki kewajiban dan memberikan fasilitas dalam melestarikan seni dan budaya bangsa
- 11) Setiap warga sekolah memilki kewajiban dan bertanggungjawab dalam mengembangkan prestasi bidang akademik dan non akademik.
- 12) Setiap warga sekolah bersikap visioner dan kompetitif
- 13) Setiap warga sekolah memiliki kepedulian dalam melestarikan lingkungan dan menjadi keindahan, kebersihan dan ketertiban sekolah.
- 14) Setiap warga sekolah memiliki kewajiban menjaga kerahasiaan baik hasil keputusan rapat atau tugas yang di bebaskan kepada setiap warga sekolahnya.
- 15) Setiap warga sekolah memiliki kewajiban untuk menjaga nama baik sekolah.

f. Sarana dan prasarana sekolah

1) Sarana dan prasarana

Tabel.4.2
Sarana dan Prasarana Sekolah

No	Prasarana Minimum Sekolah	Jumlah
1	Ruang Kelas	9
2	Ruang Perpustakaan	1
3	Laboratorium IPA	1
4	Ruang Pimpinan	1
5	Ruang Guru	1
6	Ruang Uks	1
7	Jamban	4
8	Gudang	2
9	Tempat Bermain Olahraga	2
10	Laboratorium Komputer	1

(Sumber Data, SMPN 4 Batusangkar:2017)

2) Luas Lahan

Tabel 4.3
Luas Lahan SMPN 4 Batusangkar

1	Luas Lahan	7.329 m ²
2	Rasio lahan terhadap siswa	47 2

(Sumber Data, SMPN 4 Batusangkar:2017)

3) Luas Bangunan

Tabel 4.4
Luas Bangunan SMPN 4 Batusangkar

1	Luas bangunan	2712 m ²
2	Jumlah lantai	8
3	Rasio lahan terhadap siswa	17

(Sumber Data, SMPN 4 Batusangkar:2017)

g. Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Berikut peneliti sajikan tabel rekapitulasi tenaga pendidik dan kependidikan di SMPN 4 Batusangkar

Tabel 4.5
Rekapitulasi pendidik dan tenaga kependidikan

1	Kepala sekolah	1 orang
2	Jumlah guru	17 orang
3	Jumlah guru S1/ D4	14 orang
4	Jumlah guru >S1	1 Orang
5	Jumlah guru < SI	1 orang
6	Jumlah guru bersertifikat Profesi	15 orang
7	Jumlah tenaga kependidikan	3 orang

(Sumber Data, SMPN 4 Batusangkar:2017)

h. Data keadaan orang tua peserta didik SMPN 4 Batusangkar

Berdasarkan data yang ada, keadaan orang tua peserta didik pada SMPN 4 Batusangkar adalah sebagai berikut:

Tabel 4.6
Data keadaan orang tua peserta didik

No	Pekerjaan	Persentase
1	Tani	64,33 %
2	PNS	0,52 %
3	Pedagang	10,16 %
4	Tukang	5,75 %
5	Sopir	9,92 %
6	Swasta Lainnya	9,32%
Jumlah		100 %

(Sumber Data, SMPN 4 Batusangkar:2017)

Tabel 4.7
Data tingkat pendidikan orang tua peserta
didik SMPN 4 Batusangkar

No	Pendidikan	Persentase
1	SD	33,00 %
2	SMP / MTS	42,00 %
3	SMA/SMK/STM	22,98 %
4	D.I	-
5	D.II	-
6	D.III	
7	S.I	2,02 %
8	S.2	-
Jumlah		100 %

(Sumber Data, SMPN 4 Batusangkar:2017)

2. Implementasi Standar Pengelolaan Pendidikan dalam Peningkatan Mutu Sekolah

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan model Miles dan Huberman yaitu ada tiga macam kegiatan dimulai dari reduksi data, penyajian data dan verifikasi/kesimpulan. Penelitian ini menggunakan interpretasi data secara deskriptif berupa uraian kalimat. Pada bagian ini akan di paparkan data hasil penelitian yang diperoleh dilapangan dengan menggunakan metode wawancara, pengamatan dan dokumentasi. Deskripsi hasil penelitian dikelompokkan menjadi empat bagian sesuai dengan aspek yang akan di teliti yaitu “Implementasi Standar Pengelolaan Pendidikan dalam Peningkatan Mutu Sekolah”.

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah penyajian data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data dapat dilakukan dengan bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antara kategori dan jenisnya. Dalam menyajikan data akan memudahkan dalam memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang dipahami tersebut. dengan melakukan penyajian data selain penyajian teks yang

naratif juga dapat dilakukan dengan grafik, matrik, *network* (jaringan kerja) dan (peta) *chart*.

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif menurut Miles dan Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah apabila tidak dikemukakan bukti-bukti yang mendukung pada tahap pengumpulan data-data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti datang ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan kredibel.

Peneliti melakukan wawancara dengan informan dan juga menganalisis data dengan triangulasi data. Hal ini digunakan untuk melihat keabsahan data informasi yang peneliti terima dari informan penelitian. Berdasarkan hasil wawancara, observasi dan dokumentasi dapat disimpulkan bahwa implementasi standar pengelolaan pendidikan dalam peningkatan mutu sekolah sudah di upayakan semaksimal mungkin oleh sekolah.”

Standar pengelolaan merupakan standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan, kabupaten/kota, provinsi, atau nasional agar tercapai efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pendidikan (Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan). Berikut akan diuraikan dalam temuan penelitian tentang “Implementasi Standar Pengelolaan pendidikan dalam peningkatan mutu sekolah sebagai berikut:

a. Perencanaan Program Sekolah dalam Peningkatan Mutu Sekolah

Perencanaan memegang peranan penting dalam ruang lingkup pendidikan karena menjadi penentu dan sekaligus memberi arah terhadap tujuan yang ingin dicapai. Dengan perencanaan yang matang, suatu pekerjaan tidak akan berantakan dan tidak terarah. Perencanaan yang matang dan di susun dengan baik akan memberi pengaruh terhadap ketercapaian tujuan.

1) Perencanaan sekolah berorientasi mutu

Pada penelitian ini, untuk mengetahui sejauh mana pemahaman atau pemaknaan informan terhadap perencanaan sekolah peneliti melakukan wawancara dengan beberapa informan mengenai pengetahuannya tentang perencanaan sekolah berorientasi mutu. Perencanaan di SMPN 4 Batusangkar mengacu kepada perencanaan berorientasi mutu dan mengacu pada Permendiknas Nomor 19 Tahun 2007 Tentang Standar Pengelolaan Pendidikan. Temuan ini berdasarkan hasil wawancara dengan kepala sekolah Bapak Bestaliko S.Pd yang menjelaskan bahwa jika berbicara perencanaan tentu itu sangat cocok dikaitkan dengan visi dan misi sekolah. Visi bukanlah mimpi karena visi bisa di capai, sedangkan mimpi hanya suatu hal atau angan-angan. Perencanaan yang berorientasi mutu berhubungan pada bidang akademik, terutama pada aspek peningkatan mutu pembelajaran, pada pemenuhan sarana dan prasarana, pengelolaan pendanaan sekolah dengan APBS setiap tahun, pembuatan DPA. Perencanaan disusun meliputi jangka panjang, menengah, dan operasional. Pedoman berbagai aspek terdapat pada RPS, kemudian aspek tidak lagi terpisah pada kesiswaan, kurikulum, dan sebagainya, Melainkan bidang-bidang sasaran pendidikan yang tersebut dalam SNP. Untuk lebih jelasnya boleh dilihat di dokumen perencanaan sekolah yang di lemari kaca itu. Sekolah melakukan penyusunan program dan pembagian tugas dalam rangka menuntut ketercapaian standar

nasional pendidikan. Berkaitan dengan akreditasi, peningkatan mutu menjadi fokus perhatian sekolah yang selalu disosialisasikan pada setiap kegiatan sekolah

Hal yang sama juga diungkapkan oleh Kepala Tata Usaha Ibu Erlina Guswara S.Sos, bahwa perencanaan di SMPN 4 Batusangkar sudah ada, dapat dilihat dari keberadaan visi dan misi sekolah. Perencanaan yang berorientasi mutu berhubungan pada setiap aspek, terutama pada aspek peningkatan mutu pembelajaran, pada pemenuhan sarana dan prasarana, pengelolaan pendanaan, menjalin kemitraan. Perencanaan disusun meliputi jangka panjang, menengah, dan operasional. Selanjutnya keterangan ini juga didukung oleh hasil wawancara dengan wakil kepala sekolah dan pegawai tata usaha yang juga menjelaskan bahwa perencanaan sekolah sudah ada yang dapat dilihat dari visi dan misi sekolah dan dituangkan dalam

Berdasarkan hasil penelitian tersebut dapat dilihat bahwa informan, memahami perencanaan berorientasi mutu sekolah, bahwa perencanaan program di SMPN 4 Batusangkar ditandai dengan kegiatan berupa perumusan visi, misi, tujuan, serta rencana kerja sekolah. Dalam penyusunan rencana kerja, produk yang dihasilkan adapat berupa rencana jangka menengah yang menggambarkan tujuan yang akan dicapai dalam kurun waktu empat tahun yang terkait dengan mutu sekolah.

2) **Pentingnya Perencanaan dalam pengelolaan pendidikan**

Masa yang akan datang tidak dapat di deskripsikan secara pasti, namun demikian kita perlu mengestimasi kemungkinan yang akan terjadi di masa depan dengan membaca kecenderungan di masa kini. Perencanaan yang terumus dengan baik dengan mempertimbangkan apa yang sudah dicapai, membaca apa yang sudah terjadi dan memproyeksikan kecenderungan yang terjadi di

masa depan memungkinkan perencanaan tersebut menjadi alat perubah yang memiliki tingkat kepastian tinggi dengan resiko yang minimal. Maka jelaslah perencanaan sangat penting sekali dalam suatu pengelolaan pendidikan. Temuan ini berdasarkan hasil wawancara dengan kepala sekolah Bapak Bestaliko S.Pd, yang menjelaskan bahwa perencanaan pendidikan sangat diperlukan, karena dalam pengelolaan pendidikan di pimpin oleh kepala sekolah, dan harus melakukan pengelolaan pendidikan, hal ini berdasarkan pada fungsi manajemen *Planning, Organizing, Aztuating dan Comtrolling*. Maka, langkah awal dalam pengelolaan pendidikan yaitu *planning* (perencanaan). Semua hal kegiatan di sekolah jika dilakukan tanpa perencanaan maka tidak akan jelas hasilnya. Karena dalam perencanaan akan jelas tujuan dari kegiatan yang dilakukan tersebut. oleh karena itu perencanaan di sekolah harus mencakup ke seluruh komponen sekolah.

Hal ini juga diungkapkan oleh Kepala Tata Usaha Sekolah Ibuk Erlina Guswara S.Sosyang menjelaskan bahwa perencanaan sangat diperlukan dalam pengelolaan pendidikan dikarenakan dalam pengelolaan pendidikan harus di kelola sesuai fungsi manajemen dan peraturan pemerintah serta peraturan yang berlaku. Suatu sekolah di pimpin oleh kepala sekolah yang bertugas sebagai pemimpin pendidikan pendidikan. Kepala sekolah lah yang mengelola pendidikan dengan berbagai kegiatan berdasarkan pada fungsi manajemen *Planning, Organizing, Aztuating dan Comtrolling*. Salah satunya adalah *planning* (perencanaan). Jika tidak ada perencanaan maka kegiatan sekolah tidak bisa di laksanakan, karena semua kegiatan sekolah berdasarkan kepada perencanaan yang telah dibuat.

Pernyataan ini diperkuat lagi oleh ungkapan wakil kepala sekolah Bapak Delfi Warman dan pegawai TU Ibu Vivie Herly yang menjelaskan bahwa perencanaan pendidikan sangat diperlukan, karena perencanaan salah satu fungsi manajemen pendidikan, yang wajib dilaksanakan. Perencanaan merupakan acuan dalam pengelolaan pendidikan

Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa perencanaan sangat diperlukan dalam kegiatan pendidikan karena perencanaan merupakan salah satu fungsi manajemen, yang di dalamnya diawali dengan perencanaan pendidikan. Maka segala sesuatu dalam kegiatan pendidikan harus direncanakan terlebih dahulu. Jika tidak maka kegiatan pendidikan tidak akan jelas arah dan tujuannya sehingga tidak bisa mencapai mutu sekolah.

3) **Bentuk rencana kerja sekolah yang berkaitan dengan standar pengelolaan pendidikan**

Untuk mengetahui bentuk rencana kerja sekolah yang berkaitan dengan standar pengelolaan pendidikan, maka peneliti melakukan wawancara dengan informan, berikut hasil wawancara peneliti dengan kepala Tata usaha sekolah Ibu Erlina Guswara, beliau menjelaskan bentuk rencana kerja sekolah yang berkaitan dengan standar pengelolaan pendidikan yaitu ada tercantum di RKS sekolah. Ada beberapa program kerja yang terkait dengan standar pengelolaan pendidikan yaitu pertama, menyusun visi, misi dan tujuan sesuai SNP. Kedua, meningkatkan sosialisasi visi, misi dan tujuan sekolah dilakukan kepada semua masyarakat. Ketiga, memiliki dokumen rencana kerja sekolah berbentuk RKS (Rencana Kerja sekolah). Keempat, Merealisasikan visi dan misi ke dalam pelaksanaan kegiatan pembelajaran. Kelima, terlaksananya semua kegiatan sekolah. Keenam, transparan dan akuntabelnya laporan pengelolaan keuangan sekolah. Ketujuh, menjalin kemitraan

dengan lembaga lain untuk mendukung implementasi rencana kerja sekolah.).

Berdasarkan keterangan dari kepala tata usaha, maka peneliti melakukan pengamatan dan langsung melihat RKS sekolah di lemari bagian standar pengelolaan pendidikan. Semua yang dijelaskan oleh Kepala Tata Usaha ada tercantum di RKS sekolah Hal ini juga di dukung dari hasil wawancara dengan kepala sekolah Bapak Bestaliko S.Pd beliau mengungkapkan bahwa bentuk rencana semuanya ada tercantum di RKS sekolah, termuat 8 standar nasional pendidikan. Namun kalau Rencana kerja sekolah (RKS) yang terfokus pada standar pengelolaan pendidikan ada beberapa rencana secara umumna yaitu dapat bapak jabarkan, pertama, menyusun visi, misi dan tujuan sesuai SNP. Kedua, meningkatkan sosialisasi visi, misi dan tujuan sekolah dilakukan kepada semua masyarakat. Ketiga, memilki dokumen rencana kerja sekolah berbentuk RKS (Rencana Kerja sekolah). Keempat, Merealisasikan visi dan misi ke dalam pelaksanaan kegiatan pembelajaran. Kelima, terlaksannya semua kegiatan sekolah. Keenam, transparan dan akuntabelnya laporan pengelolaan keuangan sekolah. Ketujuh, menjalin kemitraan dengan lembaga lain untuk mendukung implementasi rencana kerja sekolah.

Maka dapat dilihat dari hasil wawancara dan pengamatan peneliti bahwa bentuk rencana kerja sekolah yang berkaitan dengan standar pengelolaan pendidikan ini sebenarnya sudah tercantum di RKS sekolah. semuanya termuat dalam RKS yang terdiri dari 8 Standar Nasional Pendidikan.

4) **Upaya kepala sekolah dalam merumuskan dan mewujudkan visi dan misi sekolah**

Kepala sekolah sangat berperan dalam merumuskan dan mewujudkan visi dan misi sekolah, karena di sekolah, kepala sekolahlah kedudukan yang paling tinggi sebagai pemimpin pendidikan. Berdasarkan hasil wawancara, Pada kegiatan perumusan visi dan misi kepala sekolah melakukannya tidak atas pemikiran sendiri, namun melibatkan wakil kepala sekolah, tata usaha sekolah, guru, komite dan masyarakat. Hal ini diungkapkan oleh kepala sekolah Bapak Bestaliko S.Pd dan kepala tata usaha sekolah Ibu Erlina Guswara yang menjelaskan bahwa dalam perumusan visi dan misi sekolah ini di libatkan seluruh stakeholder sekolah, termasuk komite, orang tua siswa. Nah, nanti setelah di kumpulkan maka akan dirumuskan secara bersama dalam bentuk rapat visi dan misi sekolah. namun dalam pembuatan visi dan misi ini tidak dilibatkan siswa hanya wali murid saja.

Selanjutnya mengenai upaya sekolah dalam mewujudkan visi dan misi sekolah. Hal ini berdasarkan wawancara peneliti dengan kepala sekolah Bapak Bestaliko S.Pd yang menjelaskan bahwa dalam mewujudkan visi sekolah, maka harus melaksanakan misi sekolah. visi sekolah yaitu Terdidik, berprestasi, terampil, berbudaya berdasarkan iman dan taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nah untuk mewujudkan visi ini diperlukan misi sekolah. ada beberapa misi sekolah di antaranya seperti 1) Melaksanakan pembelajaran dan bimbingan secara optimal, efektif efisien dan menyenangkan, 2) Meningkatkan prestasi kerja dan prestasi belajar, 3) Memantapkan pembinaan penghayatan terhadap agama, adat dan budaya bangsa sehingga menjadi sumber kearifan dalam bertindak, 4) Mendorong dan membantu setiap siswa untuk mengenali prestasi dirinya sehingga dapat berkembang secara

optimal, 5) Menerapkan budaya hidup sehat di lingkungan sekolah, 6) Menerapkan manajemen partisipatif dengan melibatkan seluruh warga sekolah, 7) Mengoptimalkan penggalangan dana pembiayaan pendidikan, 8) Melaksanakan pengembangan standar penilaian. Kepala sekolah dan seluruh warga sekolah harus memahami visi dan misi sekolah. maka akan dilakukan dengan mengadakan sosialisasi visi dan misi, rapat visi dan misi, serta membangun komitmen, kerja sama untuk mewujudkan visi dan misi sekolah.

Upaya kepala sekolah didukung oleh upaya yang dilakukan oleh ibu Erlina Guswara sebagai Kepala Tata Usaha di SMPN 4 Batusangka yaitu dengan cara memahami maksud visi sekolah, serta bekerja dengan tanggung jawab, jujur, tekun dalam melaksanakan tugas yang telah diberikan kepala sekolah. semua misi yang telah ditetapkan harus di jalankan karena ini merupakan upaya tercapainya visi sekolah. namun intinya diperlukan pemahaman, kesadaran dan kerjasama dari seluruh stakeholder sekolah

Berdasarkan hal tersebut peneliti menyimpulkan bahwa di SMPN 4 Batusangkar dalam kegiatan perumusan visi dan misi sekolah melibatkan semua personil sekolah, yaitu kepala sekolah, wakil, Tu, Guru, Komite sekolah dan masyarakat. Dalam mewujudkan visi dan misi sekolah sebagai kepala sekolah harus menanamkan betul kepada seluruh personil sekolah akan makna dari visi sekolah, dan mengupayakan secara bersama untuk terwujudnya visi sekolah dengan melaksanakan misi sekolah yang telah dibuat dan di sepakati secara bersama. Maka semua kegiatan pendidikan selanjutnya akan mengacu pada visi dan misi sekolah yang telah ditetapkan. Upaya kepala sekolah tersebut di dukung oleh kepala tata usaha sekolah yaitu dengan bekerja dengan

bertanggung jawab dan mengerjakan semua pekerjaan sekolah dengan mengacu pada visi dan misi sekolah tersebut.

Selanjutnya berdasarkan observasi peneliti di SMPN 4 Batusangkar peneliti melihat Keberadaan visi sekolah sangat strategis yaitu diletakan didinding sekolah, yang langsung didepan lapangan (tempat upacara, kultum dan olahraga), sehingga langsung dilihat oleh seluruh *stakeholder* sekolah. jika di tinjau kondisi fisik, sangat indah dan cukup jelas. Keberadaan misi sekolah, sama dengan visi sekolah, yaitu dibuat dibawah penulisan visi sekolah dengan beberapan poin. Letak misi sekolah juga cukup baik dan strategis. Jika dilihat keberadaan tujuan sekolah berbeda dengan visi dan misi karena tujuan sekolah hanya dalam bentuk arsip (standar pengelolaan pendidikan) dan dalam profil sekolah. Peneliti juga melihat RKS dan RAPBS sekolah keberadaanya di ruang Tata Usaha sekolah dalam bentuk dokumen dan sudah sangat jelas.

Hal ini juga didukung oleh dokumen yang diberikan oleh sekolah, berupa profil sekolah, RKS, RAPBS, Kode etik dan dokumen lainnya yang berkaitan dengan perencanaan pendidikan. Didalam dokumen RKS sekolah juga jelas dicantumkan mengenai tujuan sekolah yaitu (1) Peningkatan kualitas standar kelulusan, (2) Peningkatan standar isi/kurikulum, (3) Peningkatan kwalitas Proses Belajar Mengajar, (4) Peningkatan Standar Penilaian, (5) Peningkatan Sarana dan Prasarana, (6) Peningkatan Kwalitas Tenaga Pendidik dan Kependidikan, (7) Peningkatan Kwalitas Pengelolaan, (8) Peningkatan Efisiensi Pembiayaan.

Berdasarkan wawancara, observasi dan dokumentasi diatas dapat peneliti simpulkan bahwa perencanaan program pendidikan di SMPN 4 Batusangkar sudah berorientasi mutu dan mengacu kepada Standar nasional pendidikan, terkhusus pada standar pengelolaan perencanaannya juga sudah sesuai dengan standar pengelolaan

pendidikan dan tercantum dalam bentuk RKS sekolah yang merupakan rencana kerja sekolah. hal ini berdasarkan wawancara peneliti dengan kepala sekolah dan kepala tata usaha sekolah di SMPN 4 Batusangkar sebagaimana tercantum diatas

Selanjutnya berdasarkan pengamatan peneliti selama melakukan penelitian di SMPN 4 Batusangkar, dapat dilihat bahwa perencanaan di SMP 4 Batusangkar sudah sesuai dengan standar nasional pendidikan. Hal ini dibuktikan dengan dokumen-dokumen yang ada terkait dengan standar pengelolaan pendidikan yang peneliti lihat dan sesuaikan dengan teori yang ada. Dokumen berupa RKS sekolah, kalender akademik, RAPBS dan profil sekolah yang di dalamnya termuat rencana kerja sekolah, dan visi dan misi sekolah. dokumen ini juga di dukung dengan pengamatan penulis, bahwa visi dan misi ada di dinding sekolah tepat didepan lapangan sekolah, hal ini sangat bagus karena dengan dibuat visi dan misi di dinding sekolah dengan letak strategis, maka dapat dilihat bagaimana visi dan misi sekolah, sehingga semua personil sekolah dapat selalu melihat visi dan misi dan berupaya untuk mewujudkannya. Maka dari hasil wawancara dan pengamatan serta sokumen yang ada dapat diketahui bahwa perencanaan di SMPN 4 Batusangkar sudah sesuai dengan standar pengelolaan pendidikan.

b. Pelaksanaan Program Sekolah dalam Peningkatan Mutu Sekolah

Setelah mendapat kepastian tentang tujuan, sumber daya dan teknis metode yang digunakan untuk mencapai tujuan tersebut, lebih lanjut manajer melakukan upaya pegorganisasian agar rencana tersebut dapat dikerjakan oleh orang ahlinya secara sukses. Peneliti mengelompokan pelaksanaan program sekolah dalam peningkatan mutu sekolah menjadi beberapa bagian, yaitu:

1) **Struktur organisasi sekolah**

Struktur organisasi sekolah sangat penting sekali dalam suatu sekolah. Hal ini dikarenakan dengan adanya struktur sekolah, maka akan jelas pembagian tugas dan menimbulkan tanggung jawab bagi orang-orang yang berjabat didalamnya. SMPN 4 Batusangkar, sudah memiliki struktur organisasi yang jelas. Pentingnya struktur organisasi sekolah ini, di jelaskan oleh Kepala sekolah Bapak Bestaliko S.Pd bahwa struktur organisasi di sekolah dapat dipahami sebagai sarana untuk memberikan gambaran posisi masing-masing anggota organisasi di sekolah. maka diharapkan dengan melihat struktur maka akan dapat memahami bagaimana tugas yang harus dijalankan dan jelas pembagian dan penanggungjawabnya. Bentuk susunan struktur terdiri dari kepala sekolah dengan dibantu oleh satu orang wakil kepala sekolah, Posisi komite sekolah sejajar dengan Kepala Tata Usaha sekolah. Pembagian tugas di bagian tata usaha meliputi kepala tata usaha, pegawai TU, bendahara sekolah.

Hal senada juga di jelaskan oleh kepala tata usaha sekolah Ibu Erlina Guswara , bahwa struktur organisasi di sekolah sangat penting sekali karena dengan adanya struktur organisasi akan menimbulkan tanggung jawab bagi orang-orang yang diberi jabatan di dalamnya dan jelas pembagian pekerjaan di sekolah sehingga menimbulkan tanggung jawab sesuai jabatan yang di embannya. Ibu sebagai kepala tata usaha, dengan adanya struktur juga akan nampak bawahan dan atasan ibu. Maka dalam satu sekolah jika tidak ada struktur maka dalam pelaksanaan tugas tidak akan mencapai tujuan yang di tetapkan, oleh karena itu struktur sangat diperlukan di suatu organisasi..

Dalam melakukan pengorganisasian ini, masih terdapat kendala karena seorang kepala sekolah jelas memerlukan

kemampuan memahami sifat pekerjaan (job specification) dan kualifikasi orang yang harus mengisi jabatan. Namun berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan kepala sekolah beliau menjelaskan bahwa beliau menambah tenaga honorer akhir tahun ini, yaitu dibagian tata usaha sekolah yang bernama Nilam, beliau juga alumni SMPN 4 Batusangkar. Namun sebenarnya Nilam lulusan biologi, namun ditempatkan sementara di bagian tata usaha sekolah, karena guru biologi di SMP ini sudah ada.

Berdasarkan keterangan dari kepala sekolah diatas dapat diketahui bahwa kepala sekolah ada menempatkan tenaga honorer yang tidak sesuai dengan keahliannya. Seharusnya kepala sekolah dalam pengorganisasian ini benar-benar teliti dan menempatkan orang sesuai keahliannya. Karena kemajuan suatu organisasi dipengaruhi oleh orang yang bekerja di dalamnya.

Berdasarkan observasi dan pengamatan yang peneliti lakukan di SMPN 4 Batusangkar, peneliti melihat Keberadaan struktur organisasi sekolah ada di ruangan tata usaha sekolah, yang dibuat dalam papan tulis dan di letakkan di dinding ruangan tata usaha sekolah. Bentuk bagan terdiri dari kepala sekolah, komite sekolah, wakil kepala sekolah, kepala tata usaha sekolah, pegawai TU dan guru. Keterangan dari bagan organisasi sudah jelas, karena jelas koordinasinya. Namun kondisi fisik hendaknya diperbaiki, misalkan struktur organisasi di desain dengan baik dan dibuat dalam bentuk spanduk. Dokumen yang peneliti lihat struktur organisasi sekolah ada di lemari akreditasi sekolah, dibagian standar pengelolaan pendidikan.

Jadi dapat peneliti simpulkan bahwa struktur organisasi sekolah di SMPN 4 Batusangkar sudah ada berupa dokumen juga ada dibuat di papan tulis di ruangan tata usaha sekolah. Pemimpin sekolah memahami akan pentingnya struktur organisasi di sekolah.

struktur organisasi sekolah juga sudah sesuai dengan standar pengelolaan pendidikan, akan tetapi masih ada kepala sekolah menempatkan tidak sesuai dengan keahliannya. Namun dari kondisi fisik struktur organisasi hendaknya diperbaiki.

2) **Bentuk Pelaksanaan Program Sekolah**

Program sekolah di SMPN 4 Batusangkar sudah banyak yang terealisasi, namun juga ada beberapa program yang belum terealisasi. Program yang telah terealisasi dapat berupa program kesiswaan, bidang sarana dan prasarana sekolah, bidang kurikulum dan kegiatan pembelajaran, bidang pendidik dan tenaga kependidikan, bidang keuangan dan pembiayaan dan kegiatan Humas (Hubungan masyarakat). Walaupun sudah dilaksanakan namun belum sempurna, karena sekolah sedang berupaya dalam peningkatan mutu sekolah. Jadi secara keseluruhan belum sempurna. Program yang belum terealisasi seperti perbaikan pagar sekolah, penyelesaian pembangunan mushalla, buku di perpustakaan belum lengkap dan kegiatan supervisi belum dilaksanakan.

Hal ini berdasarkan keterangan wawancara dengan kepala sekolah Bapak Bestaliko S.Pd yang menguraikan bahwa Pelaksanaan kegiatan sekolah secara umum merupakan pencerminan dari RKS. Karena RKS merupakan acuan bagi setiap pelaksanaan kegiatan di sekolah, meskipun kadang-kadang juga terdapat beberapa hal yang berbeda akan tetapi secara substansi merupakan cerminan dari RKS itu sendiri. Dapat dicontohkan program yang sudah dilaksanakan seperti program kenaikan kelas, yang dilaksanakan dengan rapat seluruh guru dengan kepala sekolah. Serta program perbaikan sarana dan prasarana sekolah. juga sudah dilaksanakan dengan memperbaiki pintu yang ada, melengkapi buku di perpustakaan sekolah. Selanjutnya

pelaksanaan program bidang keuangan. Namun disini ada kendala sekolah yaitu dananya minim dan dana berasal dari dana BOS. Maka dalam penggunaannya digunakan sesuai kepentingan. Jika tidak terlalu penting maka di kesampingkan dulu. Kalau dalam bidang tenaga kependidikan dilakukan dengan memberikan pembinaan kepada guru-guru-guru yaitu forum MGMP rutin yang diadakan oleh tingkat kabupaten, provinsi. Tidak hanya itu kepala sekolah juga sudah menambah SDM di SMPN 4 Batusangkar dengan menambah tenaga honorer di bagian TU dan beberapa guru honorer.

Selanjutnya peneliti juga menanyakan tentang program kerja yang sudah dilaksanakan yang berkaitan dengan standar pengelolaan kepala sekolah Bapak Bestaliko dan Kepala Tata Usaha Ibu Erlina Guswara menjelaskan bahwa bentuk kegiatannya seperti mengadakan lokakarya untuk menyusun visi dan misi dan tujuan sekolah, mengadakan rapat sosialisasi visi, misi dan tujuan sekolah, menyusun dokumen rencana kerja sekolah dalam bentuk RKS, pengawasan dari kepala sekolah terhadap guru dan tenaga kependidikan, menyediakan laporan keuangan yang transparan, memmbuat struktur tugas yang jelas sesuai keahlian dan membangun kerja sama dengan lembaga lain untuk peningkatan mutu sekolah. Namun juga banyak dari perencanaan yang belum terealisasi seperti kegiatan supervisi, kegiatan pengawan yang belum terstruktur oleh kepala sekolah, kegiatan ekstrakurikuler dan terkendala juga dalam perbaikan sarana sekolah seperti mushalla yang belum juga selesai, pagar sekolah dan masih kurangnya buku pelajaran sesuai dengan kurikulum yang diterapkan. Hal ini di karenakan minimnya dana Maka yang lebih penting di dahulukan.

Selanjutnya kepala sekolah juga menjelaskan bahwa yang terlibat dalam pelaksanaan ini adalah seluruh personil sekolah. Bentuk pelaksanaan Rencana Program Sekolah juga

dijelaskan oleh pegawai tata usaha ibuk Vivi dan wakil kepala sekolah Bapak Delfi Warma yang menjelaskan bahwadengan mengadakan kegiatan loka karya, sosialisasi, pelaksanaan pembelajaran, UTS, UAS, Perbaikan sarana. Yang belum terlaksana seperti kegiatan ekstrakurikuler, namun kalau ada surat undangan untuk kegiatan lomba, baru anak dilatih, menyusun dokumen rencana kerja sekolah dalam bentuk RKS, , memmbuat struktur tugas yang jelas sesuai keahlian dan membangun kerja sama dengan lembaga lain untuk peningkatan mutu sekolah

Berdasarkan observasi dan pengamatan peneliti, dapat peneliti lihat dan amati di SMPN 4 Batusangkar sudah ada perbaikan sarana sekolah, seperti pintu, cat dan buku-buku untuk menunjang proses pembelajaran di sekolah, semua kegiatan sekolah mengacu kepada kode etik sekolah, seperti terjalannya komunikasi yang baik, santun, pelayanan yang baik, dan adanya kepedulian warga sekolah terhadap lingkungan dengan kegiatan goro bersama, adanya kegiatan proses pembelajaran dan kegiatan ujian sebagai evaluasi hasil belajar siswa dan selama penelitian belum ada kegiatan ekstarkurikuler sekolah, sebagai wadah penampung dan pengembangan bakat siswa

Jadi, dapat peneliti simpulkan dari uraian diatas bahwa dalam pelaksanaan program kerja ini mengacu pada RKS, bentuk rencana kerja yang sudah di relaisasikan sudah banyak di SMPN 4 Batusangkar, di antaranya berkaitan dengan standar pengelolaan pendidikanyaitu seperti mengadakan lokakarya untuk menyusun visi dan misidan tujuan sekolah, mengadakan rapat sosialisasi visi, misi dan tujuan sekolah, menyusun dokumen rencana kerja sekolah dalam bentuk RKS, pengawasan dari kepala sekolah terhadap guru dan tenaga kependidikan, menyediakan laporan keuangan yang transparan, memmbuat struktur tugas yang jelas sesuai keahlian dan membangun kerja sama dengan lembaga lain untuk peningkatan

mutu sekolah. program dijalankan oleh orang-orang yang diberi tanggung jawab dalam pelaksanaannya.

Namun masih banyak juga program sekolah yang belum dijalankan seperti kegiatan ekstrakurikuler. Padahal ini sangat penting bagi siswa agar siswa tidak jenuh dan bisa mengembangkan bakatnya. Program kegiatan supervisi juga masih belum dijalankan serta sarana yang masih kurang dan tidak terawat serta pembangunan mushala yang belum juga selseai. Hal ini di karenakan dana yang sangat minim. Oleh karena itu hendaknya sekolah harus lebih meningkatkan kerjasama dengan pihak luar, agar bisa menambah pendanaan di sekolah. jadi intinya pelaksanaan program pendidikan sudah mengacu pada standar pengelolaan pendidikan, namun masih ada yang belum dilaksanakan karena kurangnya pendanaan pendidikan di SMPN 4 Batusangkar.

3) **Pembentukan Komitmen oleh kepala sekolah**

Pembentukan Komitmen dilakukan kepala sekolah dilakukan pertama kali oleh kepala sekolah dalam pelaksanaan program pendidikan di SMPN 4 Batusangkar, karena dalam peningkatan mutu di SMPN 4 Batusangkar diperlukan perbaikan terus menerus dan juga diperlukan komitmen dari seluruh personil sekolah. Hal ini berdasarkan wawancara peneliti dengan kepala sekolah dan kepala Tata Usaha sekolah yang menjelaskan bahwa hal pertama kali yang dilakukan bapak Bestaliko sebagai kepala sekolah adalah dengan membangun komitmen (tekad lebih baik). Intinya dalam suatu sekolah harus ada tekad dari seluruh personil sekolah, itu merupakan kunci keberhasilan suatu sekolah. ini juga berkaitan dengan mutu sekolah, karena salah satu upaya peningkatan mutu adalah membangun komitmen. Nah, ini yang bapak lakukan pertama kali.

Cara dalam pembentukan komitmen ini juga peneliti tanyakan kepada kepala sekolah Bapak Bestaliko S.Pd yang menjelaskan bahwa dalam kegiatan ini beliau melibatkan guru siswa dan orang tua, dilakukan per jenjang/ per kelas. Dengan mengundang orang tua siswa. Setelah itu kepala sekolah menyuruh siswa duduk di sebelah kanan, orang tua sebelah kiri. Maka, secara langsung bapak memberikan pengarahan dan membangun komitmen dari siswa dan juga wali murid serta guru untuk tekad membangun sekolah yang bermutu (berkualitas) yang lebih baik dari sebelumnya

Hal senada juga diungkapkan oleh kepala tata usaha Ibu Erlina Guswara yang menjelaskan juga bahwa hal yang di lakukan kepala sekolah bapak Bestaliko pertama kali yaitu membangun komitmen (tekad lebih baik). Ini direspon dengan baik oleh seluruh stakeholder sekolah, karena kunci dari sebuah mutu sekolah adalah salah satunya dengan membangun komitmen. Jika semuanya sudah berkomitmen maka dalam realisasi bisa dilaksanakan secara bersama dan rasa tanggung jawab.

Dari keteangan wawancara diatas dapat diperoleh informasi bahwa kepala sekolah sudah berupaya dalam peningkatan mutu sekolah dengan langkah awal pembentukan komitmen, baik itu komitmen kepala sekolah dengan guru, kepala sekolah dengan tata usaha, dan wali murid, siswa dengan kepala sekolah. Kegiatan ini sangat bagus dan mendukung terhadap pengelolaan pendidikan yang lebih baik.

4) **Kendala dalam pelaksanaan program pendidikan**

Dalam pelaksanaan program pendidikan di SMPN 4 Batusangkar ada beberapa kendala yang menyebabkan program tidak dapat dilaksanakan, hal ini berdasarkan wawancara peneliti dengan kepala sekolah Bapak Bestalikoyang mengungkapkan

Kendala yang sangat mempengaruhi yaitu dana yang sangat minim. Karena dana berasal dari dana BOS. Sekolah yang kecil menyebabkan keuangannya juga kecil. Maka ini kendala dalam setiap pelaksanaan program karena dana yang terbatas.

Solusi dari pendanaan yang sedikit juga diungkapkan oleh kepala sekolah yaitu dengan memberikan instruksi kepada guru dan TU atau pengguna anggaran untuk menggunakan sesuai kebutuhan dan mendahulukan kebutuhan yang penting. Contoh untuk dana ujian semester, ujian mit maka itu harus di dahulukan. Karena itu sangat penting. Maka harus berpandai-pandai dalam mengelola keuangan untuk mewujudkan sekolah berkualitas

Jadi, dapat diketahui kendala dalam pelaksanaan program bukan karena SDM yang tidak mampu melaksanakannya, namun karena dana yang sedikit yang harus di bagi untuk kebutuhan sekolah dalam mewujudkan tujuan pendidikan dan solusi dari kepala sekolah mendahulukan kebutuhan yang lebih penting dalam pelaksanaan program pendidikan di SMPN 4 Batusangkar.

Berdasarkan keterangan diatas dapat peneliti simpulkan bahwa secara umum kepala sekolah dan seluruh personil sekolah sudah melaksanakan program pendidikan sesuai Standar nasional pendidikan. Namun ada beberapa program yang belum dilaksanakan seperti program ekstrakurikuler, supervisi dan sarana dan prasarana sekolah. Hal ini dikarenakan sekolah yang kecil, sehingga personilnya sedikit dan mengakibatkan dana yang dikeluarkan untuk sekolah juga sedikit. Oleh karena itu dilaksanakan program yang lebih penting terlebih dahulu dalam pelaksanaan program pendidikan di SMPN 4 Batusangkar. Kepala sekolah juga sudah berupaya dalam peningkatan mutu sekolah dengan langkah awal pembentukan komitmen, baik itu komitmen kepala sekolah dengan guru, kepala sekolah dengan tata usaha, dan wali murid, siswa dengan kepala

sekolah. Kegiatan ini sangat bagus dan mendukung terhadap pengelolaan pendidikan yang lebih baik.

c. Pengawasan oleh Kepala Sekolah dalam Peningkatan Mutu Sekolah

Setiap kegiatan yang dilakukan tentunya menginginkan keberhasilan. Namun tidak bisa dipungkiri bahwasannya apa yang dilakukan tidak akan terlepas dari berbagai kendala dalam pelaksanaannya, begitu juga dengan kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh kepala SMPN 4 Batusangkar.

1) Bentuk Kegiatan Pengawasan di SMPN 4 Batusangkar.

Bentuk kegiatan pengawasan di SMPN 4 Batusangkar adalah pengawasan yang dilakukan kepala sekolah setiap hari. Hal ini dijelaskan oleh kepala sekolah bahwa beliau melakukan pengawasan tiap hari, beliau selalu mengamati pekerjaan setiap personil sekolah. Kalau siswa melihat adanobil bapak didepan, maka tidak akan berani keluar perkarangan sekolah selama jam pelajaran dan akan berperilaku yang baik. Selanjutnya dalam pengawasan ini ada program pembinaan, maksudnya jika terjadi pelanggaran oleh siswa maka dilakukan program pembinaan mengarah pada arah dan disiplin. Kegiatan ini dilaksanakan di ruangan kepala sekolah. Maka akan dilakukan tindak lanjut dari hasil pembinaan tersebut. apakah siswa berubah atau tidak, jika tidak baru di kenakan sanksi sesuai kode etik sekolah

Hasil wawancara dengan kepala sekolah didukung dari jawaban wawancara dengan kepala tata usaha Ibuk Erlina Guswara, Wakil Kepala sekolah Bapak Delfi Warman dan pegawai Tata usaha sekolah ibuk vivy Herlya yang menjelaskan bahwa Kegiatan pengawasan ada, kalau kepala sekolah sekarang dilakukan tiap hari.

Maka akan dicontrol dan jika ada permasalahan maka akan diberikan program pembinaan. Namun Kegiatan pengawasan belum terstruktur dengan baik.

Jadi, dapat diperoleh informasi bahwa kegiatan pengawasan di SMPN 4 Batusangkar dilakukan setiap hari oleh kepala sekolah dan jika ada yang melakukan pelanggaran atau kesalahan, maka akan diberikan program pembinaan oleh kepala sekolah program pembinaan ini tidak sama dengan kegiatan supervisi, karena program pembinaan lebih terarah kepada pembinaan terhadap aturan dan disiplin.

2) **Supervisi oleh Kepala Sekolah**

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan kepala sekolah dapat diperoleh informasi bahwa program supervisi di SMPN 4 Batusangkar sudah dibuat, namun pelaksanaannya yang belum. Hal ini berdasarkan ketengan dari kepala sekolah, yaitu perencanaan kegiatan supervisi ini sudah dilakukan, namun pelaksanaannya yang belum dilakukan. Namun bapak Bestaliko mempunyai keinginan untuk akan melakukan kegiatan supervisi ini. Sekarang sekolah masih belum menyusun program pengawasan berdasarkan SNP dan Program pengawasan sekolah belum disosialisasikan, dipantau, disupervisi, dilaporkan dan ditindaklanjuti. Untuk mendukung jawaban dari kepala sekolah peneliti juga menanyakan kepada tata usaha, wakil kepala sekolah dan pegawai TU, beliau menjelaskan yaitu: kegiatan supervisi belum dilaksanakan, namun perencanaannya sudah.

Selanjutnya peneliti juga menanyakan mengenai kendala pelaksanaan kegiatan supervisi, yaitu kendalanya karena pendanaan yang minim, namun bapak sudah dibekali diklat kepala sekolah pada tahun 2009, pada diklat inilah bapak Bestaliko S.Pd memahami semua kerja kepala sekolah dan memahami tentang

pengelolaan pendidikan. Oleh karena itu beliau mempunyai semangat tinggi untuk meningkatkan mutu sekolah agar lebih baik lagi.

Berdasarkan observasi dan pengamatan peneliti di SMPN 4 Batusangkar, bahwa selama penelitian belum pernah dilakukan kegiatan supervisi ini. Padahal kegiatan ini sangat penting, sebagai upaya pembinaan kepada guru yang mewujudkan guru profesional. Selanjutnya berdasarkan pencermatan dokumen juga belum peneliti temukan dokumen sekolah yang berkaitan dengan kegiatan supervisi yang sudah pernah dilaksanakan sekolah

Jadi, dapat peneliti simpulkan bahwa kegiatan supervisi belum dilaksanakan oleh sekolah, namun sudah direncanakan. Kegiatan ini terkendala karena sedikitnya dana yang diperoleh sekolah. Namun kepala sekolah memiliki keinginan untuk melaksanakan kegiatan supervisi untuk tahun berikutnya..

3) **Evaluasi diri sekolah SMPN 4 Batusangkar**

SMPN 4 Batusangkar sudah memiliki Evaluasi diri sekolah (EDS) dalam bentuk dokumen EDS sekolah. EDS inilah yang akan dijadikan bahan pertimbangan dalam penyusunan RKS. Evaluasi diri sekolah berkaitan dalam peningkatan mutu sekolah di SMPN 4 Battusangkar. Temuan ini berdasarkan hasil wawancara dengan kepala sekolah Bapak Bestaliko S.Pd yang menjelaskan bahwa, evaluasi Diri Sekolah (EDS) berkaitan dengan peningkatan mutu, hal ini sesuai dengan fungsi dari EDS yaitu memberikan profil capaian sekolah pada delapan SNP selama satu tahun. Penyusunan dokumen EDS dilakukan setiap tahun pelajaran menjadi dasar bagi ditetapkannya rencana sekolah berupa RKAS.

Hal yang sama dijelaskan oleh kepala tata usah, wakil kepala sekolah dan pegawai TU bahwa EDS sekolah ini sangat penting. Dalam peningkatan mutu diperlukan perencanaan yang

matang. Untuk membuat suatu perencanaan, harus dilakukan EDS, agar perencanaan yang dibuat sesuai dengan kebutuhan dan sasaran. Untuk membuat suatu perencanaan, harus dilakukan EDS, agar perencanaan yang dibuat sesuai dengan kebutuhan dan sasaran.

Selanjutnya untuk kaitan EDS dengan mutu juga dijelaskan oleh kepala Tata usaha Ibu Erlina Guswara yaitu kaitannya dengan dbuat EDS ini akan jelas bagaimana kondisi sekolah, kekurangan sekolah. Jadi bahan cerminan dan untuk lebih baik lagi kedepannya.

Berdasarkan observasi penelliti dan pencermatan dokumen yang ada di SMPN 4 Batusangkar, peneliti menemukan bahwa sudah ada dokumen EDS(evaluasi diri sekolah) yang jelas yang diletakan di bagian tata usaha sekolah dalam bentuk dokumen. Namun evaluasi ini tidak ada dibuat dalam papan tulis sekolah, hanya dalam bentuk dokumen saja.

Selanjutnya berdasarkan dokumen yang ada di SMPN 4 Batusangkar yang terdapat dalam RKS sekolah juga dicantumkan didalamnya mengenai kegiatan pengawasan dan evaluasi yaitu sebagai berikut:

Rencana Monitoring dan Evaluasi (Monev)

1) Tujuan Monitoring dan Evaluasi

Monitoring merupakan kegiatan yang bertujuan untuk mengetahui apakah program sekolah berjalan sebagaimana yang direncanakan, apa hambatan yang terjadi dan bagaimana cara mengatasi masalah tersebut. Jadi menekankan pada pemantauan proses pelaksanaan program. Evaluasi merupakan kegiatan yang bertujuan untuk mengetahui apakah program sekolah mencapai sasaran yang diharapkan. Jadi menekankan pada aspek hasil.

2) Komponen Utama Monitoring dan Evaluasi

a) Komponen Input

- (1) Aspek tenaga kependidikan : Kepala Sekolah, Guru dan Karyawan
- (2) Aspek Kesiswaan : Kondisi siswa dan prestasi siswa
- (3) Aspek sarana prasarana
- (4) Aspek peran masyarakat

b) Komponen proses

- (1) Aspek Kurikulum dan bahan ajar
- (2) Aspek proses belajar mengajar
- (3) Aspek penilaian
- (4) Aspek menejemen dan kepemimpinan

c) Komponen Output

- (1) Aspek prestasi belajar siswa
- (2) Aspek prestasi Guru dan Kepala Sekolah
- (3) Aspek prestasi sekolah

3) Pelaksana Monitoring dan Evaluasi

a) Internal

- (1) Kepala Sekolah
- (2) Kepala Sekolah dan Wakil Kepala Sekolah

b) Eksternal

- (1) Komite Sekolah
- (2) Dinas Pendidikan
- (3) Bawas Kabupaten
- (4) Dinas P dan K Provinsi
- (5) Direktorat Pembinaan SMP
- (6) Irjen Depdiknas, BPKP dan BPK

4) Waktu Pelaksanaan

a) Monitoring

(1) Internal : dilaksanakan setiap tiga bulan sekali

(2) Eksternal : sesuai jadwal monitoring

b) Evaluasi

(1) Internal : dilaksanakan diakhir tahun pelajaran

(2) Eksternal : sesuai jadwal evaluasi

5) Sumber Data

(1) Dokumen

(2) Hasil Pengamatan

(3) Instrumen ME

6) Metode Pengumpulan Data

(1) Metode Dokumentasi

(2) Metode wawancara

(3) Metode observasi

(4) Metode koesioner

7) Rincian Kegiatan

(1) Pembentukan TIM ME Sekolah

(2) Menyusun Jadwal pelaksanaan ME

(3) Melaksanakan ME

(4) Analisis Hasil ME dan tidak lanjut (Sumber: Data RKAS SMPN 4 Batusangkar).

Jadi, dapat peneliti simpulkan bahwa kepala sekolah sudah melaksanakan kegiatan pengawasan di SMPN 4 Batusangkar dengan cara pengawasan langsung yang dilakukan tiap hari. Namun belum sesuai dengan standar pengelolaan pendidikan. Karena masih belum melaksanakan kegiatan pengawasan secara terstruktur, sebagaimana

yang tertuang dalam dokumen RKS diatas. Kegiatan supervisi juga belum dilaksanakan oleh sekolah. kegiatan evaluasi ada yang sudah dilaksanakan SMPN 4 Batusangkar berupa membuat EDS yang berguna untuk peningkatan mutu sekolah.

d. Kepemimpinan Kepala Sekolah dalam Peningkatan Mutu Sekolah

Kepala sekolah dalam mengelola suatu sekolah harus mampu mempengaruhi bawahan atau mengajak bawahan untuk bekerja. Untuk itu, kepala sekolah harus menggunakan gaya kepemimpinan yang tepat dan sesuai agar tujuan yang diinginkan tersebut dapat tercapai secara efektif dan efisien nantinya.

Berdasarkan penelitian yang peneliti lakukan di SMPN 4 Batusangkar adapun gaya kepemimpinan dan upaya kepala sekolah dalam implementasi standar pengelolaan pendidikan adalah sebagai berikut:

1) Gaya kepemimpinan

Gaya kepemimpinan yang diterapkan kepala sekolah di SMPN 4 Batusangkar adalah dominan gaya kepemimpinan demokratis, namun adakalanya kepala sekolah akan menggunakan gaya kepemimpinan otorite. Hal ini tergantung bagaimana bentuk keputusan yang akan diambil dan tergantung pada situasional dari sekolah. Keterangan ini didapatkan dari hasil wawancara peneliti dengan kepala sekolah Bapak Bestaliko S.Pd yang menjelaskan bahwa setiap gaya kepemimpinan tentu memiliki kekurangan dan kelebihan, tidak ada gaya yang sempurna. Beliau menerapkan gaya kepemimpinan demokratis. Namun dalam situasi tertentu adakalanya beliau harus mengambil keputusan sendiri. Karena ada beberapa hal dalam program sekolah yang tidak harus melibatkan seluruh pihak dalam kegiatan sekolah. Jadi dalam kepemimpinan

bapak sesuaikan dengan situasi yang ada. Namun kepala sekolah SMPN 4 Batusangkar Bapak Bestaliko S.Pd dominan musyawarah dalam mengambil keputusan di sekolah ini

Kepala SMPN 4 Batusangkar Bapak Bestaliko S.Pd juga menjelaskan alasan beliau menggunakan gaya kepemimpinan demokratis dan berdasarkan situasi yang ada, sebagai berikut karena dalam mengambil keputusan tentu dampaknya terhadap banyak orang. Oleh karena itu bapak Bestaliko S.Pd melibatkan banyak orang dengan cara musyawarah, agar keputusan yang di ambil nantinya di dukung oleh setiap personil sekolah dan keputusan tersebut mampu di terapkan meningkatkan mutu sekolah secara umum. Karena untuk mewujudkan mutu ini perlu dukungan dan kerjasama setiap personil sekolah.

Hal yang sama juga diungkapkan oleh kepala tata usaha sekolah Ibu Erlina Guswara, yaitu gaya kepemimpinan yang diterapkan kepala sekolah adalah gaya kepemimpinan demokratis, namun adakalanya kepala sekolah mengambil keputusan tidak melibatkan orang lain (otoriter), kepala tata usaha melihat gaya kepemimpinan bapak kepek berdasarkan situasi, namun dominan demokratisnya. Selanjutnya wakil kepala sekolah Bapak Delfi Warman juga menuturkan hal yang sama yaitu kepala sekolah SMPN 4 Batusang sesuai situasi, namun lebih dominan gaya demokratis.

Kepala tata usaha SMPN 4 Batusangkar Ibu Erlina Guswara S.Sos dan Pegawai Tata Usaha ibuk Vivy juga menjelaskan penilaian beliau terhadap gaya kepemimpinan yang diterapkan oleh kepala sekolah, yaitu sangat cocok sekali, karena setiap keputusan yang di ambil, tentu akan dijalankan dan ditaati bersama, oleh karena itu diperlukan musyawarah ini. Ibu sangat suka gaya kepemimpinan bapak sekarang, karena sebelumnya kepala sekolah

menggunakan gaya laiziz fayre, nah ini menimbulkan konflik. Oleh karena itulah gaya kepemimpinan ini menurut ibuk sudah tepat sekali.

Jadi dapat disimpulkan bahwa gaya kepemimpinan yang diterapkan kepala sekolah adalah gaya kepemimpinan demokratis, namun adakalanya kepala sekolah menggunakan gaya kepemimpinan otoriter. Hal ini berdasar pada jenis keputusan yang akan diambil. Gaya kepemimpinan yang diterapkan kepala sekolah sudah cocok dan mendapat dukungan dari personil sekolah.

2) Upaya Kepala Sekolah dalam Implementasi Standar Pengelolaan dalam Peningkatan Mutu Sekolah

Standar pengelolaan pendidikan sangat berkaitan dengan bagaimana kinerja kepala sekolah dalam memimpin sebuah lembaga pendidikan, kepala sekolah SMPN 4 Batusangkar memahami mengenai standar pengelolaan pendidikan, sebagaimana hasil wawancara peneliti dengan kepala sekolah Bapak Bestaliko S,Pd yaitu mengenai standar pengelolaan pendidikan merupakan salah satu standar nasional pendidikan, yang sangat berkaitan dengan kepala sekolah karena tentang pengelolaan pendidikan. Dalam standar pengelolaan pendidikan terdapat beberapa point yang harus dipenuhi sekolah di antaranya perencanaan, pelaksanaan, kepemimpinan dan pengawasan. Jadi, dokumen standar pengelolaan pendidikan di SMPN 4 Batusangkar sudah dikelompokkan didalam lemari kaca tentang 8 SNP, salah satunya standar pengelolaan pendidikan. Kepala sekolah SMPN 4 Batusangkar juga menjelaskan pihak yang terlibat dalam pengelolaan pendidikan yaitu Kerja sama tentu sangat diperlukan dalam suatu sekoah, sejauh ini sekolah bekerja sama dengan

seluruh personil sekolah, komite sekolah, wali murid dan masyarakat sekitar.

Hal ini di dukung oleh hasil wawancara peneliti dengan kepala tata usaha SMPN 4 Batusangkar Ibu Erlina Guswata, yaitu tugas beliau yaitu memenuhi administrasi standar pengelolaan pendidikan. Standar pengelolaan pendidikan merupakan salah satu standar yang dari 8 standar nasional pendidika. Maka sebagai TU beliau diberi tugas untuk melengkapi administrasi yang berkaitan dengan standar pengelolaan tersebut dan nantinya akan di masukan ke dalam map merah dan di identifikasi berapa pointnya. Hal ini gunanya untuk penilaian akreditasi sekolah nantinya. Oleh karena itu harus dilengkapi dan di letakan di lemari agar pas waktu penilaian tim asesor bisa memeriksa di tempat yang sudah di sediakan dan dalam keadaan rapi.

Upaya yang dilakukan oleh kepala sekolah dalam implementasi standar pengelolaan dalam peningkatan mutu sekolah, dijelaskan oleh kepala sekolah Bapak Bestaliko S.Pd dalam hal ini beliau selaku kepala sekolah memberikan pengarahan kepada guru dan TU akan pentingnya pelaksanaan standar pengelolaan pendidikan yang sangat besar kaitannya dengan kerja kepala sekolah. Beliau menekankan kepada seluruh personil sekolah bahwa kerja kepala sekolah berhasil jika ada dukungan dari personil sekolah. Jadi, inilah gunanya dibangun komitmen oleh kepala sekolah terhadap seluruh personil sekolah.

Kepala tata usaha Ibu Erlina Guswara S.Sos juga melakukan upaya dalam implementasi standar pengelolaan dalam peningkatan mutu sekolah, yaitu dengan melaksanakan tugas oleh kepala sekolah untuk melengkapi administrasi yang berkaitan dengan 8 SNP, salah satunya standar pengelolaan pendidikan. Hal ini didukung oleh keterangan wakil kepala sekolah Bapak Delfi Warman dan pegawai tata usaha Ibu Vivy juga menjelaskan

upaya mereka dalam implementasi standar pengelolaan pendidikan yaitu: Membantu kepala sekolah dalam pengelolaan sekolah dan selalu melakukan kerjasama dan mendukung setiap program kerja yang akan dilaksanakan serta membantu dalam pelaksanaannya. Serta Membantu melengkapi bahan standar pengelolaan pendidikan dan membuat administrasi sesuai aturan.

Hal ini di dukung dari hasil pengamatan peneliti mengenai kepemimpinan kepala sekolah di SMPN 4 Batusangkar, sudah memenuhi standar pengelolaan pendidikan, karena dapat dilihat dari struktur kepemimpinan sekolah terdiri dari kepala sekolah dibantu dengan wakil kepala sekolah dan kepala tata usaha dan koordinator urusan serta sudah menyadari peranan dan fungsi masing-masing untuk mendukung optimalisasi pengelolaan menuju sekolah yang bermutu. Sewaktu peneliti melakukan penelitian, peneliti melihat kepala sekolah yang langsung ikut serta dalam kegiatan gotong royong (membersihkan perkarangan sekolah) bersama dengan guru, tata usaha sekolah dan siswa. Hal ini menunjukkan bahwa kepemimpinan kepala sekolah sudah bagus, karena sudah mampu menggerakkan bawahan untuk bekerja dan ikut serta dalam pekerjaan tersebut.

Berdasarkan keterangan wawancara dan pengamatan di atas dapat disimpulkan bahwa Kepala sekolah melakukan upaya peningkatan mutu sekolah dengan memberikan pengarahan kepada guru dan TU akan pentingnya pelaksanaan standar pengelolaan pendidikan yang sangat besar kaitannya dengan kerja kepala sekolah dan memberikan tugas terhadap kepala tata usaha dan pegawai tata usaha sekolah dalam melengkapi administrasi standar pengelolaan pendidikan dan dimasukkan ke dalam dokumen dan diletakkan di lemari yang khusus berisi standar nasional pendidikan.

Jadi, dapat peneliti simpulkan bahwa kepemimpinan kepala sekolah SMPN 4 Batusangkar sudah sesuai dengan standar pengelolaan pendidikan, hal ini dapat dilihat dari gaya kepemimpinan yang diterapkan kepala sekolah atau cara beliau memimpin sebuah sekolah, serta dapat dilihat dari struktur kepemimpinan suatu sekolah dan tanggung jawab dari semua personil sekolah dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya di sekolah.

C. PEMBAHASAN

Dalam suatu lembaga pendidikan yaitu suatu sekolah harus dikelola dengan baik untuk mencapai tujuan sekolah dan mewujudkan sekolah yang bermutu. Berdasarkan wawancara peneliti dengan beberapa informan di SMPN 4 Batusangkar dapat diperoleh informasi bahwakeseluruhan informan memahami tentang standar pengelolaan pendidikan, yaitu suatu patokan dan acuan dalam pengelolaan pendidikan, yang didalamnya terdiri dari perencanaan program, pelaksanaan program, pengawasan dan kepemimpinan kepala sekolah. standar pengelolaan pendidikan ini merupakan salah satu standar dari standar nasional pendidikan.

Hal ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan, yang menyatakan bahwa Standar pengelolaan adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan, kabupaten/kota, provinsi, atau nasional agar tercapai efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pendidikan.

Jadi, dapat peneliti simpulkan bahwa pemahaman informan tentang standar pengelolaan pendidikan sesuai dengan isi dari Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan, ini menandakan kunci awal bagi sekolah melaksanakan standar

pengelolaan pendidikan ini, karena jika tidak memahami maka akan terkendala dalam pelaksanaannya. sehingga tidak akan tercapai akreditasi sekolah yang bagus.

1. Perencanaan Program Pendidikan dalam Peningkatan Mutu Sekolah

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan di SMPN 4 Batusangkar diperoleh informasi bahwa perencanaan program pendidikan di SMPN 4 Batusangkar sudah sesuai dengan standar pengelolaan pendidikan. Informan memahami perencanaan berorientasi mutu sekolah, bahwa perencanaan program di SMPN 4 Batusangkar ditandai dengan kegiatan berupa perumusan visi, misi, tujuan, serta rencana kerja sekolah. Dalam penyusunan rencana kerja, produk yang dihasilkan dapat berupa rencana jangka menengah yang menggambarkan tujuan yang akan dicapai dalam kurun waktu empat tahun yang terkait dengan mutu lulusan.

Hal ini sesuai dengan Permendiknas Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan Oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah, perencanaan program ditandai dengan kegiatan berupa perumusan visi, misi, tujuan, serta rencana kerja sekolah. Dalam penyusunan rencana kerja, produk yang dihasilkan adalah dapat berupa rencana jangka menengah yang menggambarkan tujuan yang akan dicapai dalam kurun waktu empat tahun yang terkait dengan mutu lulusan. Kemudian rencana kerja tahunan yang dinyatakan dalam Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah/ Madrasah (RKA-S/M) dilaksanakan berdasarkan rencana jangka menengah. Rencana kerja sekolah setidaknya memuat beberapa aspek, meliputi kesiswaan, kurikulum dan kegiatan pembelajaran, pendidik dan tenaga kependidikan serta pengembangannya, sarana dan prasarana, keuangan dan pembiayaan, budaya dan lingkungan

sekolah, peran serta masyarakat dan kemitraan, serta beberapa rencana kerja lain yang mengarah pada peningkatan dan pengembangan mutu.

Selain itu, berdasarkan wawancara yang peneliti lakukan dengan kepala SMPN 4 Batusangkar, wakil, kepala TU juga menjelaskan bahwa kegiatan perencanaan program pendidikan sangat penting sekali karena perencanaan merupakan salah satu fungsi manajemen. Maka dalam mengelola suatu lembaga pendidikan harus dilakukan perencanaan terlebih dahulu, jika tidak maka tidak akan jelas arah dan tujuan sebuah lembaga pendidikan.

Hal ini sesuai dengan pendapat Engkoswara dan Komariah (2011:132) menjelaskan bahwa perencanaan pendidikan adalah proses menetapkan keputusan yang berkaitan dengan tujuan-tujuan yang akan dicapai, sumber-sumber yang akan diberdayakan, dan teknik/metode yang dipilih secara tepat untuk melaksanakan tindakan selama kurun waktu tertentu agar penyelenggaraan sistem pendidikan dapat dilaksanakan secara efektif, efisien, dan bermutu. Selanjutnya Afifudin (2005) menjelaskan perencanaan termasuk perencanaan pendidikan bukan hanya sebagai pola dasar (blue-print), melainkan juga merupakan petunjuk dalam pengambilan keputusan tentang cara mencapai tujuan itu. Oleh karena itu perencanaan pendidikan tidak berhenti pada saat tersusunnya dan si setuju rencananya oleh pengambil keputusan, tetapi erat kaitannya dengan implementasinya. Selanjutnya Menurut Kurniadin dan Machali (2012:145), inti perencanaan adalah sebuah usaha merancang dan memilih pada waktu sekarang untuk sesuatu yang ingin diwujudkan dimasa yang akan datang (*choosing our desired future today*). Perencanaan dalam konteks pendidikan berarti pemilihan atau penentuan program/strategi/langkah yang dilakukan untuk mewujudkan tujuan pendidikan yang ditetapkan. Perencanaan pendidikan yang dilakukan pada dasarnya adalah wujud tanggung jawab dari berbagai alternatif pilihan yang ada dalam kehidupan.

Setiap pilihan yang diambil pasti mempunyai konsekuensi dari apa yang dipilih. Oleh karena itulah, memilih untuk merencanakan sesuatu dan menyadari akan konsekuensi yang akan hadir merupakan bentuk tanggung jawab kemanusiaan. Dengan demikian perencanaan pendidikan pada hakikatnya adalah sebuah usaha memaksimalkan akibat dari sebab keputusan pilihan yang diambil mengenai kebijakan pendidikan sekarang untuk masa depan dan meminimumkan unsur “kebetulan” atau “kecelakaan” dalam pendidikan.

Selanjutnya berdasarkan wawancara yang telah peneliti lakukan di SMPN 4 Batusangkar, bahwa dalam perencanaan program pendidikan untuk meningkatkan mutu sekolah dilakukan dengan melibatkan semua *stakeholders pendidikan*, yaitu kepala sekolah, wakil kepala sekolah, kepala TU, Pegawai TU dan masyarakat. Hal ini agar terwujudnya kerjasama antara sekolah dan masyarakat dalam upaya peningkatan mutu sekolah.

Hal ini sesuai dengan teori Priansa & Somad (2014:40) menjelaskan bahwa peningkatan kualitas pengelolaan sekolah tidak hanya bergantung pada kebijakan pemerintah, namun bergantung pula pada partisipasi dari semua lapisan masyarakat sebagai *stakeholders* utama dalam sistem pendidikan nasional. Sistem pendidikan nasional mengharuskan adanya hubungan interdependensi antar komponen *stakeholder* pendidikan, yang melibatkan: 1) masyarakat, 2) orang tua, 3) peserta didik, 4) negara dan 5) pengelola profesi pendidikan.

Jadi dapat disimpulkan bahwa perencanaan program di SMPN 4 Batusangkar sudah berorientasi mutu dan mengacu pada standar nasional pendidikan, mengenai perencanaan pengelolaan pendidikan, tekhusus pada standar pengelolaan pendidikan. Perencanaan program mencakup visi, misi, tujuan sekolah dan rencana kerja sekolah atau madrasah. Visi sekolah adalah cita-cita bersama warga sekolah dan segenap pihak yang berkepentingan, yang menggambarkan dan memberikan inspirasi, motivasi dan kekuatan untuk kepentingan masa

mendatang bagi sekolah. Misi sekolah adalah arah untuk mewujudkan visi yang telah ditetapkan, menjadi dasar program pokok sekolah atau madrasah dengan menekankan pada kualitas layanan pada peserta didik dan mutu lulusan yang diharapkan. Sedangkan tujuan sekolah menggambarkan tingkat kualitas yang perlu dicapai dalam jangka menengah (empat tahunan) yang mengacu pada visi, misi dan tujuan pendidikan nasional serta relevan dengan kebutuhan masyarakat. Maka perencanaan program di SMPN 4 Batusangkar sudah sesuai dengan yang tercantum dalam permendiknas No 19 Tahun 2007.

2. Pelaksanaan Program Pendidikan dalam Peningkatan Mutu Sekolah

Berdasarkan hasil penelitian di SMPN 4 Batusangkar diperoleh informasi bahwa pelaksanaan program kerja di SMPN 4 Batusangkar sudah mengacu pada RKS dan terorganisasi dengan baik dengan adanya struktur organisasi sekolah, bentuk rencana kerja yang sudah direalisasikan sudah banyak di SMPN 4 Batusangkar, diantaranya berkaitan dengan standar pengelolaan pendidikan yaitu seperti mengadakan lokakarya untuk menyusun visi dan misidan tujuan sekolah, mengadakan rapat sosialisasi visi, misi dan tujuan sekolah, menyusun dokumen rencana kerja sekolah dalam bentuk RKS, pengawasan dari kepala sekolah terhadap guru dan tenaga kependidikan, menyediakan laporan keuangan yang transparan, membuat struktur tugas yang jelas sesuai keahlian dan membangun kerja sama dengan lembaga lain untuk peningkatan mutu sekolah. program dijalankan oleh orang-orang yang diberi tanggung jawab dalam pelaksanaannya. Namun masih banyak juga program sekolah yang belum dijalankan seperti kegiatan ekstrakurikuler. Padahal ini sangat penting bagi siswa agar siswa tidak jenuh dan bisa mengembangkan bakatnya. Program kegiatan supervisi juga masih belum dijalankan serta sarana yang masih kurang dan tidak terawat

serta pembangunan mushala yang belum juga selseai. Hal ini di karenakan dana yang sangat minim. Oleh karena itu hendaknya sekolah harus lebih meningkatkan kerjasama dengan pihak luar, agar bisa menambah pendanaan di sekolah. jadi intinya pelaksanaan program pendidikan sudah mengacu pada standar pengelolaan pendidikan, namun masih ada yang belum dilaksanakan karena kurangnya pendanaan pendidikan di SMPN 4 Batusangkar.

Hal ini sesuai dengan pendapat Komariah (2011:94-95), yang menjelaskan bahwa setelah mendapat kepastian tentang tujuan, sumber daya dan teknis metode yang digunakan untuk mencapai tujuan tersebut, lebih lanjut manajer melakukan upaya pengorganisasian agar rencana tersebut dapat dikerjakan oleh orang ahlinya secara sukses. Mengorganisasikan adalah proses mengatur, mengalokasikan dan mendistribusikan pekerjaan, wewenang dan sumber daya diantara anggota organisasi untuk mencapai tujuan organisasi. Mengorganisaikan sangat penting dalam manajemen karena membuat posisi orang jelas dalam struktur dan pekerjaannya dan melalui pemilihan, pengalokasian dan pendistribusian kerja yang profesional, organisasi dapat mencapai tujuan secara efektif dan efesien.

Teori selanjutnya berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No 19 Tahhun 2007, menjelaskan yang terkait dengan pelaksanaan program pendidikan yaitu:1) pedoman sekolah, 2) struktur organisasi sekolah, 3) pelaksanaan kegiatan sekolah/ Madrasah, 4) Bidang Kesiswaan, 5) Bidang Kurikulum dan Kegiatan Pembelajaran, 6) Bidang Pendidik dan Tenaga Kependidikan, 7)bidang sarana dan prasarana, 8) Bidang Keuangan dan pembiayaan, 9) budaya dan lingkungan sekolah dan 10) peran serta masyarakat dan kemitraan sekolah.

Selain itu, dalam pelaksanaan program kerja untuk meningkatkan mutu sekolah di SMPN 4 Batusangkar kepala sekolah

juga melakukan kegiatan berupa pembentukan komitmen, baik itu komitmen kepala sekolah dengan guru, guru dengan guru, kepala sekolah, guru dengan wali murid. Kegiatan ini sangat bagus dan mendukung terhadap pengelolaan pendidikan yang lebih baik. Karena salah satu upaya peningkatan mutu sekolah adalah pembentukan komitmen.

Hal ini didukung oleh Arcaro (2006:14) menjelaskan bahwa model sekolah bermutu terpadu terdiri dari pilar-pilar yang menopangnya, yaitu berfokus atau berpusat pada kostumer, keterlibatan secara menyeluruh, pengukuran, komitmen dan perbaikan keberlanjutan. Namun komponen dari mutu adalah fondasi yang mendasari bangunan program mutu. Keyakinan dan nilai-nilai sekolah akan menentukan kekuatan dan keberhasilan transformasi mutu. selanjutnya juga didukung teori oleh Sukmadinata (2002:11) untuk melaksanakan program mutu ada beberapa dasar yang kuat yaitu:

- e. Komitmen pada perubahan; pengelola yang ingin menerapkan program mutu, harus memiliki komitmen atau tekad untuk berubah, sebab peningkatan mutu pada intinya adalah melakukan perubahan ke arah yang lebih baik, lebih berbobot. Perubahan pada dasarnya menimbulkan rasa takut, komitmen dapat menghilangkan rasa takut.
- f. Pemahaman yang jelas tentang kondisi yang ada; banyak kegagalan yang dialami dalam melaksanakan perubahan karena melakukan sesuatu sebelum sesuatu itu jelas.
- g. Mempunyai visi yang jelas tentang masa depan; perubahan yang dilakukan hendaknya didasarkan pada visi tentang perkembangan, tantangan kebutuhan, masalah, peluang yang akan dihadapi dimasa yang akan datang. Visi dapat menjadi pedoman yang membimbing tim dalam perjalanan pelaksanaan program mutu

- h. Mempunyai rencana yang jelas; rencana adalah pegangan dalam proses pelaksanaan program mutu yang dipengaruhi oleh faktor-faktor internal maupun eksternal yang akan selalu berubah. Rencana harus selalu di *up-date* sesuai perubahan-perubahan tersebut. tak ada program mutu yang berhenti dan tidak ada dua program yang identik, karena program mutu selalu didasarkan dan disesuaikan dengan kondisi lingkungan. Program mutu merefleksikan lingkungan pendidikan dimana ia berada (Engkoswara & Komariah, 2011:316).

Jadi, dapat peneliti simpulkan bahwa pelaksanaan program kerja di SMPN 4 Batusangkar sudah mengacu pada teori yang ada, namun ada beberapa program yang belum terlaksana, karena kendala pendanaan sekolah yang sangat mini. Salah satu upaya peningkatan mutu sekolah dan mewujudkan sekolah bermutu adalah dengan membentuk komitmen. Kepala sekolah SMPN 4 Batusangkar sudah melakukan peningkatan mutu sekolah dengan membentuk komitmen dari seluruh warga sekolah, karena ini kunci dalam peningkatan mutu sekolah. Tanpa adanya komitmen maka tidak akan terwujud sekolah bermutu, karena tidak ada tanggung jawab dari masing-masing personil sekolah.

3. Pengawasan

Berdasarkan hasil penelitian di SMPN 4 Batusangkar diperoleh informasi bahwa kepala sekolah sudah melaksanakan kegiatan pengawasan. Kegiatan ini dilakukan setiap hari. Namun belum sesuai dengan standar pengelolaan pendidikan. Karena masih belum melaksanakan kegiatan pengawasan secara terstruktur, kegiatan supervisi juga belum dilaksanakan. namun SMPN 4 Batusangkar sudah membuah EDS yang berguna untuk peningkatan mutu sekolah.

Hal ini didukung oleh Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang standar nasional pendidikan Bab VIII Standar pengelolaan pasal 55,56 dan 57, menjelaskan bahwa pengawasan satuan pendidikan meliputi pemantauan, supervisi, evaluasi, pelaporan dan tindak lanjut hasil pengawasan. Pemantauan dilakukan oleh pimpinan satuan pendidikan dan komite sekolah/madrasah atau bentuk lain dari lembaga perwakilan pihak-pihak yang berkepentingan secara teratur dan berkesinambungan untuk menilai efesiensi, efektifitas, dan akuntabilitas satuan pendidikan. Supervisi yang meliputi supervisi manajerial dan akademik dilakukan secara teratur dan berkesinambungan oleh pengawas atau pemilik satuan pendidikan dan kepala satuan pendidikan.

Menurut Rivai & Murni (2010:817), menjelaskan bahwa sebagai tenaga kependidikan, kedudukan pengawas sangat jelas dan tegas di lembaga pendidikan. Yang dimaksud dengan tenaga kependidikan terdiri atas:guru, pengelola satuan pendidikan, pustakawan, laboratorium, teknisi sumber belajar, dan penguji.

Pengawas (Supervisor) adalah salah satu tenaga kependidikan, yang bertugas memberikan pengawasan agar tenaga kependidikan (guru, rektor, dekan, ketua program, direktur kepala sekolah, personel lainnya di sekolah) dapat menjalankan tugasnya dengan baik. Pengawas diberi tugas, tanggung jawab dan wewenang secara penuh untuk melakukan pengawasan dengan memberikan penilaian dan pembinaan dari segi teknis pendidikan dan administrasi pada satuan pendidikan.

Kedudukan pengawas sangat strategis dan akan memengaruhi mutu sekolah secara keseluruhan. Pengawas bersifat fungsional dan bertanggung jawab terhadap terjadinya proses pembelajaran, pendidikan dan bimbingan di lingkungan persekolahan pada berbagai jenjang dan jenis pendidikan. Fungsinya yang cukup strategis itu akan dapat meningkatkan proses pembelajaran dan bimbingan yang

dilakukan oleh guru sehingga proses pendidikan akan berlangsung secara efektif, terutama di lingkungan pendidikan.

Tugas terpenting pengawas adalah memberikan berbagai alternatif pemecahan masalah dalam pembelajaran. Bila terjadi sesuatu yang timbul atau muncul kepermukaan yang dapat mengganggu proses belajar mengajar maka kehadiran pengawas bersifat fungsional untuk melakukan perbaikan. Oleh karena itu pemberdayaan pengawas diperlukan untuk meningkatkan fungsinya sebagai motivator, fasilitator dan sekaligus katalisator pengajaran.

Pengawasan diperlukan dalam peningkatan mutu sekolah . Asumsi ini didasarkan atas kenyataan bahwa setiap orang bekerja memerlukan penghargaan, dorongan dan lain sebagainya dari orang lain. Jika saat ini seseorang malas, tetapi karena didorong oleh orang lain ia termotivasi kembali untuk melakukan sesuatu. Tugas pengawas salah satunya adalah memberikan dorongan agar tenaga kependidikan baik guru, kepala sekolah dan personel lainnya di sekolah, termotivasi untuk berkinerja.

Dalam mengukur keberhasilan suatu program diperlukan evaluasi yang komprehensif sehingga diketahui mana program yang banyak masalahnya, dan mana yang tidak. Apa penyebab suatu program kurang tercapai dan apa langkah profesional yang dilakukan mengatasi hal tersebut. Langkah-langkah pro aktif harus dilakukan untuk membina tenaga kependidikan itu menuju arah yang berkinerja tinggi. Dalam hal ini, pengawas pendidikan memiliki kemampuan untuk meningkatkan kinerja tenaga kependidikan, pengawas pendidikan bersifat fungsional dalam memberikan layanan bantuan bagi personel sekolah di lingkungan persekolahan (Rivai & Murni , 2010:818).

Menurut Kurniadin dan Machali (2012:367), pengawasan adalah suatu kegiatan untuk mendapatkan kepastian tentang pelaksanaan program atau pekerjaan/kegiatan yang sedang atau telah

dilakukan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan. Kegiatan pengawasan pada dasarnya untuk membandingkan kondisi yang ada dengan yang seharusnya terjadi. Kegiatan pengawasan konteks manajemen dilakukan oleh seorang manajer dengan tujuan untuk mengendalikan perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), pengarahan (*directing*), dan pengawasan (*controlling*) yang telah diformat dalam suatu program. Dari pengawasan ini, kemudian dilanjutkan dengan kegiatan penilaian dan pemantauan program serta perumusam langkah pencapaian tujuan yang akan dicapai.

Selanjutnya Kegiatan supervisi di SMPN 4 Batusangkar belum dilaksanakan oleh sekolah, namun sudah direncanakan. Kegiatan ini terkendala karena sedikitnya dana yang diperoleh sekolah. Namun kepala sekolah memiliki keinginan untuk melaksanakan kegiatan supervisi untuk tahun berikutnya. Kegiatan supervisi oleh kepala sekolah ini sangat penting dilaksanakan karena akan meningkatkan kemampuan personil sekolah dengan program pembinaan yang diberikan dalam kegiatan supervisi.

Hal ini didukung oleh teori dari Tim Dosen Administrasi Universitas Pendidikan Indonesia (2014:313), menjelaskan bahwa supervisi merupakan bimbingan profesional bagi guru-guru, bimbingan profesional yang di maksudkan adalah segala usaha yang memberikan kesempatan bagi guru-guru untuk berkembang secara profesional sehingga mereka lebih maju lagi dalam melaksanakan tugas pokoknya, yaitu memperbaiki dan meningkatkan proses belajar mengajar murid. Selanjutnya juga terdapat dalam Peraturan Pemerintah No 19 th 2005 Pasal 57 mengklasifikasikan supervisi terdiri dari dua bagian yaitu (1) supervisi akademik dan, (2) supervisi manajerial. Untuk supervisi manajerial dan akademik secara mendasar dapat di tinjau perbedaanya yaitu; supervisi manajerial, mampu membina kepala sekolah dan staf dalam meningkatkan kinerja

sekolah. Tujuannya pengembangan profesional dan motivasi kepada kepala sekolah, sedangkan supervisi akademik, mampu membina guru dalam meningkatkan kualitas pembelajaran. Tujuannya, bantuan yang di berikan kepada kepala sekolah dalam membina guru.

Di dalam RKS di SMPN 4 Batusangkar sudah ada bentuk kegiatan monitoring dan evaluasi yang terstruktur, namun belum dilaksanakan oleh sekolah. hal ini dijelaskan oleh Bell (1992:37) yang menyatakan pengawasan merupakan kegiatan monitoring kinerja untuk memastikan bahwa tujuan dapat di capai serta tugas dapat di selesaikan (Aedi:2014). Definisi lain menjelaskan bahwa pengawasan berkenaan dengan aktivitas memastikan agar pelaksanaan kegiatan sesuai dengan rencana dan dapat mencapai tujuan di kemukakan oleh Turner (1992:240) menerangkan bahwa pengawasan adalah aktivitas yang di gunakan oleh manajer untuk memastikan bahwa aktivitas yang di lakukan oleh organisasi konsisten dengan rencana yang telah di tetapkan dan aktivitas tersebut dapat mencapai sasaran organisasi (Aedi:2014).

Jadi, dapat peneliti simpulkan bahwa pengawasan di SMPN 4 Batusangkar belum mengacu pada standar nasional pendidikan, karena belum sesuai dengan teori yang ada pada Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang standar nasional pendidikan dan teori yang terkait dengan pengawasan. Namun pada realitanya kegiatan pengawasan sudah dilakukan, akan tetapi tidak terorganisir dan belum sesuai dengan standar pengelolaan pendidikan. Kegiatan supervisi oleh kepala sekolah juga belum dilaksanakan. Untuk kegiatan monitoring dan evaluasi juga sudah ada dijelaskan dalam RKS sekolah.

4. Kepemimpinan

Berdasarkan hasil penelitian di SMPN 4 Batusangkar dapat diperoleh informasi bahwa kepemimpinan kepala sekolah di SMPN 4 Batusangkar sudah sesuai dengan standar pengelolaan pendidikan. Kepala sekolah dominan menerapkan gaya kepemimpinan demokratis, yaitu kepala sekolah dalam pengambilan keputusan dengan cara musyawarah terlebih dahulu dan lebih mengutamakan kerjasama, namun adakalanya kepala sekolah menggunakan gaya lainnya sesuai dengan kondisi yang ada di sekolah dan jenis keputusan yang akan di ambil.

Hal ini sesuai dengan teori tentang Gaya kepemimpinan demokratis yang dijelaskan oleh Priansa & Somad (2014:200), bahwa gaya kepemimpinan demokratis menyajikan ruang kesetaraan dalam pendapat, sehingga guru, staf, dan pegawai lainnya memiliki hak yang sama untuk berkontribusi dalam tanggungjawab yang diembannya. Gaya kepemimpinan ini memandang guru, staf, dan pegawai lainnya sebagai bagian dari keseluruhan sekolah, sehingga mendapat tempat sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai manusia. Kepala sekolah mempunyai tanggungjawab dan tugas untuk mengarahkan, mengontrol, dan mengevaluasi, serta mengkoordinasi berbagai pekerjaan yang diemban guru, staf, dan pegawai lainnya. Hal ini didukung oleh teori Kurniadin & Machali (2012:305), menjelaskan bahwa kepemimpinan demokratis berorientasi pada manusia dan memberikan bimbingan yang efisien kepada para pengikutnya. Terdapat koordinasi pekerjaan pada semua bawahan, dengan penekanan pada rasa tanggungjawab internal (diri sendiri) dan kerjasama yang baik. Kekuatan kepemimpinan demokratis ini bukan terletak pada person atau individu pemimpin, melainkan kekuatan justru terletak pada partisipasi aktif dari setiap kelompok/

Somad (2014:192), menjelaskan riset serta kajian tentang kepemimpinan telah menghasilkan banyak perspektif (teori) tentang

kepemimpinan, dimana perspektif tersebut dapat membantu memahami tentang makna, proses, dan peran kepemimpinan dalam kehidupan organisasi dewasa ini. Tiga perspektif kepemimpinan menurut Sweeney dan McFarlin (2002) adalah:

1. Berfokus kepada pengikut (follower-centered)

Memusatkan perhatian pada kebutuhan pengikut serta bagaimana respon mereka terhadap pimpinan

2. Berfokus kepada pemimpin (leader-centered)

Memusatkan perhatian kepada sifat, keterampilan, dan perilaku pemimpin

3. Berfokus kepada situasi (situation-centered)

Memfokuskan perhatian pada variabel situasi serta pengaruhnya pada pemimpin

Selanjutnya Kepemimpinan kepala sekolah di SMPN 4 Batusangkar juga sudah terorganisir dengan baik, hal ini dibuktikan dengan adanya struktur organisasi sekolah yang berisi, sekolah di pimpin oleh kepala sekolah dan di bantu oleh satu orang wakil serta jajaran kebawahnya yang mengatur sarana, pembelajaran dan lain sebagainya.

Hal ini didukung oleh peraturan pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang standar pengelolaan pendidikan pasal 5, berisi bahwa 1) setiap satuan pendidikan dipimpin oleh seorang kepala satuan sebagai penanggung jawab pengelolaan pendidikan, 2) Dalam melaksanakan tugasnya kepala satuan SMP dibantu minimal oleh satu orang wakil kepala satuan pendidikan. Selanjutnya juga dijelaskan bahwa dalam suatu lembaga pendidikan pengambilan keputusan pada satuan pendidikan dasar menengah di bidang akademik dilakukan oleh Dewan Pendidik yang dipimpin oleh kepala satuan pendidikan.

Kepala sekolah di SMPN 4 Batusangkar melakukan upaya peningkatan mutu sekolah dengan memberikan pengarahan kepada guru dan TU akan pentingnya pelaksanaan standar pengelolaan pendidikan yang sangat besar kaitannya dengan kerja kepala sekolah dan memberikan tugas terhadap kepala tata usaha dan pegawai tata usaha sekolah dalam melengkapi administrasi standar pengelolaan pendidikan dan dimasukkan ke dalam dokumen dan diletakan dilemari yang khusus berisi standar nasional pendidikan.

Hal ini didukung oleh teori Kartono (2005), menjelaskan bahwa pemimpin adalah seorang pribadi yang memiliki superioritas tertentu, sehingga di memiliki kewibawaan dan kekuasaan untu menggerakkan orang lain melakukan usaha bersama untuk mencapai tujuan tertentu. Menurut Tim Dosen Administrasi Pendidikan Universitas Indonesia (2014:125) Kepemimpinan berarti kemampuan dan kesiapan yang dimiliki oleh seseorang untuk dapat mempengaruhi, mendorong, mengajak, menuntun, menggerakkan, mengarahkan, dan kalau perlu memaksa orang atau kelompok akan menerima pengaruh tersebut dan selanjutnya berbuat sesuatu yang dapat membantu tercapainya suatu tujuan tertentu yang telah ditetapkan. Dalam pernyataan lain Siagian (2003) memaparkan bahwa kepemimpinan merupakan motor atau daya penggerak dari pada semua sumber-sumber dan alat yang tersedia bagi suatu organisasi.

Jadi, dapat peneliti simpulkan bahwa kepemimpinan di SMPN 4 Batusangkar sudah sesuai dengan teori yang ada, karena kepala sekolah sudah mampu mengerakan bawahannya untuk bekerja dan sudah membuat struktur organisasai dan menggunakan gaya kepemimpinan yang sesuai. Semangat tinggi dari kepala sekolah mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan akan membantu sekolah dalam peningkatan mutu. Penanman komitmen yang

dilakukan kepala sekolah di SMPN 4 Batusangkar merupakan salah satu upaya dalam peningkatan mutu sekolah di SMPN 4 Batusangkar

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian dan pembahasan terhadap “Implementasi Standar Pengelolaan Pendidikan dalam Peningkatan Mutu Sekolah di SMPN 4 Batusangkar, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Perencanaan program pendidikan di SMPN 4 Batusangkar sudah dilakukan dengan mengacu kepada standar pengelolaan pendidikan. Kepala sekolah dan kepala tata usaha memahami perencanaan berorientasi mutu sekolah, bahwa perencanaan program di SMPN 4 Batusangkar ditandai dengan kegiatan berupa perumusan visi, misi, tujuan, serta rencana kerja sekolah. Dalam penyusunan rencana kerja, produk yang dihasilkan adapat berupa rencana jangka menengah yang menggambarkan tujuan yang akan dicapai dalam kurun waktu empat tahun yang terkait dengan mutu lulusan. Perencanaan program di SMPN 4 Batusangkar lebih menonjol dari point standar yang lainnya.
2. Pelaksanaan program kerja di SMPN 4 Batusagkar sudah mengacu pada RKS, bentuk rencana kerja yang sudah di relaisasikan sudah banyak di SMPN 4 Batusangkar, di antaranya berkaitan dengan standar pengelolaan pendidikanyaitu seperti mengadakan lokakarya untuk menyusun visi dan misidan tujuan sekolah, mengadakan rapat sosialisasi visi, misi dan tujuan sekolah, menyusun dokumen rencana kerja sekolah dalam bentuk RKS, pengawasan dari kepala sekolah terhadap guru dan tenaga kependidikan, menyediakan laporan keuangan yang trasparan, memmbuat struktur tugas yang jelas sesuai keahlian dan membangun kerja sama dengan lembaga lain untuk peningkatan mutu sekolah. Namun masih banyak juga program kerja yang belum teralisasi, seperti kegiatan ekstrakurikuler, perbaikan sarana dan prasarana sekolah, karena kendala pendanaan sekolah yang sangat sedikit. Oleh karena didahulukan program kerja yang lebih penting.

3. Kepala sekolah sudah melaksanakan kegiatan pengawasan. Kegiatan ini dilakukan setiap hari. Namun belum sesuai dengan standar pengelolaan pendidikan. Karena masih belum melaksanakan kegiatan pengawasan secara terstruktur, kegiatan supervisi juga belum dilaksanakan. Namun SMPN 4 Batusangkar sudah membuah EDS yang berguna untuk peningkatan mutu sekolah.
4. Kepemimpinan kepala sekolah di SMPN 4 Batusangkar dilakukan dengan mengacu kepada standar pengelolaan pendidikan. Kepala sekolah dominan menerapkan gaya kepemimpinan dmokratis, namun adakalanya menggunakan gaya lainnya sesuai dengan kondisi yang ada di sekolah dan jenis keputusan yang akan di ambil. Kepemimpinan kepala sekolah di SMPN 4 Batusangkar juga sudah terorganisir dengan baik, hal ini dibuktikan dengan adanya struktur organisasi sekolah yang berisi, sekolah di pimpin oleh kepala sekolah dan di bantu oleh satu orang wakil serta jajaran kebawhnya yang mengatur sarana, pembelajaran dan lain sebagainya.

B. SARAN

1. Hendaknya seluruh warga SMPN 4 Batusangkar meningkatkan kerjasama dalam peningkatan mutu sekolah.
2. Hendaknya kepala sekolah lebih teliti dalam menyusun struktur organisasi sekolah di SMPN 4 Batusangkar dan menempatkan sesuai dengan keahliannya.
3. Hendaknya sekolah meningkatkan kerjasama dengan pihak luar, kerjasama yang dijalin bukan hanya dalam bentuk rapat dan memberikan sumbang pemikiran, ide, namun sekolah hendaknya mengupayakan dan dari masyarakat. Hal ini agar terlaksananya program-program sekolah yang tertuang dalam perencanaan sekolah
4. Hendaknya kepala tata usaha tanggap akan administrasi sekolah dan mampu melngkapi administrasi sekolah yang berkaitan dengan standar pengelolaan pendidikan

5. Hendaknya kepala sekolah melakukan kegiatan supervisi, baik itu tenaga pendidik maupun kependidikan, karena hal ini mempengaruhi mutu sekolah. karena untuk peningkatan mutu harus dilakukan perbaikan terus menerus dan salah satu perbaikan mutu adalah mengelola SDM, dengan cara melakukan kegiatan supervisi.
6. Hendaknya di kegiatan sekolah, saran dari orang tua diterima dan dijalankan oleh sekolah. hal ini untuk meningkatkan kerjasama sekolah dan masyarakat dalam peningkatan mutu sekolah
7. Hendaknya dalam peningkatan mutu sekolah, sekolah hendaknya selain membangun komitmen juga harus melakukan perbaikan secara terus menerus sebagai upaya peningkatan mutu sekolah.

DAFTAR PUSTAKA

- Aedi, N.2014. *Pengawasan pendidikan Tinjauan Teori dan Praktik*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Afifuddin. 2015. *Kpemimpinan pendidikan*. Bandung: Pustaka Setia
- Afifudin, dkk. 2005.*Perencanaan dan Berbagai Pendekatan dalam Proses Belajar Mengajar*. Bandung: Insan Mandiri
- Arifin, M. 2003. *Kapita Selekta Pendidikan Islam*. Jakarta: PT Bumi Aksara
- Baker, E. 2005. *A Good School*, First Edition by the office Superintendent OF Public Instruction: Olympia Washington
- Bell, L. 1942. *Managing Teams In Secondar Schools*. New York: Routledge
- Suryosubroto. 2008. *Proses Belajar Mengajar di Sekolah*. Jakarta: Rineka Cipta
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 *Sistem Pendidikan Nasional*. 8 Juli 2003. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4301. Jakarta
- Dubrin, A.J. 2001. *Leadership. Research Findings, Practicer and skills: Thir*
- Engkoswara dan Komariah, A. 2011. *Administrasi Pendidikan*. Bandung: Alfabeta
- Fattah, N. 2012, *Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- Davis. G. B. 1991. *Kerangka Dasar Sistem Informasi Manajemen*.Jakarta :PT Pustaka Binamas Pressindo
- Jafriasen, D. 2004. *Upaya dan Strategi Pemenuhan Standar Nasional Pendidikan*. Skripsi. Program Sarjana STKIP Purnama. Jakarta
- Kartono. K. 2008. *Pemimpin dan Kepemimpinan*. Jakarta: Rajawali Pres
- Kurniadin, Didin dan Machali, Imam. 2012. *Manajemen Pendidikan*. Jogjakarta: Ar-Ruzz Media
- Lina, N. dan Sarbini. 2011. *Perencanaan Pendidikan*. Bandung: Pustaka Setia

- Makbuloh, D. 2011. *Manajemen Mutu Pendidikan Islam*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada
- Mulyadi. 2014. Implementasi Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah di Pondok Pesantren Tarbiyah Ah Islamiyah. Tesis. Program Pasca Sarjana. Batusangkar
- Murni, S. dan Rivai, V. 2010. *Education Management*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada
- Nourthouse, P.G. 2003. *Leadership, Teory and Practice*. New Delhi: Response Book
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 *Standar Nasional Pendidikan*. 16 Mei 2005. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41. Jakarta
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2013 *Standar Nasional Pendidikan*. 2013. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013. Jakarta
- Permendiknas No.19 Tahun 2007 *Tentang Standar Pengelolaan Pendidikan Oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah*. Bandung
- Prabowo, B.S. 2012. Pelaksanaan Standar Pengelolaan Pendidikan di SMP Negeri 3 Godean. Skripsi. Program Manajemen Pendidikan Islam. Yogyakarta
- Priansa, D. J. dan Somad, Rismi. 2014. *Manajemen Supervisi & Kepemimpinan Kepala Sekolah*. Bandung: Alfabeta
- Purwanto, N. 1987. *Administrasi dan Supervisi Pendidikan*. Jakarta: Nasco
- Rizka, U. 2010. *Strategi Kepala Sekolah dalm Peningkatan Mutu Pendidikan di SDS Anand Islamic School Pegadungan*. Skripsi. Program Administrasi. Jakarta Barat
- Riyuzen, P.T. 2016. *Manajemen Peningkatan Mutu Sekolah/ Madrasah di MAN 1 Model Bandar Lampung*. Disertasi. Program Doktor. Bandar Lampung
- Sallis. 1993. *Total Quality Management in Education*. London: Fogun Page
- Sani, Ridwan Abdullah. 2015. *Penjaminan Mutu Sekolah*. Jakarta: PT Bumi Aksara

- Suryosubroto. 2004. *Manajemen Pendidikan di Sekolah*. Jakarta: Rineka Cipta
- Setiawan, G.. 2004. *Implementasi dalam Birokrasi Pembangunan*. Jakarta: Balai Pustaka
- Sudarwan, D. 2007. *Visi Baru Manajemen Sekolah*. Jakarta: Bumi Aksara
- Sumayang, L. 2003. *Dasar-dasar Manajemen Produksi dan Operasi*. Jakarta: PT Salemba
- Tim Dosen Administrasi Pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia. 2014. *Manajemen Pendidikan*. Bandung: Alfabeta
- Tuerney, C. Et al. 1992. *The school Manager*. Australia: NASSP Bulletin
- Usman, N. 2002. *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*. Jakarta: Grasindo
- Yasril dan Fazis, M. 2014. *Manajemen Organisasi*. Batusangkar: STAIN Batusangkar PresMedia
- Zamroni. 2007. *Meningkatkan Mutu Sekolah*. Jakarta: PSAP Muhammadiyah